PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS PERTANIAN

Jl. Anjuk Ladang No. 37 Nganjuk 64417
Telp. (0358) 321728 Fax (0358) 325874 E-Mail : diperta.nganjuk2023@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 0007.5/39/411.317/2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

Menimbang : Bahwa untuk dapat mengukur kinerja individu di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, maka diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu (IKI) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk:

a. Memberikan informasi kinerja individu yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi;
b. Mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

a. Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b. Perencanaan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah;

e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
a.n. BUPATI NGANJUK
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk



Ida Shobihatin, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19750116 199412 2 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Sekretaris Dinas Pertanian
Tugas : Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan di lingkungan Dinas Pertanian
Fungsi :
1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
4. Pembinaan aparatur;
5. Pengelolaan urusan kepegawaian;
6. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
7. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
8. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
9. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	**Konsep :** SAKIP adalah sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah dapat mengelola dan melaporkan kinerjanya secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. **Definisi Operasional :** Hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang diukur melalui suatu sistem yang kemudian dikategorikan dengan predikat seperti AA, A, BB, B, CC, C atau D yang menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja. Penyelenggaran sakip meliputi beberapa komponen diantaranya; 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **Formulasi Perhitungan :** Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat). Bobot nilai komponen SAKIP 1. Perencanaan Kinerja 30% 2. Pengukuran Kinerja 30% 3. Pelaporan Kinerja 15% 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 25% Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP oleh Inspektorat	Sekretaris Dinas Pertanian

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]		
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan data kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan substansi	Dokumen	**Konsep :** Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang tepat waktu dan substansi adalah sinergi dan sinkronisasi antara tahapan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dan terpadu dalam satu sistem manajemen pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government). Prinsip utamanya adalah konsistensi, keterkaitan, dan efisiensi alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif dan tepat waktu. **Definisi Operasional :** Proses penyusunan dokumen-dokumen tersebut sesuai jadwal yang ditentukan dan memuat konten yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Secara spesifik, "tepat waktu" berarti dokumen diselesaikan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan, sementara "substansi" berarti isinya akurat, rinci, logis, dan selaras dengan kebijakan daerah, serta dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan dan evaluasi kinerja secara efektif. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan data kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	Rentra, Renja	Sekretaris Dinas Pertanian
		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Orang	**Konsep :** Sistem penggajian dan pembayaran tunjangan yang adil, layak, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta disalurkan tepat pada waktunya sesuai jadwal yang ditetapkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan aparatur sipil negara. **Definisi Operasional :** Kondisi di mana anggaran gaji dan tunjangan bagi ASN telah dialokasikan, tersedia, dan dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan tepat waktu dan sesuai hak pegawai **Formulasi Perhitungan :** Anggaran yang tersedia, jumlah ASN, jenis tunjangan, waktu pencairan, serta sistem administrasi yang mendukung proses pembayaran.	Daftar Gaji, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Daftar Mutasi Gaji	Sekretaris Dinas Pertanian
		Tersusunnya Laporan	Laporan	**Konsep :** meliputi penyusunan sistem informasi akuntansi yang kuat, penerapan	LRA, Neraca, Laporan	Sekretaris Dinas

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akurat		standar akuntansi pemerintah yang berlaku, pembinaan sistem pengendalian internal, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta komitmen manajemen untuk menyajikan data keuangan yang relevan sesuai jadwal yang ditentukan demi mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan akuntabilitas publik. **Definisi Operasional :** Proses pencatatan transaksi keuangan, yang digunakan untuk mendanai kegiatan perangkat daerah **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Pertanian
		Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat		**Konsep :** Tersusunnya laporan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang tepat waktu dan akurat **Definisi Operasional :** Proses penyusunan laporan pengelolaan barang yang meliputi dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan laporan rekonsiliasi barang pada perangkat daerah. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerag pada perangkat daerah	LRA, Laporan Fungsional, BKU, SIM Aset	Sekretaris Dinas Pertanian
		Terlaksananya peningkatan kompetensi aparatus sipil negara		**Konsep :** Kegiatan dan proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ASN agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, adaptif terhadap perubahan, dan memberikan pelayanan publik yang terbaik. **Definisi Operasional :** kondisi di mana ASN telah berhasil mengikuti dan/atau menyelesaikan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku yang dibutuhkan sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan/atau kebutuhan tugas, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan profesional. Ini diukur melalui hasil evaluasi, pencapaian standar kompetensi yang ditetapkan, dan dampak pada kinerja ASN dalam memberikan pelayanan publik yang prima. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti pendidikan	DUK ASN	Sekretaris Dinas Pertanian

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				dan pelatihan		
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan pelayanan perkantoran yang layak pakai		**Konsep :** Peralatan dan perlengkapan pelayanan kantor yang sesuai dengan kebutuhan, pengadaan sesuai anggaran, pmeliharaan rutin, penataan yang optional dan pemanfaatan teknologi baru untuk menunjang efektifitas dan efisiensi kerja, meningkatkan kualitas hasil kerja, menghemat waktu dan biaya serta memastikan kenyamanan dan keselamatan kerja bagi pegawai. **Definisi Operasional :** Tersedianya peralatan dan perlengkapan pelayanan perkantoran yang layak pakai di mana semua peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas pelayanan tersedia, berfungsi baik, tidak rusak, dan dapat dioperasikan secara optimal untuk mendukung kelancaran pekerjaan, yang dibuktikan dengan keberadaan daftar inventaris yang lengkap dan pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	SIM Aset	Sekretaris Dinas Pertanian
		Tersedianya barang milik daerah pada perangkat daerah yang layak pakai		**Konsep :** Proses pengelolaan yang efektif dan efisien barang milik daerah untuk memastikan semua aset dalam kondisi optimal dan siap digunakan sesuai fungsinya untuk mendukung jalannya pemerintahan daerah dan pelayanan publik **Definisi Operasional :** Suatu kondisi barang milik daerah (BMD) yang ada di perangkat daerah memenuhi standar kriteria kelayakan fungsi dan kondisi optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien **Formulasi Perhitungan :** Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan	SIM Aset	Sekretaris Dinas Pertanian
		Tersedianya jasa pelayanan perkantoran yang memadai		**Konsep :** Fungsi administrasi dan operasional kantor berjalan dengan baik, efisien, dan efektif, sehingga menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi harapan pengguna, melalui penyediaan sumber daya manusia yang kompeten, penerapan teknologi yang tepat, serta prosedur yang jelas dan terukur, demi menciptakan kepuasan dan citra positif perangkat daerah. **Definisi Operasional :**		Sekretaris Dinas Pertanian

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Tersedia sumber daya manusia, fasilitas, dan proses yang mendukung pelayanan perkantoran berkualitas tinggi, efektif, cepat, dan mudah diakses, sehingga mampu memenuhi harapan pengguna layanan serta meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Ini mencakup layanan administratif, dukungan teknologi, dan lingkungan kerja yang baik untuk mencapai kepuasan masyarakat. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan perkantoran yang memadai		
		Terlaksananya perawatan barang milik daerah pada perangkat daerah yang layak pakai		**Konsep :** Pengelolaan barang milik daerah untuk menjaga dan mengembalikan kondisi barang sehingga tetap berfungsi optimal dan peraturan yang berlaku, demi mendukung kinerja pemerintahan dan pelayanan publik **Definisi Operasional :** Suatu kondisi terukur di mana sebagian besar barang milik daerah (BMD) yang digunakan oleh perangkat daerah dapat berfungsi sebagaimana mestinya, tidak rusak, dan berada dalam kondisi terawat dengan baik, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut. Kondisi ini diukur dari frekuensi kerusakan barang, biaya perawatan yang efektif, dan ketersediaan barang sesuai standar kelayakan pakai. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah barang milik daerah yang dilakukan perawatan	SIM Aset	Sekretaris Dinas Pertanian

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : JF Perencana Ahli Muda
Tugas : Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
Fungsi :
1. Memformulasikan sajian untuk analisis;
2. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
3. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
4. Menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
5. Menguji alternatif kriteria dan model;
6.Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
7.Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
8.Penyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
9.Menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
10.Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
11.Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif;
12.Mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggara, evaluasi kinerja dan data kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan substansi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	**Konsep :** Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun **Definisi Operasional :** proses sistematis yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan dokumen tertulis yang memuat rencana strategis (jangka panjang) dan/atau rencana kerja (jangka pendek) untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan perangkat daerah tersebut. Proses ini melibatkan penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk indikator kinerja dan alokasi pendanaan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, IKU, IKI, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKA, RAK, DPA, DPPA, dan SOP Perencanaan, RK DAK, RK DBHCHT, Rencana Aksi RB Tematik	JF Perencana Ahli Muda
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	**Konsep :** Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia **Definisi Operasional :** Dokumen yang menyajikan informasi terukur tentang kinerja SKPD	Laporan evaluasi renja, dan Laporan Capaian Kinerja	JF Perencana Ahli Muda

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		(Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara keseluruhan, membandingkan realisasi program dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, serta menyertakan proses koordinasi dan evaluasi dalam penyusunannya **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	**Konsep :** Dokumen laporan evaluasi kinerja yang telah berhasil disusun seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berisi capaian, hambatan, dan evaluasi pelaksanaan rencana **Definisi Operasional :** Dokumen laporan hasil evaluasi kinerja yang telah disusun dan dapat diakses untuk setiap perangkat daerah yang memuat capaian kinerja dan hambatan pelaksanaan program kerja perangkat daerah tersebut. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Laporan LPPD, LKjIP, dan LKPJ	JF Perencana Ahli Muda

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Tugas : Menelaah terkait perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan keuangan dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan, memilah, mengecek, membuat konsep hasil penelaahan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk bahan pertimbangan kebijakan.
Fungsi :
1. Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban;
2. Mengajukan surat permintaan pembayaran ke BKAD berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan;
3. Mengurus surat perintah membayar uang SPM Giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang;
4. Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan;
7. Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah bahan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	**Konsep :** Pengumpulan dan analisa bahan penyusunan dokumen perencanaan **Definisi Operasional :** Melakukan rangkaian kegiatan yang relevan dalam kegiatan pengumpulan dan analisa bahan penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi koordinasi dengan bidang terkait, rekap data, analisa data, penyusunan dokumen rencana aksi, dan penyusunan SK Tim Penyusunan Dokumen perencanaan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan dokumen perencanaan yang tersedia	Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, IKU, IKI, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKA, RAK, DPA, DPPA, dan SOP Perencanaan, RK DAK, RK DBHCHT, Rencana Aksi RB Tematik	Penelaah Teknis Kebijakan
2.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah bahan penyusunan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Dokumen	**Konsep :** Pengumpulan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD **Definisi Operasional :** Melakukan rangkaian kegiatan yang relevan dengan pengumpulan bahan penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang meliputi koordinasi dengan bidang terkait, melakukan rekap, input dan analisa data capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan evaluasi renja, dan Laporan Capaian Kinerja	Penelaah Teknis Kebijakan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		**Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersedia		
3.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bahan penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	**Konsep :** Pengumpulan bahan penyusunan dokumen evaluasi kinerja **Definisi Operasional :** Melakukan kegiatan yang relevan dengan penyusunan bahan dokumen evaluasi kinerja yang meliputi koordinasi dengan bidang terkait; rekap, input dan analisa data bahan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusun dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Laporan LPPD, LKjIP, dan LKPJ	Penelaah Teknis Kebijakan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Tugas : Melaksanakan tugas dalam rangka penyusunan bahan dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan perangkat daerah.
Fungsi :
1. Menyusun rencana dan program kerja bagian anggaran keuangan Dinas Pertanian;
2. Mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran serta pelaporan keuangan Dinas Pertanian;
3. Melakukan penyusunan kebijakan bagian pelaksanaan anggaran serta pelaporan keuangan Dinas Pertanian;
4. Mengelola dokumen administrasi anggaran keuangan Dinas Pertanian;
5. Menyusun laporan kegiatan di bagian anggaran keuangan Dinas Pertanian;
6. Mengkoordinir, menyelia, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan bagian anggaran keuangan Dinas Pertanian;
7. Menjalankan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	Orang	**Konsep :** Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **Definisi Operasional :** Gaji dan tunjangan yang diterima ASN **Formulasi Pehitungan :** Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	DPA, Daftar Gaji	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
2.	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akurat	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	**Konsep :** Proses pengelolaan dan pengawasan transaksi keuangan di Perangkat Daerah yang melibatkan pembukuan pendapatan dan belanja, verifikasi dokumen, serta penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. **Definisi Operasional :** Kegiatan pemeriksaan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam memverifikasi dokumen dan bukti pendukung dan menyusun laporan keuangan yang tertata.	DPA, SPJ, SIPD	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Formulasi Pehitungan : Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		
		Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	**Konsep :** Dokumen akuntansi yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas SKPD selama satu periode pelaporan tahunan. **Definisi Operasional :** Penyajian ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh SKPD dalam satu periode pelaporan, termasuk pendapatan-LO (Laporan Operasional), beban, transfer, dan pos-pos luar biasa, untuk menilai kinerja keuangan, efisiensi, dan ketaatan pada peraturan. **Formulasi Pehitungan :** Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun sesuai pedoman.	DPA, SIPD	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
		Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokumen	**Konsep :** Ketersediaan dokumen sebagai bukti dan dasar untuk memberikan tanggapan atas temuan pemeriksaan serta dokumen untuk melaksanakan rekomendasi atau tindak lanjut yang diminta, guna memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan **Definisi Operasional :** Berdasarkan dokumen ikhtisar hasil pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan yang disusun **Formulasi Perhitungan :** Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan yang disusun.	Laporan tanggapan pemeriksaan	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
		Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan / semesteran SKPD	Laporan	**Konsep :** Laporan yang berisi kondisi keuangan pada suatu periode laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawabannya selama periode berjalan. **Definisi Operasional :** Melakukan rekonsiliasi belanja barang jasa serta rekonsiliasi aset dengan BPKAD **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD yang	Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				terselesaikan		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
Tugas : Menerima dan mengolah data keuangan yang dilengkapi hasil laporan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.
Fungsi :
1. Membantu penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
2. Membantu Penyusunan laporan keuangan;
3. Membuat daftar gaji Aparatur Sipi Negara (ASN) yang terdiri dari PNS dan PPPK;
4. Membuat daftar tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari PNS dan PPPK;
5. Mencatat, menyusun pengeluaran uang di dalam formulir daftar pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan;
6. Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban;
7. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi;
9. Membantu membuat kelengkapan SPP.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bahan penyusunan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Dokumen	**Konsep :** Penentuan komponen gaji (gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan) dan tunjangan (tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, gaji ke-13, THR) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembayaran dilakukan secara bulanan pada hari kerja pertama, dengan menggunakan sistem aplikasi yang dikoordinasikan oleh KPPN dan KPPPA. Besaran dan rinciannya disesuaikan dengan golonggan, masa kerja, pangkat, dan capaian kinerja masing-masing ASN. **Definisi Operasional :** Proses tersedianya bahan untuk menentukan, menghitung, dan membayarkan sejumlah uang sebagai balas jasa (gaji) dan tambahan kesejahteraan (tunjangan) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mencakup verifikasi data pegawai, perhitungan komponen gaji dan tunjangan, hingga pencairan dana ke rekening ASN **Formulasi Pehitungan :** Jumlah bahan penyusunan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	DPA, Daftar Gaji	Pengolah Data dan Informasi
2.	Tersedianya dokumen	Jumlah bahan penyusunan	Dokumen	**Konsep :** Ketersediaan bahan penyusunan dokumen sebagai bukti dan dasar untuk	Laporan tanggapan	Pengolah Data dan Informasi

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan		memberikan tanggapan atas temuan pemeriksaan serta bahan penyusunan dokumen untuk melaksanakan rekomendasi atau tindak lanjut yang diminta, guna memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan. **Definisi Operasional :** Melakukan kegiatan yang relevan dengan penyediaan bahan penyusunan dokumen bahan tanggapan dan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan yang disusun.	pemeriksaan	
3.	Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Tersedianya bahan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Laporan	**Konsep :** Bahan penyusunan laporan yang berisi kondisi keuangan pada suatu periode laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawabannya selama periode berjalan. **Definisi Operasional :** Melakukan kegiatan yang relevan tentang penyediaan bahan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disediakan.	Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Pengolah Data dan Informasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Tugas : Menerima, mengumpulkan dan mengklasifikasikan data program anggaran dan pelaporan, serta mengkaji dan menyusun program anggaran dan pelaporan, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan.
Fungsi :
1. Menerima dan memeriksa bahan dan data program anggaran dan pelaporan, sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan program anggaran dan pelaporan;
2. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data program anggaran dan pelaporan, sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;
3. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan program anggaran dan pelaporan, sesuai prosedur dalam rangka penyusunan program anggaran dan pelaporan;
4. Menyusun konsep penyusunan program anggaran dan pelaporan, sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
5. Mendiskusikan konsep penyusunan program anggaran dan pelaporan dengan pejabat yang berwenang dan terkait, sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan program anggaran dan pelaporan;
6. Menyusun kembali program anggaran dan pelaporan, berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan program anggaran dan pelaporan;
7. Mengevaluasi proses penyusunan program anggaran dan pelaporan, sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku, sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Kegiatan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang dilakukan	Kegiatan	**Konsep :** Proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengawasan transaksi keuangan di Perangkat Daerah yang melibatkan pembukuan pendapatan dan belanja, verifikasi dokumen, serta penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. **Definisi Operasional :** Kegiatan pemeriksaan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan	DPA, SPJ, SIPD	Penelaah Teknis Kebijakan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kesesuaian dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam memverifikasi dokumen dan bukti pendukung dan menyusun laporan keuangan yang tertata. **Formulasi Pehitungan :** Jumlah kegiatan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		
2.	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah bahan penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai pedoman.	Dokumen	**Konsep :** Dokumen akuntansi sebagai bahan penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas SKPD selama satu periode pelaporan tahunan. **Definisi Operasional :** Penyajian bahan penyusunan penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas SKPD selama satu periode pelaporan tahunan., untuk menilai kinerja keuangan, efisiensi, dan ketaatan pada peraturan. **Formulasi Pehitungan :** Jumlah bahan penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai pedoman.	DPA, SIPD	Penelaah Teknis Kebijakan
3.	Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Jumlah bahan penyusunan dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokumen	**Konsep :** Ketersediaan bahan penyusunan dokumen sebagai bukti dan dasar untuk memberikan tanggapan atas temuan pemeriksaan serta bahan penyusunan dokumen untuk melaksanakan rekomendasi atau tindak lanjut yang diminta, guna memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan. **Definisi Operasional :** Melakukan kegiatan yang relevan dengan penyediaan bahan penyusunan dokumen bahan tanggapan dan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan yang disusun.	Laporan tanggapan pemeriksaan	Penelaah Teknis Kebijakan
4.	Tersedianya	Tersedianya	Laporan	**Konsep :**	Laporan	Penelaah Teknis

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	bahan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD		Bahan penyusunan laporan yang berisi kondisi keuangan pada suatu periode laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawabannya selama periode berjalan. **Definisi Operasional :** Melakukan kegiatan yang relevan tentang penyediaan bahan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disediakan.	keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Kebijakan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Subbagian Umum dan Kepegawaian
Tugas : Melaksanakan urusan persuratan, pengelolaan dokumentasi dan kearsipan, urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban, pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah, urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
Fungsi :
1. Melaksanakan urusan persuratan;
2. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
4. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
5. Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
6. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kegiatan	**Konsep :** Rangkaian kegiatan inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan BMD untuk memastikan tertib, efektif, dan optimal dalam pengelolaan asset daerah, yang menjadi dasar penyajian laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini meliputi pencatatan barang ke dalam daftar yang relevan, seperti Kartu Inventaris Barang (KIB) oleh pengguna barang, untuk menghasilkan data yang akurat mengenai	LRA, Laporan Fungsional, BKU, SIM Aset	Subbagian Umum dan Kepegawaian

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tepat Waktu dan Akurat			jumlah, kondisi, dan nilai setiap aset **Definisi Operasional :** Terwujudnya pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan yang tertib dan akurat terhadap seluruh aset daerah yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan SKPD, yang dibuktikan dengan tersedianya Kartu Inventaris Barang (KIB) yang lengkap dan terperinci, serta laporan barang milik daerah yang akuntabel dan valid sebagai dasar pengambilan keputusan dan audit keuangan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		
2.	Terlaksananya peningkatan kompetensi aparatus sipil negara	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya.	Orang	**Konsep :** Kegiatan dan proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ASN agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, adaptif terhadap perubahan, dan memberikan pelayanan publik yang terbaik. **Definisi Operasional :** kondisi di mana ASN telah berhasil mengikuti dan/atau menyelesaikan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku yang dibutuhkan sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan/atau kebutuhan tugas, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan profesional. Ini diukur melalui hasil evaluasi, pencapaian standar kompetensi yang ditetapkan, dan dampak pada kinerja ASN dalam memberikan pelayanan publik yang prima. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	DUK ASN	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	**Konsep :** Proses pemasyarakatan, pemahaman, dan internalisasi aturan hukum oleh masyarakat agar dikenal, dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.. **Definisi Operasional :** Terwujudnya kondisi di mana masyarakat telah menerima, memahami,	SIMAS, My-ASN	Subbagian Umum dan Kepegawaian

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				dan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan tertentu melalui upaya komunikasi, penyebarluasan informasi, dan kegiatan pendidikan yang terencana, sehingga tercipta peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		
		Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	**Konsep :** Proses pengadaan seragam resmi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menunjang kerapian, keseragaman, identitas ASN, dan peningkatan disiplin kerja. **Definisi Operasional :** Suatu kondisi di mana seluruh aparatur sipil negara (ASN) memiliki pakaian dinas (seperti PDU, PDH, PDL) dan kelengkapannya (seperti atribut, lencana, pangkat, dan tanda jabatan) sesuai standar dan peraturan yang berlaku, sehingga siap untuk digunakan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan menjaga kerapihan serta identitas institusi. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Data Pegawai Perangkat Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian
3.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan pelayanan perkantoran yang layak pakai	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Paket	**Konsep :** Peralatan dan perlengkapan pelayanan kantor yang sesuai dengan kebutuhan, pengadaan sesuai anggaran, pmeliharaan rutin, penataan yang optional dan pemanfaatan teknologi baru untuk menunjang efektifitas dan efisiensi kerja, meningkatkan kualitas hasil kerja, menghemat waktu dan biaya serta memastikan kenyamanan dan keselamatan kerja bagi pegawai. **Definisi Operasional :** Tersedianya peralatan dan perlengkapan pelayanan perkantoran yang layak pakai di mana semua peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas pelayanan tersedia, berfungsi baik, tidak rusak, dan dapat dioperasikan secara optimal untuk mendukung kelancaran pekerjaan, yang dibuktikan dengan keberadaan daftar inventaris yang lengkap dan pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala.	SIM Aset	Subbagian Umum dan Kepegawaian

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Formulasi Perhitungan : Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor		
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	**Konsep :** Tersedianya sarana yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional, administrasi, dan produktivitas kerja tersedia dalam jumlah, jenis, dan kualitas yang memadai, serta dikelola secara efisien untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi **Definisi Operasional :** Kondisi di mana semua alat dan bahan yang diperlukan untuk mendukung aktivitas kerja kantor telah tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai sesuai kebutuhan, dan dapat diukur dengan membandingkan jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia dengan target yang telah ditentukan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	SIM Aset	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Tersedianya bahan logistik kantor	Paket	**Konsep :** Ketersediaan sarana dan prasarana kantor secara memadai dan efisien untuk mendukung kelancaran operasional dan pekerjaan administrasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua kebutuhan kantor seperti ATK (alat tulis kantor) dan bahan habis pakai lainnya selalu tersedia tepat waktu, dalam jumlah yang sesuai, dan dengan biaya yang efektif, sehingga mendukung kualitas kinerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengadaan bahan logistik kantor (seperti alat tulis kantor, kertas, bahan bakar, makanan dan minuman) yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional organisasi secara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran, sehingga kegiatan administrasi dan operasional perkantoran dapat berjalan lancar **Formulasi Perhitungan :** Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	DPA	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Paket	**Konsep :** Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan akan barang-barang cetakan serta layanan fotokopi untuk mendukung kelancaran aktivitas administrasi dan pelayanan publik pada suatu instansi atau organisasi	DPA	Subbagian Umum dan Kepegawaian

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Definisi Operasional : Ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan layanan penggandaan (fotokopi) sesuai spesifikasi yang ditetapkan, yang mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan administrasi perkantoran **Formulasi Perhitungan :** Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen	**Konsep :** Kegiatan pengadaan dan penyediaan bahan bacaan serta teks dan produk hukum yang berlaku, untuk mendukung kebutuhan informasi dan wawasan guna pelaksanaan tugas, peningkatan efektivitas, dan kepastian hukum bagi perangkat daerah **Definisi Operasional :** Terpenuhinya jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh perangkat daerah, serta tersedianya jenis-jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersebut dalam kurun waktu tertentu, yang diukur dari jumlah dokumen dan jenis dokumen yang diadakan. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-ubdangan yang disediakan	DPA	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	**Konsep :** Terwujudnya kegiatan memberikan pelayanan dan dukungan logistik yang diperlukan, kepada tamu yang berkunjung ke perangkat daerah untuk memberikan pelayanan yang nyaman dan teratur kepada tamu, sehingga mereka merasa dihargai, dan kegiatan kunjungan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan utamanya. **Definisi Operasional :** tercapainya semua aspek dukungan dan pelayanan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan tamu yang berkunjung, seperti penyediaan logistik, pengaturan acara, hingga penyajian jamuan, yang diukur melalui ketersediaan jamuan tamu atau jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	DPA	Subbagian Umum dan Kepegawaian

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	**Konsep :** Proses fasilitasi dan penyelarasan tugas pokok dan fungsi antar unit kerja dalam suatu pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kinerja, serta memecahkan masalah secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. **Definisi Operasional :** Tercapainya pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi antar unit kerja perangkat daerah (SKPD) yang menghasilkan kesamaan persepsi, sinergi program, dan peningkatan efektivitas pelayanan publik melalui interaksi dan pertukaran informasi antara SKPD **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DPA	Subbagian Umum dan Kepegawaian
4.	Tersedianya barang milik daerah pada perangkat daerah yang layak pakai	Tersedianya kendaraan dinas operasional dan lapangan	Unit	**Konsep :** Proses pengelolaan yang efektif dan efisien barang milik daerah untuk memastikan semua aset dalam kondisi optimal dan siap digunakan sesuai fungsinya untuk mendukung jalannya pemerintahan daerah dan pelayanan publik **Definisi Operasional :** Suatu kondisi barang milik daerah (BMD) yang ada di perangkat daerah memenuhi standar kriteria kelayakan fungsi dan kondisi optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien **Formulasi Perhitungan :** Jumlah unit kendaraan dinas operasional dan lapangan yang disediakan	SIM Aset	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Tersedianya mebel		**Konsep :** Penyediaan mebel, perabot atau perlengkapan rumah tangga, seperti meja, kursi, lemari, yang dibutuhkan untuk melengkapi dan menunjang aktivitas di kantor perangkat daerah **Definisi Operasional :** Ketersediaan mebel yang melibatkan penetapan kriteria jumlah dan jenis mebel, serta kondisi mebel (misalnya, kondisi baik atau rusak) untuk digunakan perangkat daerah	SIM Aset, DPA	Subbagian Umum dan Kepegawaian

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Formulasi Perhitungan : Jumlah mebel yang disediakan		
		Tersedianya peralatan dan mesin lainnya		**Konsep :** Kondisi di mana peralatan dan mesin tersedia, berfungsi dengan baik, dan siap digunakan sesuai kebutuhan untuk mendukung kinerja perangkat daerah. Konsep ini mencakup penyediaan sarana (benda bergerak seperti mesin, komputer) dan prasarana (benda penunjang yang tidak bergerak seperti gedung) yang memadai, didukung oleh pemeliharaan yang baik, ketersediaan suku cadang, dan tenaga kerja yang kompeten untuk memastikan kelancaran operasi dan pencapaian tujuan perangkat daerah. **Definisi Operasional :** Penyediaan dan penambahan unit peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk mendukung operasional suatu instansi atau organisasi, yang diukur dengan jumlah unit peralatan dan mesin yang berhasil diadakan selama periode tertentu dan telah memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar dan target kinerja perangkat daerah. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	SIM Aset	Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran yang memadai	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengelolaan serta pengiriman informasi tertulis secara efektif antara berbagai pihak, yang mencakup penerimaan, pengelolaan, dan pengiriman surat masuk dan surat keluar dalam suatu organisasi atau instansi. Konsep ini menekankan pada penataan administrasi yang baik untuk mendukung komunikasi internal dan eksternal, menjaga ketertiban, serta memastikan surat menjadi rujukan penting dalam proses administratif. **Definisi Operasional :** Tersedianya biaya untuk jasa komunikasi tertulis (seperti perangko, materai) dan pengiriman surat antar instansi, yang dibuktikan dengan penyusunan kebutuhan belanja dan pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran untuk menunjang kelancaran komunikasi dan tugas perkantoran. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Srikandi, Agenda Surat	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Tersedianya jasa komunikasi	Unit	**Konsep :** Pemenuhan kebutuhan fasilitas dan layanan dasar listrik, air, dan	DPA	Subbagian Umum dan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		sumber daya air dan listrik		telepon secara rutin dan berkelanjutan untuk mendukung kelancaran operasional tugas pokok dan fungsi sebuah organisasi atau instansi. Konsep ini berfokus pada pembayaran rekening listrik dan air serta biaya telepon dan publikasi media untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana tersebut selalu tersedia dan dapat digunakan oleh para pegawai untuk menjalankan tugas-tugas kedinasan. **Definisi Operasional :** Kondisi tersedianya akses dan layanan yang berkelanjutan untuk komunikasi (misalnya telepon), pasokan air bersih, dan energi listrik secara memadai dalam kapasitas dan kualitas yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional perangkat daerah. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		Kepegawaian
6.	Terlaksananya perawatan barang milik daerah pada perangkat daerah yang layak pakai	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	**Konsep :** Pengelolaan anggaran dan kegiatan untuk memastikan kendaraan operasional pemerintah tetap berfungsi baik, memiliki masa pakai optimal, serta memenuhi kewajiban pajak, yang mencakup penyediaan jasa perbaikan dan perawatan, alokasi dana untuk biaya tersebut, serta pembayaran pajak tahunan kendaraan tersebut **Definisi Operasional :** Ketersediaan anggaran dan layanan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan jabatan berfungsi optimal dan ketersediaan anggaran untuk pembayaran pajak **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	SIM Aset	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau	Unit	**Konsep :** Pengelolaan anggaran dan kegiatan untuk memastikan kendaraan operasional pemerintah tetap berfungsi baik, memiliki masa pakai optimal, serta memenuhi kewajiban pajak, yang mencakup penyediaan jasa perbaikan dan perawatan, alokasi dana untuk biaya tersebut, serta pembayaran pajak tahunan kendaraan tersebut **Definisi Operasional :**	SIM Aset	Subbagian Umum dan Kepegawaian

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		lapangan		Ketersediaan anggaran dan layanan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan berfungsi optimal dan ketersediaan anggaran untuk pembayaran pajak **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		
		Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	**Konsep :** Kegiatan untuk menjaga mesin dan peralatan beroperasi secara optimal, aman, dan efisien untuk memperpanjang usia pakai serta meminimalkan gangguan operasional yang tidak terduga **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk menjaga mesin dan peralatan beroperasi secara optimal, aman, dan efisien untuk memperpanjang usia pakai serta meminimalkan gangguan operasional yang tidak terduga **Formulasi Perhitungan :** Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	SIM Aset	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		**Konsep :** terlaksananya kegiatan pemulihan, perbaikan, dan perawatan untuk menjaga, memulihkan, atau meningkatkan kondisi fisik dan fungsional gedung agar tetap laik fungsi, aman, nyaman, dan memiliki umur pakai yang optimal bagi para penggunanya. Hal ini mencakup perbaikan komponen, bahan bangunan, serta prasarana dan sarana pendukung gedung **Definisi Operasional :** Serangkaian kegiatan perbaikan dan perawatan fisik gedung, komponen, dan sarana/prasarana pendukungnya yang sudah tercakup dalam rencana kerja, dilaksanakan sesuai prosedur, dan menghasilkan kondisi gedung yang aman, nyaman, laik fungsi, serta optimal dalam mendukung kegiatan operasional untuk menjaga bangunan tetap berfungsi optimal dan memiliki umur pakai yang panjang **Formulasi Perhitungan :** Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	SIM Aset	Subbagian Umum dan Kepegawaian

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
Tugas : Menelaah terkait kebijakan barang milik daerah dan kepegawaian dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan, memilah, mengecek, membuat konsep hasil penelaahan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk bahan pertimbangan kebijakan.
Fungsi :
1. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data kepegawaian;
2. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan sifat data kepegawaian;
3. Menganalisis data kepegawaian, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk;
4. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data kepegawaian yang masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data kepegawaian yang akan diolah;
5. Mencatat perkembangan dan permasalahan data kepegawaian secara periodik, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya;
6. Mengolah dan menyajikan data kepegawaian, dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut;
7. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya.	Tersedianya data pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dokumen	**Konsep :** Tersedianya data pegawai yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, yang dikelompokkan berdasarkan jenjang, bidang, atau karakteristik tugas dan fungsi pekerjaan mereka. **Definisi Operasional :** Tersedianya data pegawai yang telah mengikuti dan/atau menyelesaikan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku yang dibutuhkan sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan/atau kebutuhan tugas, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan profesional. Ini diukur melalui hasil evaluasi, pencapaian standar kompetensi yang ditetapkan, dan dampak pada kinerja ASN dalam memberikan pelayanan publik yang prima. **Formulasi Perhitungan :** Tersedianya data pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	DUK ASN	Pengolah Data dan Informasi
2.	Terlaksananya sosialisasi	Tersedianya data orang yang	Dokumen	**Konsep :** Tersedianya data pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-	SIMAS, My-ASN	Pengolah Data dan Informasi

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	peraturan perundang-undangan	mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		undangan. **Definisi Operasional :** Tersedianya data pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan sehingga dapat mengaplikasikan peraturan perundang-undangan dan tercipta peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku. **Formulasi Perhitungan :** Tersedianya data orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		
3.	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah data pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	**Konsep :** Proses pengadaan seragam resmi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menunjang kerapian, keseragaman, identitas ASN, dan peningkatan disiplin kerja. **Definisi Operasional :** Suatu kondisi di mana seluruh aparatur sipil negara (ASN) memiliki pakaian dinas (seperti PDU, PDH, PDL) dan kelengkapannya (seperti atribut, lencana, pangkat, dan tanda jabatan) sesuai standar dan peraturan yang berlaku, sehingga siap untuk digunakan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan menjaga kerapihan serta identitas institusi. **Formulasi Perhitungan :**	Data Pegawai Perangkat Daerah	Pengolah Data dan Informasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Pranata Komputer Terampil
Tugas : Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.
Fungsi :
1. Melakukan penggandaan data;
2. Melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (local area network);
3. Melakukan pencatatan infrastruktur teknologi informasi dokumen pencatatan infrastruktu;
4. Melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi;
5. Melakukan pemeliharaan perangkat teknologi informasi end user;
6. Melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat teknologi informasi end user;
7. Melakukan perekaman data dengan pemindaian;
8. Melakukan perekaman data tanpa validasi;
9. Melakukan validasi hasil perekaman data;
10. Melakukan perekaman data dengan validasi;
11. Membuat query sederhana;
12. Melakukan konversi data;
13. Melakukan kompilasi data pengolahan;
14. Melakukan perekaman data spasial;
15. Melakukan uji coba program multimedia interaktif;
16. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kegiatan	**Konsep :** Terlaksananya rangkaian kegiatan inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan BMD untuk memastikan tertib, efektif, dan optimal dalam pengelolaan asset daerah, yang menjadi dasar penyajian laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini meliputi pencatatan barang ke dalam daftar yang relevan, seperti Kartu Inventaris Barang (KIB) oleh pengguna barang, untuk menghasilkan data yang akurat mengenai jumlah, kondisi, dan nilai setiap aset	LRA, Laporan Fungsional, BKU, SIM Aset	Pranata Komputer Terampil

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Definisi Operasional : Terlaksananya kegiatan pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan yang tertib dan akurat terhadap seluruh aset daerah yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan SKPD, yang dibuktikan dengan tersedianya **Kartu Inventaris Barang (KIB) yang lengkap dan terperinci, serta laporan barang milik daerah yang akuntabel dan valid sebagai dasar pengambilan keputusan dan audit keuangan **Formulasi Perhitungan :** Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		
2.	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah kegiatan pengadaan Paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Kegiatan	**Konsep :** Pengadaan paket komponen listrik yang dibutuhkan dan tersedia untuk penerangan di sebuah bangunan kantor agar instalasi listrik dapat beroperasi dengan baik dan memenuhi kebutuhan penerangan selama periode tertentu. **Definisi Operasional :** Proses pengadaan paket komponen listrik yang dibutuhkan dan tersedia untuk penerangan di sebuah bangunan kantor agar instalasi listrik dapat beroperasi dengan baik dan memenuhi kebutuhan penerangan selama periode tertentu. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kegiatan pengadaan paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	SIM Aset	Pranata Komputer Terampil
3.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kegiatan pengadaan paket peralatan dan perlengkapan kantor	Kegiatan	**Konsep :** Pengadaan paket peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional, administrasi, dan produktivitas kerja tersedia dalam jumlah, jenis, dan kualitas yang memadai, serta dikelola secara efisien untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi **Definisi Operasional :** Kondisi di mana pengadaan paket peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional, administrasi, dan produktivitas kerja tersedia dalam jumlah, jenis, dan kualitas yang memadai, serta dikelola secara efisien untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kegiatan pengadaan paket peralatan dan perlengkapan kantor	SIM Aset	Pranata Komputer Terampil
4.	Tersedianya barang cetakan dan	Jumlah kegiatan pengadaan	Kegiatan	**Konsep :** Pengadaan barang-barang cetakan, layanan fotokopi untuk mendukung kelancaran aktivitas administrasi dan pelayanan publik pada suatu instansi atau organisasi	DPA	Pranata Komputer Terampil

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	penggandaan	barang cetakan dan penggandaan		**Definisi Operasional :** Kegiatan pengadaan barang cetakan, layanan penggandaan (fotokopi) sesuai spesifikasi yang ditetapkan, yang mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan administrasi perkantoran **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kegiatan pengadaan barang cetakan dan penggandaan		
5.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kegiatan	**Konsep :** Kegiatan pengadaan dan penyediaan bahan bacaan serta teks dan produk hukum yang berlaku, untuk mendukung kebutuhan informasi dan wawasan guna pelaksanaan tugas, peningkatan efektivitas, dan kepastian hukum bagi perangkat daerah **Definisi Operasional :** Terpenuhinya jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh perangkat daerah, serta tersedianya jenis-jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersebut dalam kurun waktu tertentu, yang diukur dari jumlah dokumen dan jenis dokumen yang diadakan. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	DPA	Pranata Komputer Terampil
6.	Tersedianya kendaraan dinas operasional dan lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	**Konsep :** Proses pengadaan kendaraan dinas operasional dan lapangan dalam kondisi optimal dan siap digunakan sesuai fungsinya untuk mendukung jalannya pemerintahan daerah dan pelayanan publik **Definisi Operasional :** Proses pengadaan kendaraan dinas operasional dan lapangan dalam kondisi optimal dan siap digunakan sesuai fungsinya untuk mendukung jalannya pemerintahan daerah dan pelayanan publik di perangkat daerah yang memenuhi standar kriteria kelayakan fungsi dan kondisi optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien **Formulasi Perhitungan :** Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	SIM Aset, DPA	Pranata Komputer Terampil
7.	Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	**Konsep :** Kegiatan penyediaan mebel, perabot atau perlengkapan rumah tangga, seperti meja, kursi, lemari, yang dibutuhkan untuk melengkapi dan menunjang aktivitas di kantor	SIM Aset, DPA	Pranata Komputer Terampil

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Definisi Operasional : Ketersediaan mebel yang melibatkan penetapan kriteria jumlah dan jenis mebel, serta kondisi mebel (misalnya, kondisi baik atau rusak) untuk digunakan perangkat daerah **Formulasi Perhitungan :** Jumlah paket mebel yang disediakan		
8.	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	kegiatan	**Konsep :** Kegiatan pengelolaan serta pengiriman informasi tertulis secara efektif antara berbagai pihak, yang mencakup penerimaan, pengelolaan, dan pengiriman surat masuk dan surat keluar dalam suatu organisasi atau instansi. Konsep ini menekankan pada penataan administrasi yang baik untuk mendukung komunikasi internal dan eksternal, menjaga ketertiban, serta memastikan surat menjadi rujukan penting dalam proses administratif. **Definisi Operasional :** Tersedianya kegiatan penyediaan jasa untuk komunikasi tertulis (seperti perangko, materai) dan pengiriman surat antar instansi, yang dibuktikan dengan penyusunan kebutuhan belanja dan pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran untuk menunjang kelancaran komunikasi dan tugas perkantoran. **Formulasi Perhitungan :** Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Srikandi, Agenda Surat	Pranata Komputer Terampil
9.	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Unit	**Konsep :** Pemenuhan kebutuhan fasilitas dan layanan dasar listrik, air, dan telepon secara rutin dan berkelanjutan untuk mendukung kelancaran operasional tugas pokok dan fungsi sebuah organisasi atau instansi. Konsep ini berfokus pada pembayaran rekening listrik dan air serta biaya telepon dan publikasi media untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana tersebut selalu tersedia dan dapat digunakan oleh para pegawai untuk menjalankan tugas-tugas kedinasan. **Definisi Operasional :** Kondisi tersedianya akses dan layanan yang berkelanjutan untuk komunikasi (misalnya telepon), pasokan air bersih, dan energi listrik secara memadai dalam kapasitas dan kualitas yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional perangkat daerah. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	DPA	Pranata Komputer Terampil

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	**Konsep :** Kegiatan untuk memastikan kendaraan operasional pemerintah tetap berfungsi baik, memiliki masa pakai optimal, serta memenuhi kewajiban pajak, yang mencakup penyediaan jasa perbaikan dan perawatan, alokasi dana untuk biaya tersebut, serta pembayaran pajak tahunan kendaraan tersebut **Definisi Operasional :** Kegiatan layanan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan agar berfungsi optimal dan ketersediaan anggaran untuk pembayaran pajak **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	SIM Aset	Pranata Komputer Terampil
11.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas oparasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	**Konsep :** Kegiatan untuk memastikan kendaraan operasional pemerintah tetap berfungsi baik, memiliki masa pakai optimal, serta memenuhi kewajiban pajak, yang mencakup penyediaan jasa perbaikan dan perawatan, alokasi dana untuk biaya tersebut, serta pembayaran pajak tahunan kendaraan tersebut **Definisi Operasional :** Kegiatan layanan pemeliharaan kendaraan dinas operasinal agar berfungsi optimal dan ketersediaan anggaran untuk pembayaran pajak **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	SIM Aset	Pranata Komputer Terampil

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Tugas : Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya pada bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
Fungsi :
1. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib adminisrasi;
2. Mengklasifikasikan surat/berkas/dokumen yang masuk dan keluar bidang peternakan dan kesehatan hewan ke dalam file surat masuk sesuai dengan pengkodean atau tata naskah dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Mengarsipkan dokumen bidang peternakan dan kesehatan hewan ke dalam file surat masuk sesuai dengan pengkodean atau tata naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk memudahkan dalam pengendalian dokumen;
4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut	Paket	**Konsep :** Proses pengadaan seragam resmi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menunjang kerapian, keseragaman, identitas ASN, dan	Data Pegawai Perangkat Daerah	Pengadministrasi Perkantoran

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kelengkapannya	kelengkapannya		peningkatan disiplin kerja. **Definisi Operasional :** Suatu kondisi di mana seluruh aparatur sipil negara (ASN) memiliki pakaian dinas (seperti PDU, PDH, PDL) dan kelengkapannya (seperti atribut, lencana, pangkat, dan tanda jabatan) sesuai standar dan peraturan yang berlaku, sehingga siap untuk digunakan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan menjaga kerapihan serta identitas institusi. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan		
2.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	**Konsep :** Tersedianya paket peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional, administrasi, dan produktivitas kerja tersedia dalam jumlah, jenis, dan kualitas yang memadai, serta dikelola secara efisien untuk mendukung pencapaian tujuan perangkat daerah **Definisi Operasional :** Kondisi di mana paket peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung aktivitas kerja kantor telah tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai sesuai kebutuhan, dan dapat diukur dengan membandingkan jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia dengan target yang telah ditentukan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	SIM Aset	Pengadministrasi Perkantoran
3.	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	**Konsep :** Ketersediaan sarana dan prasarana kantor secara memadai dan efisien untuk mendukung kelancaran operasional dan pekerjaan administrasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua kebutuhan kantor seperti ATK (alat tulis kantor) dan bahan habis pakai lainnya selalu tersedia tepat waktu, dalam jumlah yang sesuai, dan dengan biaya yang efektif, sehingga mendukung kualitas kinerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengadaan bahan logistik kantor (seperti alat tulis kantor, kertas, bahan bakar, makanan dan minuman) yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional organisasi secara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran, sehingga kegiatan administrasi dan	DPA	Pengadministrasi Perkantoran

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				operasional perkantoran dapat berjalan lancar **Formulasi Perhitungan :** Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		
	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	**Konsep :** Terwujudnya kegiatan memberikan pelayanan dan dukungan logistik yang diperlukan, kepada tamu yang berkunjung ke perangkat daerah untuk memberikan pelayanan yang nyaman dan teratur kepada tamu, sehingga mereka merasa dihargai, dan kegiatan kunjungan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan utamanya. **Definisi Operasional :** tercapainya semua aspek dukungan dan pelayanan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan tamu yang berkunjung, seperti penyediaan logistik, pengaturan acara, hingga penyajian jamuan, yang diukur melalui ketersediaan jamuan tamu atau jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	DPA	Pengadministrasi Perkantoran
	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	**Konsep :** Proses fasilitasi dan penyelarasan tugas pokok dan fungsi antar unit kerja dalam suatu pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kinerja, serta memecahkan masalah secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. **Definisi Operasional :** Tercapainya pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi antar unit kerja perangkat daerah (SKPD) yang menghasilkan kesamaan persepsi, sinergi program, dan peningkatan efektivitas pelayanan publik melalui interaksi dan pertukaran informasi antara SKPD **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DPA	Pengadministrasi Perkantoran

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Tugas : Menerima, mencatat dan melakukan kegiatan pegadministrasian keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
Fungsi :

1. Melakukan penyiapan bahan administrasi permintaan pembayaran keuangan kegiatan sekretariat dinas, berdasarkan kesesuaian pagu anggaran melalui sistem aplikasi maupun manual sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengeluaran keuangan kegiatan sekretariat dinas, berdasarkan kesesuaian pagu anggaran melalui sistem aplikasi maupun manual sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Melaksanakan koordinasi dengan pimpinan dan PPTK sesuai ketentuan untuk memperoleh hasil permintaan pembayaran dan pengeluaran kegiatan sekretariat dinas, sehingga dapat berjalan sesuai dengan pagu anggaran dan tertib administrasi;
4. Membuat laporan pelaksanaan hasil permintaan pembayaran dan pengeluaran sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
5. Menyusun NPD (Nota Pencairan Dana) keuangan kegiatan sekretariat dinas;
6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	**Konsep :** Kondisi di mana peralatan dan mesin tersedia, berfungsi dengan baik, dan siap digunakan sesuai kebutuhan untuk mendukung kinerja perangkat daerah. Konsep ini mencakup penyediaan sarana (benda bergerak seperti mesin, komputer) dan prasarana (benda penunjang yang tidak bergerak seperti gedung) yang memadai, didukung oleh pemeliharaan yang baik, ketersediaan suku cadang, dan tenaga kerja yang kompeten untuk memastikan kelancaran operasi dan pencapaian tujuan perangkat daerah. **Definisi Operasional :** Penyediaan dan penambahan unit peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk mendukung operasional suatu instansi atau organisasi, yang diukur dengan jumlah unit peralatan dan mesin yang berhasil diadakan selama periode tertentu dan telah memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar dan target kinerja perangkat daerah. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	SIM Aset	Pengadministrasi Perkantoran
2.	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengelolaan serta pengiriman informasi tertulis secara efektif antara berbagai pihak, yang mencakup penerimaan, pengelolaan, dan pengiriman surat masuk dan surat keluar dalam suatu organisasi atau instansi. Konsep ini menekankan pada penataan administrasi yang baik untuk mendukung komunikasi internal dan eksternal, menjaga ketertiban, serta memastikan surat menjadi rujukan penting dalam proses administratif. **Definisi Operasional :** Tersedianya biaya untuk jasa komunikasi tertulis (seperti perangko, materai) dan pengiriman surat antar instansi, yang dibuktikan dengan penyusunan kebutuhan belanja dan pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran untuk menunjang kelancaran komunikasi dan tugas perkantoran. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Srikandi, Agenda Surat	Pengadministrasi Perkantoran

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	**Konsep :** Kegiatan untuk menjaga mesin dan peralatan beroperasi secara optimal, aman, dan efisien untuk memperpanjang usia pakai serta meminimalkan gangguan operasional yang tidak terduga **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk menjaga mesin dan peralatan beroperasi secara optimal, aman, dan efisien untuk memperpanjang usia pakai serta meminimalkan gangguan operasional yang tidak terduga **Formulasi Perhitungan :** Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	SIM Aset	Pengadministrasi Perkantoran
4.	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	**Konsep :** terlaksananya kegiatan pemulihan, perbaikan, dan perawatan untuk menjaga, memulihkan, atau meningkatkan kondisi fisik dan fungsional gedung agar tetap laik fungsi, aman, nyaman, dan memiliki umur pakai yang optimal bagi para penggunanya. Hal ini mencakup perbaikan komponen, bahan bangunan, serta prasarana dan sarana pendukung gedung **Definisi Operasional :** Serangkaian kegiatan perbaikan dan perawatan fisik gedung, komponen, dan sarana/prasarana pendukungnya yang sudah tercakup dalam rencana kerja, dilaksanakan sesuai prosedur, dan menghasilkan kondisi gedung yang aman, nyaman, laik fungsi, serta optimal dalam mendukung kegiatan operasional untuk menjaga bangunan tetap berfungsi optimal dan memiliki umur pakai yang panjang **Formulasi Perhitungan :** Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	SIM Aset	Pengadministrasi Perkantoran

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Pertanian
Tugas : Melaksanakan perumusan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Perlindungan Pertanian.
Fungsi :
1. Menyusun kebijakan teknis di bidang perlindungan pertanian;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintaan dan pelayanan umum di bidang perlindungan pertanian;
3. Melaksanakan perencanaan teknis penanganan bencana pertanian yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan;
4. Menyiapkan teknologi penanganan bencana pertanian;
5. Melaksanakan tugas dibidang perlindungan pertanian meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan;
6. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan pertanian;
7. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan pertanian;
8. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tertanganinya area yang terserang Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Persentase serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang tertangani	Persen	**Konsep :** Segala kegiatan atau upaya untuk mencegah dan menanggulangi serangan OPT terhadap tanaman **Definisi Operasional :** kondisi di mana populasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) telah dikendalikan ke tingkat yang tidak lagi menyebabkan kerugian ekonomi atau kerusakan signifikan pada tanaman budidaya, dibuktikan dengan berkurangnya kerusakan fisik, penurunan intensitas penyakit, dan berkurangnya persaingan gulma, serta tercapainya kondisi keseimbangan ekologis yang mendukung pertumbuhan tanaman. Ini dapat diukur melalui penurunan tingkat serangan dan keparahan gejala OPT, peningkatan hasil dan kualitas tanaman, serta keberhasilan penerapan metode Pengendalian Hama Terpadu (PHT). **Formulasi Perhitungan :** Persentase serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang tertangani = Luas area yang tertangani di bagi dengan luas area yang terserang $Persentase\ serangan\ OPT\ yang\ tertangani = \frac{luas\ area\ yang\ tertangani}{luas\ area\ yang\ terserang} x100\%$	Laporan bulanan POPT	Kepala Bidang Perlindungan Pertanian

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Terwujudnya fasilitasi penanganan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Ha	**Konsep :** Pemberdayaan petani dan komunitas pertanian melalui penyediaan informasi, sarana, dan dukungan teknis untuk mengelola OPT secara mandiri dan terpadu (PHT), yang melibatkan perencanaan, monitoring, pengambilan keputusan, dan penerapan teknik pengendalian ramah lingkungan untuk mencegah kerugian ekonomi dan dampak negatif lingkungan. Fasilitasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, serta mengembangkan kelembagaan yang mendukung penanganan OPT secara efektif dan berkelanjutan **Definisi Operasional :** Tercapainya kegiatan penyediaan dan dukungan sarana, prasarana, teknologi, dan pembinaan yang dibutuhkan petani untuk melaksanakan pengendalian OPT secara terintegrasi dan efektif, baik melalui metode pencegahan, pengendalian mekanis, biologis, maupun kimiawi, sehingga populasi OPT dapat ditekan dan kerugian ekonomi akibat OPT dapat diminimalkan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah luas area yang terfasilitasi penanganan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Laporan bulanan POPT	Kepala Bidang Perlindungan Pertanian

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda
Tugas : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
Fungsi :
1. Menyusun rencana kerja Pengamatan dan/atau peramalan dan/atau Pengendalian OPT;
2. Melakukan deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK dan agens hayati secara serologi;
3. Melakukan analisis faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK;
4. Menyusun rekomendasi hasil pengamatan/pemeriksaan/perlakuan atau cara pemusnahan media pembawa OPT/OPTK secara laboratorium;
5. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengamatan dan/atau peramalan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK;
6. Menyusun rekomendasi hasil evaluasi pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK;
7. Melakukan pengkajian metode pengamatan peramalan,pengendalian/tindakan karantina tingkat lapangan;
8. Menganalisis dan mengolah data daerah sebar OPT/OPTK;
9. Menyusun dan membuat bahan informasi kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
10. Mengikuti kegiatan temu teknis kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
11. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
12. Melaksanakan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya fasilitasi penanganan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	**Konsep :** Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang menggunakan sebuah pendekatan ekologis yang mengintegrasikan berbagai metode untuk menjaga populasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bawah ambang batas ekonomi kerugian, bukan membasminya seluruhnya. Ini melibatkan budidaya tanaman sehat, pelestarian musuh alami, pemantauan rutin, dan petani yang terampil dalam mengambil keputusan pengendalian yang bijak, dengan mempertimbangkan aspek biologi dan ekologi hama, serta penggunaan insektisida secara bertanggung jawab. **Definisi Operasional :** Kondisi di mana populasi OPT di suatu area tidak mencapai ambang batas ekonomis, sehingga tidak menyebabkan kerugian finansial yang signifikan pada tanaman dan lingkungan budidaya melalui penerapan sistem Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) yang berkelanjutan. Kondisi ini diukur melalui kegiatan surveilans yang konsisten, analisis dinamika populasi OPT, serta penerapan berbagai teknik pengendalian untuk menjaga keseimbangan ekosistem pertanian.	Laporan bulanan POPT	JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Formulasi Perhitungan : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	**Konsep :** Mencakup adaptasi (penyesuaian terhadap perubahan) dan mitigasi (pengurangan penyebab perubahan iklim), yang melibatkan pendekatan strategis, taktis, dan operasional. Tujuannya adalah mengurangi risiko kehilangan hasil panen akibat fenomena seperti kekeringan dan banjir, mengelola hama dan penyakit yang berubah, serta menumbuhkan kesadaran petani untuk menerapkan praktik pertanian ramah lingkungan **Definisi Operasional :** Suatu kondisi di mana sektor pertanian telah berhasil menerapkan strategi dan adaptasi yang efektif untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan ketahanan terhadap berbagai dampak negatif perubahan iklim, seperti perubahan pola curah hujan, kenaikan suhu, banjir, kekeringan, serta peningkatan hama dan penyakit tanaman, sehingga produksi pertanian tetap stabil dan mendukung ketahanan pangan nasional. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Laporan triwulan kegiatan	JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda
		Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	**Konsep :** Kondisi di mana upaya-upaya pencegahan kebakaran lahan telah berhasil dan dilakukan, serta penanganan kebakaran yang terjadi telah efektif dilakukan, dan semua gangguan yang mengancam usaha pertanian, hortikultura, maupun perkebunan dapat ditangani atau diminimalisir secara keseluruhan **Definisi Operasional :** Terwujudnya serangkaian tindakan dan kegiatan yang terintegrasi, seperti sosialisasi kebijakan, pembuatan sekat bakar, patroli rutin, dan pemadaman api, yang dilakukan secara aktif dan terstruktur untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan serta menanggulangi dampak kerusakan dan gangguan yang terjadi pada sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Laporan triwulan kegiatan	JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Tugas : Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya pada bidang perlindungan pertanian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
Fungsi :
1. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar bidang perlindungan pertanian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib adminisrasi;
2. Mengklasifikasikan surat/berkas/dokumen yang masuk dan keluar bidang perlindungan pertanian ke dalam file surat masuk sesuai dengan pengkodean atau tata naskah dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Mengarsipkan dokumen bidang perlindungan pertanian ke dalam file surat masuk sesuai dengan pengkodean atau tata naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk memudahkan dalam pengendalian dokumen;
4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas bidang perlindungan pertanian sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tersedianya bahan penyusunan laporan luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman yang Dikendalikan	Dokumen	**Konsep :** Tersedianya bahan penyusunan laporan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) untuk menjaga populasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang melibatkan budidaya tanaman sehat, pelestarian musuh alami, pemantauan rutin, dan petani yang terampil dalam mengambil keputusan pengendalian yang bijak, dengan mempertimbangkan aspek biologi dan ekologi hama, serta penggunaan insektisida secara bertanggung jawab. **Definisi Operasional :** Kondisi di mana tersedianya bahan penyusunan laporan populasi OPT cukup terkendali, sehingga tidak menyebabkan kerugian finansial yang signifikan pada tanaman dan lingkungan budidaya melalui penerapan sistem Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) yang berkelanjutan serta penerapan berbagai teknik pengendalian untuk menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan laporan luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman yang Dikendalikan	Laporan bulanan POPT	Pengadministrasi Perkantoran

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Tugas : Menerima, mencatat dan melakukan kegiatan pegadministrasian keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
Fungsi :
1. Melakukan penyiapan bahan administrasi permintaan pembayaran keuangan kegiatan Bidang Perlindungan Pertanian, berdasarkan kesesuaian pagu anggaran melalui sistem aplikasi maupun manual sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengeluaran keuangan kegiatan Bidang Perlindungan Pertanian, berdasarkan kesesuaian pagu anggaran melalui sistem aplikasi maupun manual sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Melaksanakan koordinasi dengan pimpinan dan PPTK sesuai ketentuan untuk memperoleh hasil permintaan pembayaran dan pengeluaran kegiatan Bidang Perlindungan Pertanian, sehingga dapat berjalan sesuai dengan pagu anggaran dan tertib administrasi.;
4. Membuat laporan pelaksanaan hasil permintaan pembayaran dan pengeluaran sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
5. Menyusun NPD (Nota Pencairan Dana) keuangan kegiatan Bidang Perlindungan Pertanian;
6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tersedianya bahan penyusunan laporan jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Dokumen	**Konsep :** Ketersediaan data dan informasi yang akurat, relevan, dan terperinci untuk menghitung dan melaporkan luasan wilayah yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan iklim, meliputi data geografis, iklim, sosial, dan ekonomi yang terstruktur dan dapat diakses untuk mendukung perencanaan dan mitigasi perubahan iklim. **Definisi Operasional :** Ketersediaan data, informasi, dan dokumen pendukung yang memadai dan dapat diakses untuk menyusun laporan kuantitatif dan kualitatif mengenai area yang mengalami dampak perubahan iklim, seperti peta kerusakan, data luasan wilayah, laporan dampak pertanian, data bencana, dan data sosial ekonomi yang relevan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan laporan jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Laporan triwulan kegiatan	Pengadministrasi Perkantoran
2.	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan	Tersedianya bahan penyusunan	Dokumen	**Konsep :** Proses pengumpulan, pemrosesan, dan penyajian data yang akurat dan terstandar mengenai luas lahan yang berhasil dilindungi, luas lahan yang terbakar, dan luas	Laporan triwulan kegiatan	Pengadministrasi Perkantoran

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	laporan jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		tanaman yang terganggu akibat bencana tersebut, sehingga pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melakukan evaluasi, merencanakan strategi, serta mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mitigasi dan penanggulangan lebih lanjut. **Definisi Operasional :** Kondisi terjaminnya data dan informasi yang akurat serta terdokumentasi dengan baik untuk mendukung proses penyusunan laporan mengenai luas lahan yang telah dan akan dilakukan tindakan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, serta dampak gangguan pada usaha tanaman. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan laporan jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Kepala Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
Tugas : Merumuskan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan di bidang produksi, dan rekomendasi perizinan pertanian
Fungsi :
1. Menyusun kebijakan teknis pengelolaan SDG tanaman dan hewan dan mikro organisme, budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan serta perizinan usaha pertanian;
2. Penyusunan kebijakan teknis peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit tanaman dan tanaman pakan ternak;
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang produksi dan perizinan usaha pertanian;
4. Melaksanakan koordinasi teknis di bidang produksi dan perizinan usaha pertanian;
5. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang produksi dan perizinan usaha pertanian;
6. Menetapkan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi pertanian;
7. Melaksanakan pembinaan dibidang produksi dan perizinan usaha pertanian
8. Merumuskan pertimbangan teknis pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha bidang pertanian
9 Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan perizinan usaha pertanian
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pemanfaatan benih unggul	Persentase petani yang menggunakan bibit unggul	Persen	**Konsep :** Ukuran statistik yang menunjukkan perbandingan jumlah petani yang mengadopsi bibit unggul dengan total jumlah petani yang ada di suatu wilayah atau komoditas tertentu **Definisi Operasional :** Angka persentase yang menunjukkan perbandingan antara jumlah petani yang menggunakan bibit unggul dalam proses penanaman mereka dengan total jumlah petani yang ada di wilayah atau populasi yang diteliti. **Formulasi Perhitungan :** $Persentase\ petani\ pengguna\ bibit\ unggul = \frac{Jumlah\ petani\ yang\ menggunakan\ bibit\ unggul}{\text{Total jumlah petani}} x\ 100\%$	Laporan Penggunaan Bibit Unggul	Kepala Bidang Produksi dan Perizinan
		Terlaksananya pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro	Dokumen	**Konsep :** Upaya untuk melestarikan, memanfaatkan secara berkelanjutan, dan membagi keuntungan dari kekayaan genetik hayati. Tujuannya adalah untuk menjaga keanekaragaman genetik sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan, terutama di bidang pangan, pertanian, dan kesehatan	Laporan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro	Kepala Bidang Produksi dan Perizinan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		**Definisi Operasional :** Pemanfaatan yang berkelanjutan dan bijaksana terhadap genetik tumbuhan untuk menjaga kelestarian dan memaksimalkan manfaatnya. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
2.	Terwujudnya fasilitasi penerbitan NIB izin usaha pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang terfasilitasi penerbitan NIB	Persen	**Konsep :** Kegiatan fasilitasi penerbitan legalitas NIB bagi pelaku usaha pertanian. **Definisi Operasional :** Perbandingan fasilitasi pelaku usaha sektor pertanian memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan pelaku usaha yang mengajukan penerbitan NIB **Formulasi Perhitungan :** $Persentase\ terbitnya\ NIB\ usaha\ pertanian = \frac{Jumlah\ NIB\ usaha\ pertanian\ yang\ terbit}{Jumlah\ pelaku\ usaha\ pertanian\ yang\ mengajukan\ NIB} x\ 100\%$	Data Pelaku Usaha Pertanian	Kepala Bidang Produksi dan Perizinan
		Terlaksananya fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	Laporan	**Konsep :** Kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian bagi pelaku usaha pertanian. **Definisi Operasional :** Jumlah fasilitasi izin usaha pertanian yang berhasil diterbitkan secara sah oleh instansi berwenang dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan jumlah total permohonan yang diajukan. **Formulasi Perhitungan :** $Persentase\ terbitnya\ izin\ usaha\ pertanian = \frac{Jumlah\ usaha\ pertanian\ yang\ terbit}{\text{Total pelaku usaha pertanian yang mengajukan izin}} x\ 100\%$	Data Pelaku Usaha Pertanian	Kepala Bidang Produksi dan Perizinan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
Tugas : Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu.
Fungsi :
1. Menganalisis dan mengevaluasi rencana pengawasan benih;
2. Melaksanakan analisis data hasil percobaan penilaian galur/ kultivar/klon harapan;
3. Membuat usulan pelepasan varietas;
4. Menyusun materi sidang pelepasan varietas;
5. Menyusun laporan akhir kegiatan pelepasan calon varieta;
6. Melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk kesehatan tanaman pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
7. Melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk kesehatan tanaman pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetative
8. Melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk kesehatan tanaman pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif
9. Melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk kesehatan tanaman pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetative
10. Membuat laporan pengujian check plot/verifikasi di lapang;
11. Merencanakan jenis alat, metode dan kebutuhan bahan untuk pengujian verifikasi varietas di laboratoris dengan analisis protein/DNA;
11. Melaksanakan pengujian virus secara serologi;
12. Melaksanakan pengujian bakteri dengan metoda agar test;
13. Verifikasi varietas di laboratorium untuk analisis isolasi DNA;
14. Verifikasi varietas di laboratorium untuk analisis DNA;
15. Melaksanakan pengujian homogenitas dan stabilitas pada pengujian tingkat kesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi;
16. Mengumpulkan dan menganalisis data pengujian tingkat kesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi;
17. Melaksanakan pembinaan terhadap produsen/pengedar benih;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	**Konsep :** Upaya untuk melestarikan, memanfaatkan secara berkelanjutan, dan membagi keuntungan dari kekayaan genetik hayati. Tujuannya adalah untuk menjaga keanekaragaman genetik sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan, terutama di bidang pangan, pertanian, dan kesehatan **Definisi Operasional :** Pemanfaatan yang berkelanjutan dan bijaksana terhadap genetik tumbuhan	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kewenangan Kabupaten/Kota			untuk menjaga kelestarian dan memaksimalkan manfaatnya. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		
		Termanfaatkannya SDG Hewan/ Tanaman	Dokumen	**Konsep :** Pemanfaatan SDG tanaman lokal dan bibit unggul untuk membantu menghasilkan tanaman pangan yang lebih tangguh terhadap hama, penyakit, dan perubahan iklim Pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara bijaksana untuk mendukung kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan **Definisi Operasional :** Jumlah pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kualitas SDG Hewan/Tanaman **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Laporan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
		Terjaminnya Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	VUB	**Konsep :** Kegiatan menjaga dan memastikan Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman tetap dalam kondisi asli (murni) seperti benih, bibit, atau jaringan tanaman) yang mengandung unit-unit pembawa sifat keturunan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi varietas unggul baru di masa mendatang. **Definisi Operasional :** Jumlah Kegiatan menjaga dan memastikan Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman tetap dalam kondisi asli (murni) seperti benih, bibit, atau jaringan tanaman) yang mengandung unit-unit pembawa sifat keturunan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi varietas unggul baru. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Varietas Unggul Baru (VUB)	Laporan SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Varietas Unggul Baru (VUB)	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
2.	Terlaksananya fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	Tersusunnya stadart pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian	Dokumen	**Konsep :** Adanya langkah-langkah yang pasti dan terstandardisasi yang harus diikuti oleh pemohon (petani/pelaku usaha) dan petugas pemberi izin, daftar dokumen dan kriteria yang jelas dan terbuka yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha pertanian, kepastian mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses izin, dari awal pengajuan hingga penerbitan informasi yang transparan dan rinci mengenai biaya atau tarif resmi yang harus dibayarkan	SOP Pemberian Izin Usaha Pertanian	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				untuk pengurusan izin tersebut serta standar kinerja yang memungkinkan masyarakat atau pemohon untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. **Definisi Operasional :** Tersedianya dokumen Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan memuat pedoman lengkap, jelas, dan terukur mengenai seluruh aspek yang terkait dengan proses pemberian izin usaha di sektor pertanian **.** **Formulasi Perhitungan :** Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		
		Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	**Konsep :** Kegiatan mengevaluasi, menentukan mengetahui tingkat kelayakan suatu rencana usaha pertanian dari berbagai sisi, seperti teknis budidaya, ekonomi, sosial, dan lingkungan apakah suatu rencana usaha pertanian memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, sebelum izin resmi diberikan, proses pemberian masukan atau rekomendasi berdasarkan keahlian teknis di bidang pertanian oleh instansi terkait **Definisi Operasional :** Mengukur sejauh mana proses evaluasi dan persetujuan teknis terhadap permohonan izin usaha di sektor pertanian telah dilakukan dan diselesaikan secara efektif. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	SOP Pemberian Izin Usaha Pertanian	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
		Terbina dan terawasinya penerapan standart dan izin usaha pertanian	Dokumen	**Konsep :** Terlaksananya pembinaan, pelatihan, konsultasi, dan sosialisasi standar, pengawasan penerapan standar perizinan usaha pertanian kepada pelaku usaha pertanian. Proses ini memastikan pelaku usaha memahami cara memperoleh perizinan dan menerapkan standar yang relevan, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) **Definisi Operasional :** Jumlah kegiatan sosialisasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan terkait standar perizinan usaha pertanian yang dilaksanakan kepada pelaku usaha pertanian terhadap kewajiban memiliki dan mengimplementasikan standart teknis serta perizinan berusaha yang	Data Pelaku Usaha Pertanian	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undang. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
Tugas : Menerima dan mengolah data bidang produksi dan perizinan usaha pertanian yang dilengkapi hasil laporan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.
Fungsi :
1. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data di bidang produksi dan perizinan usaha pertanian;
2. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan sifat data di bidang produksi dan perizinan usaha pertanian;
3. Volume kegiatan Menganalisis data produksi dan perizinan usaha pertanian, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk menghasilkan kebenaran informasi dan berdasarkan laporan yang masuk;
4. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data yang masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mengetahui volume dan jenis data bidang produksi dan perizinan usaha pertanian yang akan diolah;
5. Mencatat perkembangan dan permasalahan data bidang produksi dan perizinan usaha pertanian secara periodik, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya;
6. Mengolah dan menyajikan data bidang produksi dan perizinan usaha pertanian dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut;
7. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan, sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kegiatan	**Konsep :** Kegiatan yang diupayakan untuk melestarikan, memanfaatkan secara berkelanjutan, untuk pengelolaan dan peningkatan mutu sumber daya genetik. Tujuannya adalah untuk menjaga keanekaragaman genetik. **Definisi Operasional :** Kegiatan Pemanfaatan yang berkelanjutan dan bijaksana terhadap genetik tumbuhan untuk menjaga kelestarian dan memaksimalkan manfaatnya. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pengolah Data dan Informasi
2.	Termanfaatkannya SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kegiatan	**Konsep :** Kegiatan Pemanfaatan SDG tanaman lokal dan bibit unggul untuk membantu menghasilkan tanaman pangan yang lebih tangguh terhadap hama, penyakit, dan perubahan iklim Pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara bijaksana untuk mendukung kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan	Laporan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pengolah Data dan Informasi

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Definisi Operasional : Jumlah pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kualitas SDG Hewan/Tanaman **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		
3.	Terjaminnya Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah kegiatan pelestarian dan pemurnian Varietas Unggul Baru (VUB) SDG tanaman yang dilakukan)	Kegiatan	**Konsep :** Kegiatan menjaga dan memastikan Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman tetap dalam kondisi asli (murni) seperti benih, bibit, atau jaringan tanaman) yang mengandung unit-unit pembawa sifat keturunan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi varietas unggul baru di masa mendatang. **Definisi Operasional :** Jumlah Kegiatan menjaga dan memastikan Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman tetap dalam kondisi asli (murni) seperti benih, bibit, atau jaringan tanaman) yang mengandung unit-unit pembawa sifat keturunan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi varietas unggul baru. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kegiatan pelestarian dan pemurnian Varietas Unggul Baru (VUB) SDG tanaman yang dilakukan)	Laporan SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Varietas Unggul Baru (VUB)	Pengolah Data dan Informasi
4.	Tersusunnya stadart pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian	Tersedianya Bahan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	**Konsep :** Tersedianya bahan penyusunan Standar Pelayanan Publik yang harus diikuti oleh pemohon (petani/pelaku usaha) dan petugas pemberi izin, daftar dokumen dan kriteria yang jelas dan terbuka yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha pertanian, kepastian mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses izin, dari awal pengajuan hingga penerbitan informasi yang transparan dan rinci mengenai biaya atau tarif resmi yang harus dibayarkan untuk pengurusan izin tersebut serta standar kinerja yang memungkinkan masyarakat atau pemohon untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. **Definisi Operasional :** Tersedianya dokumen bahan penyusunan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan memuat pedoman lengkap, jelas, dan terukur mengenai seluruh aspek yang terkait dengan proses pemberian izin usaha di sektor pertanian **.**	SOP Pemberian Izin Usaha Pertanian	Pengolah Data dan Informasi

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Formulasi Perhitungan : Tersedianya Bahan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		
5.	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kegiatan	**Konsep :** Kegiatan mengevaluasi, menentukan mengetahui tingkat kelayakan suatu rencana usaha pertanian dari berbagai sisi, seperti teknis budidaya, ekonomi, sosial, dan lingkungan apakah suatu rencana usaha pertanian memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, sebelum izin resmi diberikan, proses pemberian masukan atau rekomendasi berdasarkan keahlian teknis di bidang pertanian oleh instansi terkait **Definisi Operasional :** Mengukur sejauh mana proses evaluasi dan persetujuan teknis terhadap permohonan izin usaha di sektor pertanian telah dilakukan dan diselesaikan secara efektif. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	SOP Pemberian Izin Usaha Pertanian	Pengolah Data dan Informasi
6.	Terbina dan terawasinya penerapan standart dan izin usaha pertanian	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian	Kegiatan	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pembinaan, pelatihan, konsultasi, dan sosialisasi standar, pengawasan penerapan standar perizinan usaha pertanian kepada pelaku usaha pertanian. Proses ini memastikan pelaku usaha memahami cara memperoleh perizinan dan menerapkan standar yang relevan, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) **Definisi Operasional :** Jumlah kegiatan sosialisasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan terkait standar perizinan usaha pertanian yang dilaksanakan kepada pelaku usaha pertanian terhadap kewajiban memiliki dan mengimplementasikan standart teknis serta perizinan berusaha yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undang. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian	Data Pelaku Usaha Pertanian	Pengolah Data dan Informasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis
Tugas : Menelaah dan menganalisa kegiatan analisis dan penelaahan peningkatan usaha pertanian dan agrobisnis sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasilguna.
Fungsi :
1. Mengumpulkan bahan-bahan kegiatan Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis, sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
2. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan kegiatan Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis, agar memperlancar pelaksanaan tugas;
3. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
5. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan;
6. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kegiatan	**Konsep :** Kegiatan yang diupayakan untuk melestarikan, memanfaatkan secara berkelanjutan, untuk pengelolaan dan peningkatan mutu sumber daya genetik. Tujuannya adalah untuk menjaga keanekaragaman genetik. **Definisi Operasional :** Kegiatan Pemanfaatan yang berkelanjutan dan bijaksana terhadap genetik tumbuhan untuk menjaga kelestarian dan memaksimalkan manfaatnya. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis
2.	Termanfaatkannya SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kegiatan	**Konsep :** Kegiatan Pemanfaatan SDG tanaman lokal dan bibit unggul untuk membantu menghasilkan tanaman pangan yang lebih tangguh terhadap hama, penyakit, dan perubahan iklim Pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara bijaksana untuk mendukung kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan **Definisi Operasional :** Jumlah pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kualitas SDG Hewan/Tanaman **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Laporan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Terjaminnya Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah kegiatan pelestarian dan pemurnian Varietas Unggul Baru (VUB) SDG tanaman yang dilakukan)	Kegiatan	**Konsep :** Kegiatan menjaga dan memastikan Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman tetap dalam kondisi asli (murni) seperti benih, bibit, atau jaringan tanaman) yang mengandung unit-unit pembawa sifat keturunan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi varietas unggul baru di masa mendatang. **Definisi Operasional :** Jumlah Kegiatan menjaga dan memastikan Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman tetap dalam kondisi asli (murni) seperti benih, bibit, atau jaringan tanaman) yang mengandung unit-unit pembawa sifat keturunan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi varietas unggul baru. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kegiatan pelestarian dan pemurnian Varietas Unggul Baru (VUB) SDG tanaman yang dilakukan)	Laporan SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Varietas Unggul Baru (VUB)	Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis
4.	Tersusunnya stadart pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian	Tersedianya Bahan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	**Konsep :** Tersedianya bahan penyusunan Standar Pelayanan Publik yang harus diikuti oleh pemohon (petani/pelaku usaha) dan petugas pemberi izin, daftar dokumen dan kriteria yang jelas dan terbuka yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha pertanian, kepastian mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses izin, dari awal pengajuan hingga penerbitan informasi yang transparan dan rinci mengenai biaya atau tarif resmi yang harus dibayarkan untuk pengurusan izin tersebut serta standar kinerja yang memungkinkan masyarakat atau pemohon untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. **Definisi Operasional :** Tersedianya dokumen bahan penyusunan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan memuat pedoman lengkap, jelas, dan terukur mengenai seluruh aspek yang terkait dengan proses pemberian izin usaha di sektor pertanian **.** **Formulasi Perhitungan :** Tersedianya Bahan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	SOP Pemberian Izin Usaha Pertanian	Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis
5.	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan	Jumlah kegiatan Penilaian	Kegiatan	**Konsep :** Kegiatan mengevaluasi, menentukan mengetahui tingkat kelayakan suatu rencana usaha pertanian dari berbagai sisi, seperti teknis budidaya, ekonomi,	SOP Pemberian Izin Usaha Pertanian	Analis Peningkatan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		sosial, dan lingkungan apakah suatu rencana usaha pertanian memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, sebelum izin resmi diberikan, proses pemberian masukan atau rekomendasi berdasarkan keahlian teknis di bidang pertanian oleh instansi terkait **Definisi Operasional :** Mengukur sejauh mana proses evaluasi dan persetujuan teknis terhadap permohonan izin usaha di sektor pertanian telah dilakukan dan diselesaikan secara efektif. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		Usaha Pertanian dan Agrobisnis
6.	Terbina dan terawasinya penerapan standart dan izin usaha pertanian	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian	Kegiatan	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pembinaan, pelatihan, konsultasi, dan sosialisasi standar, pengawasan penerapan standar perizinan usaha pertanian kepada pelaku usaha pertanian. Proses ini memastikan pelaku usaha memahami cara memperoleh perizinan dan menerapkan standar yang relevan, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) **Definisi Operasional :** Jumlah kegiatan sosialisasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan terkait standar perizinan usaha pertanian yang dilaksanakan kepada pelaku usaha pertanian terhadap kewajiban memiliki dan mengimplementasikan standart teknis serta perizinan berusaha yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undang. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian	Data Pelaku Usaha Pertanian	Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Pengadministrasi perkantoran
Tugas : Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya pada Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
Fungsi :
1. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib adminisrasi;
2. Mengklasifikasikan surat/berkas/dokumen yang masuk dan keluar Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian ke dalam file surat masuk sesuai dengan pengkodean atau tata naskah dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Mengarsipkan dokumen Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian ke dalam file surat masuk sesuai dengan pengkodean atau tata naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk memudahkan dalam pengendalian dokumen;
4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kegiatan	**Konsep :** Kegiatan yang diupayakan untuk melestarikan, memanfaatkan secara berkelanjutan, untuk pengelolaan dan peningkatan mutu sumber daya genetik. Tujuannya adalah untuk menjaga keanekaragaman genetik. **Definisi Operasional :** Kegiatan Pemanfaatan yang berkelanjutan dan bijaksana terhadap genetik tumbuhan untuk menjaga kelestarian dan memaksimalkan manfaatnya. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pengadministrasi perkantoran
2.	Termanfaatkannya SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kegiatan	**Konsep :** Kegiatan Pemanfaatan SDG tanaman lokal dan bibit unggul untuk membantu menghasilkan tanaman pangan yang lebih tangguh terhadap hama, penyakit, dan perubahan iklim Pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara bijaksana untuk mendukung kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan **Definisi Operasional :** Jumlah pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Laporan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pengadministrasi perkantoran

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Formulasi Perhitungan : Jumlah Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		
3.	Terjaminnya Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah kegiatan pelestarian dan pemurnian Varietas Unggul Baru (VUB) SDG tanaman yang dilakukan)	Kegiatan	**Konsep :** Kegiatan menjaga dan memastikan Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman tetap dalam kondisi asli (murni) seperti benih, bibit, atau jaringan tanaman) yang mengandung unit-unit pembawa sifat keturunan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi varietas unggul baru di masa mendatang. **Definisi Operasional :** Jumlah Kegiatan menjaga dan memastikan Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman tetap dalam kondisi asli (murni) seperti benih, bibit, atau jaringan tanaman) yang mengandung unit-unit pembawa sifat keturunan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi varietas unggul baru. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kegiatan pelestarian dan pemurnian Varietas Unggul Baru (VUB) SDG tanaman yang dilakukan)	Laporan SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Varietas Unggul Baru (VUB)	Pengadministrasi perkantoran
4.	Tersusunnya stadart pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian	Tersedianya Bahan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	**Konsep :** Tersedianya bahan penyusunan Standar Pelayanan Publik yang harus diikuti oleh pemohon (petani/pelaku usaha) dan petugas pemberi izin, daftar dokumen dan kriteria yang jelas dan terbuka yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha pertanian, kepastian mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses izin, dari awal pengajuan hingga penerbitan informasi yang transparan dan rinci mengenai biaya atau tarif resmi yang harus dibayarkan untuk pengurusan izin tersebut serta standar kinerja yang memungkinkan masyarakat atau pemohon untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. **Definisi Operasional :** Tersedianya dokumen bahan penyusunan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan memuat pedoman lengkap, jelas, dan terukur mengenai seluruh aspek yang terkait dengan proses pemberian izin usaha di sektor pertanian **.** **Formulasi Perhitungan :** Tersedianya Bahan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	SOP Pemberian Izin Usaha Pertanian	Pengadministrasi perkantoran

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kegiatan	**Konsep :** Kegiatan mengevaluasi, menentukan mengetahui tingkat kelayakan suatu rencana usaha pertanian dari berbagai sisi, seperti teknis budidaya, ekonomi, sosial, dan lingkungan apakah suatu rencana usaha pertanian memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, sebelum izin resmi diberikan, proses pemberian masukan atau rekomendasi berdasarkan keahlian teknis di bidang pertanian oleh instansi terkait **Definisi Operasional :** Mengukur sejauh mana proses evaluasi dan persetujuan teknis terhadap permohonan izin usaha di sektor pertanian telah dilakukan dan diselesaikan secara efektif. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	SOP Pemberian Izin Usaha Pertanian	Pengadministrasi perkantoran
6.	Terbina dan terawasinya penerapan standart dan izin usaha pertanian	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian	Kegiatan	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pembinaan, pelatihan, konsultasi, dan sosialisasi standar, pengawasan penerapan standar perizinan usaha pertanian kepada pelaku usaha pertanian. Proses ini memastikan pelaku usaha memahami cara memperoleh perizinan dan menerapkan standar yang relevan, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) **Definisi Operasional :** Jumlah kegiatan sosialisasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan terkait standar perizinan usaha pertanian yang dilaksanakan kepada pelaku usaha pertanian terhadap kewajiban memiliki dan mengimplementasikan standart teknis serta perizinan berusaha yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undang. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian	Data Pelaku Usaha Pertanian	Pengadministrasi perkantoran

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
Tugas : Melaksanakan perumusan, pengkoordinasian, penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang sarana dan prasarana pertanian.
Fungsi :
1. Menyusun kebijakan teknis bidang Pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian;
2. Melaksanakan koordinasi bidang Pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian;
3. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian;
4. Melaksanakan pembinaan bidang Pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana bidang pertanian;
5. Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian;
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pemenuhan sarana pertanian	Terpenuhinya kebutuhan pupuk dan alsintan dalam kondisi baik	Laporan	**Konsep :** Memastikan petani mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan dan dosis anjuran untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kebutuhan alsintan dalam kondisi baik untuk menjaga kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Ini dicapai melalui penyediaan pupuk bersubsidi dengan penggunaan sistem elektronik seperti e-RDKK untuk memantau kebutuhan, dan perbaikan sistem distribusi untuk menjamin ketersediaan pupuk di tingkat petani serta pemenuhan alsintan sesuai dengan pengajuan dari kelompok tani. **Definisi Operasional :** Petani dapat membeli jumlah pupuk bersubsidi dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, dan tersedia di penyalur resmi seperti Kios Pupuk Lengkap (KPL). Untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani serta pemenuhan alsintan sesuai dengan pengajuan dari kelompok tani. **Formulasi Perhitungan :** Laporan jumlah pupuk dan bantuan alsintan yang tersalurkan	Laporan Rekapitulasi Data Realisasi Pupuk Bersubsidi	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
2.	Meningkatnya kualitas prasarana pertanian	Tersedianya laporan pengembangan prasarana pertanian	Laporan	**Konsep :** Adanya dokumen yang merangkum dan menyampaikan informasi tentang ketersediaan dan kondisi prasarana pertanian (seperti saluran irigasi, jalan usaha tani, mesin pertanian) serta kendala, peluang, dan rencana pengembangan di masa depan. Laporan ini berfungsi sebagai alat evaluasi dan dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan infrastruktur, peningkatan akses informasi bagi petani, dan untuk memastikan prasarana mendukung seluruh siklus pertanian dari hulu ke hilir, sehingga menciptakan ekosistem pertanian yang lebih baik dan sejahtera.	Laporan prasarana pertanian	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Definisi Operasional : Tersusunnya dokumen atau laporan mengenai kondisi prasarana pertanian serta rencana pengembangan prasarana tersebut, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemantauan kemajuan di suatu wilayah **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan prasarana pertanian yang diberikan		
		Terjaganya prasarana pertanian sesuai standar	Persen	**Konsep :** Penerapan prinsip-prinsip perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana pertanian agar sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan, dapat berfungsi optimal untuk mendukung pertanian berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga ketahanan pangan nasional. **Definisi Operasional :** Kondisi terawatnya dan berfungsi optimalnya infrastruktur prasarana pertanian seperti yang ditetapkan oleh peraturan atau standar teknis yang berlaku, sehingga mendukung kelancaran proses produksi, distribusi, dan hasil pertanian. **Formulasi Perhitungan :** $Persentase\ tercukupinya\ prasarana\ pertanian = \frac{realisasi\ prasarana\ pertanian}{kebutuhan\ prasarana\ pertanian} x100\%$	Laporan prasarana pertanian	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : JF Analis Sarana dan Prasarana Pertanian Ahli Muda
Tugas : Melaksanakan analisis prasarana dan sarana pertanian yang meliputi analisis perluasan dan perlindungan lahan pertanian, analisis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian, analisis pembiayaan pertanian dan analisis pupuk dan pestisida.
Fungsi :
1. Menyusun rencana program kegiatan di bidang Analis Sarana dan Prasarana Pertanian;
2. Menganalisis hasil identifikasi data dan informasi rencana program perluasan dan perlindungan lahan;
3. Menganalisis hasil identifikasi data dan informasi rencana program pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
4. Menganalisis hasil identifikasi data dan informasi rencana program pembiayaan pertanian;
5. Menganalisis hasil identifikasi data dan informasi rencana program analisis pupuk dan pestisida;
6. Menganalisis data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis perluasan dan perlindungan lahan;
7. Menganalisis data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian
8. Menganalisis data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pembiayaan pertanian;
9. Menganalisis data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pupuk dan pestisida;
10. Menyusun bahan pembinaan teknis di bidang Analis Sarana dan Prasarana Pertanian;
11 Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Analis Sarana dan Prasarana Pertanian;
12. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terpenuhinya kebutuhan pupuk dan alsintan dalam kondisi baik	Terawasinya penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Laporan	**Konsep :** Adanya pengawasan yang efektif terhadap pemanfaatan alat dan bahan pertanian (sarana pendukung) agar tepat guna dan sesuai dengan jenis tanaman (komoditas), metode pertanian (teknologi), serta kondisi geografis dan lingkungan setempat (spesifik lokasi). **Definisi Operasional :** Pengawasan terhadap pemanfaatan alat dan bahan pendukung pertanian yang dilakukan dengan mempertimbangkan jenis tanaman, kemajuan teknologi yang digunakan, serta karakteristik geografis dan kondisi lahan setempat. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Laporan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian	JF Analis Sarana dan Prasarana Pertanian Ahli Muda
		Terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	**Konsep :** Proses pendampingan kepada petani agar mereka mampu menggunakan alat, mesin, dan teknologi pertanian (sarana pendukung) secara efektif dan optimal untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Tujuannya adalah untuk memastikan sarana pendukung tersebut tidak hanya tersedia, tetapi juga digunakan dengan benar, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi petani dan sektor pertanian secara	Laporan prasarana pertanian	JF Analis Sarana dan Prasarana Pertanian Ahli Muda

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				keseluruhan. **Definisi Operasional :** Terlaksananya proses pemberian bimbingan, pelatihan, dan pengawasan kepada petani dalam menggunakan sarana pendukung pertanian (seperti alat dan mesin pertanian/alsintan, pupuk) sesuai dengan prosedur dan anjuran teknis yang berlaku, sehingga sarana tersebut dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian		
2.	Tersedianya laporan pengembangan prasarana pertanian	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Laporan	**Konsep :** Proses kerja sama antar berbagai pihak (pemerintah, petani, dan sektor swasta) untuk menyelaraskan dan menyatukan berbagai jenis prasarana fisik, seperti saluran irigasi, jalan usaha tani, agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien demi mendukung kegiatan pertanian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani melalui perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan prasarana yang terintegrasi. **Definisi Operasional :** Terwujudnya keterpaduan antar-instansi dan pemangku kepentingan, sehingga prasarana pertanian seperti irigasi, akses jalan usaha tani, pembiayaan, dan pasokan logistik dapat berfungsi secara sinergis untuk mendukung kegiatan pertanian secara optimal. Ini berarti adanya alur kerja yang selaras, kebijakan yang terintegrasi, dan sumber daya yang terdistribusi secara merata di antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana pertanian, sehingga tidak ada tumpang tindih atau kesenjangan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Laporan prasarana pertanian	JF Analis Sarana dan Prasarana Pertanian Ahli Muda
		Tersusunnya action plan pengembangan prasarana, sarana kawasan pertanian	Laporan	**Konsep :** Identifikasi kebutuhan dan permasalahan kawasan, penyusunan strategi jangka panjang dan pendek, perumusan program kegiatan berbasis bisnis, dan penjabaran detail tindakan, tanggung jawab, waktu, serta sumber daya yang dibutuhkan, didukung oleh data karakteristik kawasan serta visi dan tujuan pengembangan pertanian yang jelas. **Definisi Operasional :** Sebuah rencana aksi yang terperinci dan tertulis, berisi langkah-langkah konkret, jadwal, penanggung jawab, dan tujuan spesifik untuk memperbaiki dan membangun prasarana	Laporan prasarana pertanian	JF Analis Sarana dan Prasarana Pertanian Ahli Muda

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				(seperti infrastruktur irigasi dan akses jalan usaha tani) dan sarana pertanian (seperti alat mesin pertanian dan ketersediaan pupuk) demi meningkatkan produktivitas dan efisiensi kawasan pertanian. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan tersusunnya action plan pengembangan prasarana, sarana kawasan pertanian		
3.	Terjaganya prasarana pertanian sesuai standar	Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya jalan usaha tani	Unit	**Konsep :** Jalan Usaha Tani (JUT) yang terbangun, terrehabilitasi, dan terpelihara untuk mendukung mobilitas, aksesibilitas, dan peningkatan produktivitas pertanian, yang diwujudkan melalui pembangunan baru, perbaikan, dan perawatan berkelanjutan demi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan desa. **Definisi Operasional :** Pembangunan jalan usaha tani adalah infrastruktur jalan usaha tani yang telah selesai dibangun untuk akses petani. Terehabilitasi adalah kegiatan memperbaiki jalan usaha tani yang sudah ada dan rusak agar dapat berfungsi kembali dengan baik. Terpeliharanya jalan usaha tani adalah kondisi jalan yang dijaga agar tetap berfungsi dengan optimal dan tidak mengalami kerusakan, melalui serangkaian kegiatan pemeliharaan rutin. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah jalan usaha tani yang terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya	Laporan prasarana pertanian	JF Analis Sarana dan Prasarana Pertanian Ahli Muda
		Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya DAM Parit	Unit	**Konsep :** Sebuah sistem pengelolaan air melalui pembangunan bendungan kecil (dam) di parit untuk menahan, menampung, dan mengatur aliran air, serta untuk meningkatkan dan mendistribusikan ketersediaan air bagi lahan pertanian. "Terbangun" merujuk pada proses awal pembangunan dam, "Rehabilitasi" adalah perbaikan jika dam mengalami kerusakan, dan "Terpelihara" adalah pemeliharaan rutin agar dam tetap berfungsi optimal dalam menyediakan air dan mencegah masalah seperti banjir, erosi, dan kekeringan, sehingga meningkatkan produktivitas pertanian. **Definisi Operasional :** Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian berupa dam parit untuk memastikan air tersedia dan dapat dimanfaatkan petani secara berkelanjutan. Konsep ini bertujuan agar dam parit yang sudah terbangun tidak rusak, tidak terbengkalai, dan tetap berfungsi optimal untuk penampungan air dan irigasi lahan pertanian, baik saat musim hujan maupun musim kemarau.	Laporan prasarana pertanian	JF Analis Sarana dan Prasarana Pertanian Ahli Muda

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Formulasi Perhitungan : Jumlah DAM Parit yang terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya		
		Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Unit	**Konsep :** Proses pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur Balai Penyuluh dan fasilitas pendukungnya di tingkat kecamatan untuk memastikan operasional yang optimal dalam mendukung kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan, atau kehutanan, serta pemberdayaan petani dan kelembagaan petani. **Definisi Operasional :** Terbangun : pembangunan fisik Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan yang belum ada sebelumnya. Pembangunan ini mencakup sarana prasarana seperti gedung balai, ruang kerja penyuluh, ruang pertemuan, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk operasional penyuluhan. Terehabilitasi : perbaikan atau pemulihan bangunan dan sarana Balai Penyuluh Pertanian yang sudah ada tetapi mengalami kerusakan atau kondisi yang tidak layak pakai. Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsinya seperti semula agar bisa digunakan secara efektif. Terpelihara : kegiatan perawatan dan pemeliharaan secara berkala terhadap Balai Penyuluh Pertanian dan sarana pendukungnya. Pemeliharaan ini mencakup kebersihan rutin, perbaikan kecil, dan memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik sehingga kondisi balai tetap baik dan siap digunakan kapan saja. Sarana Pendukung : adalah fasilitas dan peralatan yang melengkapi Balai Penyuluh Pertanian untuk mendukung kegiatan penyuluhan, seperti peralatan komputer, materi penyuluhan, dan fasilitas lainnya. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan yang terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya serta Sarana Pendukungnya	Laporan prasarana pertanian	JF Analis Sarana dan Prasarana Pertanian Ahli Muda
		Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya prasarana pertanian lainnya	Unit	**Konsep :** Pembangunan, perbaikan, dan perawatan infrastruktur pendukung pertanian seperti saluran irigasi, jalan usaha tani, dan fasilitas penunjang lainnya, sehingga petani dapat berproduksi secara efisien dan hasil pertaniannya dapat dengan mudah diakses oleh konsumen **Definisi Operasional :** Kondisi di mana prasarana tersebut baru dibangun, diperbaiki dari kondisi rusak, dan dijaga agar tetap berfungsi dan dalam kondisi baik. "Prasarana pertanian lainnya" mencakup infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi, akses jalan pertanian, sistem penyimpanan hasil panen, dan fasilitas umum lainnya yang mempermudah kegiatan pertanian dan kesejahteraan petani.	Laporan prasarana pertanian	JF Analis Sarana dan Prasarana Pertanian Ahli Muda

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Formulasi Perhitungan : Jumlah prasarana pertanian lainnya yang terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya		
		Terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Unit	**Konsep :** Upaya perbaikan dan/atau peningkatan fungsi jaringan irigasi agar dapat berfungsi optimal, serta kegiatan perawatan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian dan kinerja jaringan agar tetap baik dalam jangka panjang. Ini melibatkan partisipasi aktif petani, dukungan pemerintah, dan dilakukan secara periodik serta terprogram untuk menjamin ketersediaan air irigasi yang lancar dan efisien demi meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani. **Definisi Operasional :** Terehabilitasi adalah kegiatan perbaikan dan/atau peningkatan fungsi jaringan irigasi untuk mengembalikan atau meningkatkan pelayanan irigasi agar mampu menambah luas tanam dan/atau indeks pertanaman petani. Terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani adalah usaha menjaga dan mengamankan seluruh infrastruktur jaringan irigasi agar tetap berfungsi optimal dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan air dan pemeliharaan bangunan irigasi secara rutin untuk memperlancar pelaksanaan operasi dan menjamin kelestarian jaringan irigasi dalam jangka panjang **Formulasi Perhitungan :** Jumlah jaringan irigasi usaha tani terehabilitasi dan terpeliharanya	Laporan prasarana pertanian	JF Analis Sarana dan Prasarana Pertanian Ahli Muda
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan	Unit	**Konsep :** Tahapan penting dalam pengembangan dan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan hewan secara berkelanjutan. Ini biasanya digunakan dalam konteks program pemerintah daerah atau nasional dalam rangka memperkuat sistem kesehatan hewan **Definisi Operasional :** Terbangun apabila telah selesai dibangun secara fisik sesuai dengan standar teknis bangunan Puskeswan yang ditetapkan (misalnya oleh Kementerian Pertanian atau Dinas terkait), dan telah memiliki fasilitas dasar seperti ruang pelayanan, ruang pemeriksaan, dan sanitasi yang memadai **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Puskeswan yang terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya	Laporan prasarana pertanian	JF Analis Sarana dan Prasarana Pertanian Ahli Muda
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan	Unit	**Konsep :** Proses pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur Rumah Potong Hewan dan fasilitas pendukungnya untuk memastikan operasional yang optimal dalam mendukung kegiatan utama di Rumah Potong Hewan (RPH) meliputi pemeriksaan hewan sebelum dan	Laporan prasarana pertanian	JF Analis Sarana dan Prasarana Pertanian Ahli Muda

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		beroperasinya Rumah Potong Hewan		sesudah dipotong (ante- dan postmortem), proses penyembelihan sesuai syariat (terutama untuk tujuan kehalalan), serta penanganan karkas dan jeroan untuk memastikan daging dan organ layak konsumsi, aman, dan sehat bagi masyarakat. Selain itu, RPH juga menyediakan fasilitas untuk penampungan dan pengistirahatan hewan, menjaga kebersihan, dan mengawasi agar tidak memotong hewan betina yang masih produktif. **Definisi Operasional :** Terbangun artinya fase pembangunan fisik Rumah Potong Hewan yang sesuai dengan standar teknis dan peraturan yang berlaku, baik dari aspek konstruksi, tata letak, maupun kelengkapan fasilitas dengan ketentuan lokasi sesuai tata ruang dan perizinan, desain sesuai standar teknis (SNI RPH), tersedianya fasilitas dasar: ruang penampungan hewan, area penyembelihan, pengolahan limbah, pendingin, dsb, memenuhi syarat sanitasi dan kesejahteraan hewan (animal welfare). **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Rumah Potong Hewan yang terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Tugas : Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian di bidang sarana dan prasarana.
Fungsi :
1. Melakukan inventarisasi barang persediaan dan barang milik negara sesuai prosedur dan kode jenis barang dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang persediaan dan barang milik negara di lingkungan Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
2. Membantu menyusun laporan aset ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
4. Melakukan pemeliharaan barang persediaan dan barang milik negara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang operasional kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian;
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terawasinya penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah bahan penyusunan laporan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Dokumen	**Konsep :** Pengumpulan dan analisa bahan penyusunan laporan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi **Definisi Operasional :** Melakukan rangkaian kegiatan yang relevan dalam kegiatan pengumpulan dan analisa bahan penyusunan laporan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan laporan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Laporan Sarana pertanian	Pengadministrasi Perkantoran
2.	Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya DAM Parit	Jumlah laporan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM parit	Laporan	**Konsep :** Laporan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM parit yang tersusun **Definisi Operasional :** Melakukan rangkaian kegiatan yang relevan dalam kegiatan pengumpulan dan analisa bahan penyusunan laporan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM parit **Formulasi Perhitungan :** Laporan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Laporan prasarana pertanian	Pengadministrasi Perkantoran
3.	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara	Jumlah laporan Puskeswan	laporan	**Konsep :** Jumlah laporan Puskeswan yang terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasi	Laporan prasarana pertanian	Pengadministrasi Perkantoran

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan beroperasinya Puskeswan	yang terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya		**Definisi Operasional :** Melakukan rangkaian kegiatan yang relevan dalam kegiatan pengumpulan dan analisa bahan penyusunan laporan laporan Puskeswan yang terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasi **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan Puskeswan yang terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Tugas : Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya pada bidang sarana dan prasarana pertanian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
Fungsi :
1. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar bidang sarana dan prasarana pertanian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib adminisrasi;
2. Mengklasifikasikan surat/berkas/dokumen yang masuk dan keluar bidang sarana dan prasarana pertanian ke dalam file surat masuk sesuai dengan pengkodean atau tata naskah dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Mengarsipkan dokumen bidang sarana dan prasarana pertanian ke dalam file surat masuk sesuai dengan pengkodean atau tata naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk memudahkan dalam pengendalian dokumen;
4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana pertanian sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah bahan penyusunan laporan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	**Konsep :** Pengumpulan dan analisa bahan penyusunan laporan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian **Definisi Operasional :** Melakukan rangkaian kegiatan yang relevan dalam kegiatan pengumpulan dan analisa bahan penyusunan laporan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan laporan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan sarana pertanian	Pengadministrasi Perkantoran
2.	Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah bahan penyusunan laporan Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan yang terbangun, terehabilitasi dan	Laporan	**Konsep :** Pengumpulan dan analisa bahan penyusunan laporan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan beserta Sarana Pendukungnya **Definisi Operasional :** Melakukan rangkaian kegiatan yang relevan dalam kegiatan pengumpulan dan analisa bahan penyusunan laporan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan beserta Sarana Pendukungnya **Formulasi Perhitungan :**	Laporan prasarana pertanian	Pengadministrasi Perkantoran

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		terpeliharanya serta Sarana Pendukungnya		Jumlah bahan penyusunan laporan Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan yang terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya serta Sarana Pendukungnya		
3.	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Rumah Potong Hewan	Jumlah bahan penyusunan laporan Rumah Potong Hewan yang terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya	Laporan	**Konsep :** Pengumpulan dan analisa bahan penyusunan laporan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan beroperasinya Rumah Potong Hewan **Definisi Operasional :** Melakukan rangkaian kegiatan yang relevan dalam kegiatan pengumpulan dan analisa bahan penyusunan laporan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan laporan Rumah Potong Hewan yang terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya	Laporan prasarana pertanian	Pengadministrasi Perkantoran

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
Tugas : Menerima dan mengolah data bidang Sarana dan prasarana pertanian, yang dilengkapi hasil laporan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.
Fungsi :

1. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data di bidang Sarana dan prasarana pertanian;
2. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan sifat data di bidang Sarana dan prasarana pertanian;
3. Menganalisis data Sarana dan prasarana pertanian, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk;
4. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data yang masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mengetahui volume dan jenis data bidang Sarana dan prasarana pertanian yang akan diolah;
5. Mencatat perkembangan dan permasalahan data bidang Sarana dan prasarana pertanian secara periodik, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya;
6. Mengolah dan menyajikan data bidang Sarana dan prasarana pertanian dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut;
7. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan, sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah bahan penyusunan laporan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Laporan	**Konsep :** Pengumpulan dan analisa bahan penyusunan laporan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya. **Definisi Operasional :** Melakukan rangkaian kegiatan yang relevan dalam kegiatan pengumpulan dan analisa bahan penyusunan laporan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan laporan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Laporan prasarana pertanian	Pengolah Data dan Informasi
2.	Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya	Jumlah bahan penyusunan laporan jalan usaha tani	Unit	**Konsep :** Pengumpulan dan analisa bahan penyusunan laporan jalan usaha tani yang terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya	Laporan prasarana pertanian	Pengolah Data dan Informasi

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	jalan usaha tani	yang terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya		**Definisi Operasional :** Melakukan rangkaian kegiatan yang relevan dalam kegiatan pengumpulan dan analisa bahan penyusunan laporan jalan usaha tani yang terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan laporan jalan usaha tani yang terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya		
3.	Terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah bahan penyusunan laporan jaringan irigasi usaha tani terehabilitasi dan terpeliharanya	Unit	**Konsep :** Pengumpulan dan analisa bahan penyusunan laporan jaringan irigasi usaha tani terehabilitasi dan terpeliharanya **Definisi Operasional :** Melakukan rangkaian kegiatan yang relevan dalam kegiatan pengumpulan dan analisa bahan penyusunan laporan jaringan irigasi usaha tani terehabilitasi dan terpeliharanya **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan laporan jaringan irigasi usaha tani terehabilitasi dan terpeliharanya	Laporan prasarana pertanian	Pengolah Data dan Informasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
Tugas : Menerima dan mengolah data bidang Sarana dan prasarana pertanian, yang dilengkapi hasil laporan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.
Fungsi :

1. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data di bidang Sarana dan prasarana pertanian;
2. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan sifat data di bidang Sarana dan prasarana pertanian;
3. Menganalisis data Sarana dan prasarana pertanian, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk;
4. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data yang masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mengetahui volume dan jenis data bidang Sarana dan prasarana pertanian yang akan diolah;
5. Mencatat perkembangan dan permasalahan data bidang Sarana dan prasarana pertanian secara periodik, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya;
6. Mengolah dan menyajikan data bidang Sarana dan prasarana pertanian dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut;
7. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan, sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tersusunnya action plan pengembangan prasarana, sarana kawasan pertanian	Jumlah bahan penyusunan laporan action plan pengembangan prasarana, sarana kawasan pertanian	Laporan	**Konsep :** Pengumpulan dan analisa bahan penyusunan laporan tersusunnya action plan pengembangan prasarana, sarana kawasan pertanian **Definisi Operasional :** Melakukan rangkaian kegiatan yang relevan dalam kegiatan pengumpulan dan analisa bahan penyusunan laporan tersusunnya action plan pengembangan prasarana, sarana kawasan pertanian **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan laporan action plan pengembangan prasarana, sarana kawasan pertanian	Laporan prasarana pertanian	Pengolah Data dan Informasi
2.	Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya	Jumlah bahan penyusunan laporan prasarana	Unit	**Konsep :** Pengumpulan dan analisa bahan penyusunan laporan prasarana pertanian lainnya yang terbangun, terehabilitasi dan terpelihara	Laporan prasarana pertanian	Pengolah Data dan Informasi

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	prasarana pertanian lainnya	pertanian lainnya yang terbangun, terehabilitasi dan terpelihara		**Definisi Operasional :** Melakukan rangkaian kegiatan yang relevan dalam kegiatan pengumpulan dan analisa bahan penyusunan prasarana pertanian lainnya yang terbangun, terehabilitasi dan terpelihara **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan laporan prasarana pertanian lainnya yang terbangun, terehabilitasi dan terpelihara		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tugas : Melaksanakan perumusan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Fungsi :
1. Menyusun kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan,kesehatan masyarakat veteriner, produksi ternak dan agribisnis peternakan;
2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, produksi ternak dan agribisnis peternakan;
3. Membina dan melaksanakan tugas di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, produksi ternak dan agribisnis peternakan;
4. Menyiapkan bahan penyebaran dan pengembangan ternak;
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian yang berkaitan dengan tugasnya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya populasi ternak	Persentase peningkatan populasi unggas	Persen	**Konsep :** Peningkatan populasi unggas adalah ukuran relatif yang menunjukkan laju pertumbuhan jumlah unggas (seperti ayam, bebek, dll.) dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu. **Definisi Operasional :** Ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana jumlah total unggas (seperti ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras, itik, dll.) meningkat selama periode waktu tertentu. **Formulasi Perhitungan :** $Persentase\ peningkatan\ populasi\ unggas = \frac{\text{Populasi tahun n} - \text{populasi tahun n} - 1}{\text{populasi tahun n} - 1}\ x\ 100\%$ Catatan : populasi yang dimaksud adalah ternak ruminansia	Data populasi unggas	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Persentase peningkatan populasi ternak Ruminansia	Persen	**Konsep :** Peningkatan populasi ternak ruminansia adalah ukuran relatif yang menunjukkan laju pertumbuhan jumlah ternak rumunansia (seperti domba, sapi, kambing dan kerbau) dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu. **Definisi Operasional :** Ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana ternak rumunansia (seperti domba, sapi, kambing dan kerbau) meningkat selama periode waktu tertentu. **Formulasi Perhitungan :** $Persentase\ peningkatan\ populasi\ ruminansia = \frac{\text{Populasi tahun n} - \text{populasi tahun n} - 1}{\text{populasi tahun n} - 1}\ x\ 100\%$	Data populasi ruminansia	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Catatan : populasi yang dimaksud adalah ternak ruminansia		
		Terlaksananya pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota	Laporan	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan sosialisasi penetapan standar mutu, pengawasan peredaran, pengujian kualitas, kepada masyarakat/peternak untuk memastikan produk yang beredar di pasaran aman, berkualitas, sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Definisi Operasional :** Kegiatan untuk memastikan bahwa benih/bibit ternak, tanaman pakan ternak, dan pakan yang tersedia dan beredar di wilayah tersebut memenuhi standar mutu yang ditetapkan (SNI atau Standar Mutu yang Ditetapkan) serta mematuhi peraturan peredaran yang berlaku **Formulasi Perhitungan :** - Jumlah laporan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman sekala kecil - Jumlah laporan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	Laporan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terawasinya peredaran obat hewan di tingkat pengecer	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan penjaminan mutu, khasiat, keamanan, dan legalitas obat hewan untuk melindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan lingkungan **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengawasan penjaminan mutu, khasiat, keamanan, dan legalitas obat hewan untuk melindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan lingkungan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Laporan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit	Laporan	**Konsep :** Kegiatan untuk menjamin mutu genetik dan kesehatan ternak serta ketersediaan pakan yang memadai **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan untuk memastikan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak serta hijauan pakan ternak (HPT) sesuai dengan standar mutu dan peraturan yang berlaku.	- Data Benih/bibit ternak yang beredar - Laporan pengawasan produksi benih/bibit	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/ kota		**Formulasi Perhitungan :** - Jumlah laporan benih/bibit ternak yang beredar - Jumlah laporan pengawasan produksi benih/bibit		
2.	Menurunnya kejadian kasus penyakit hewan	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	Persen	**Konsep :** Penurunan jumlah kasus penyakit hewan dalam periode waktu tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang dinyatakan dalam persen dan menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau menanggulani penyakit tersebut. **Definisi Operasional :** Jumlah penurunan kasus penyakit hewan dalam periode waktu tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang dinyatakan dalam persen dan menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau menanggulani penyakit tersebut. **Formulasi Perhitungan :** $Persentase\ penurunan\ jumlah\ kasus = \frac{\text{jumlah kasus tahun n} - \text{jumlah kasus tahun n} - 1}{\text{jumlah kasus tahun n} - 1}\ x\ 100\%$	Data jumlah kasus penyakit hewan	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tersusunnya laporan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah	Laporan	**Konsep :** Laporan yang berisi tindakan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan melalui pemantauan rutin dan pemeriksaan serta mengisolasi area yang teridentifikasi wabah untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan mengenai seluruh kegiatan terkait upaya penjaminan kesehatan hewan, serta tindakan administratif dan teknis yang dilakukan dalam rangka penutupan dan pembukaan kembali daerah yang mengalami wabah penyakit hewan menula **Formulasi Perhitungan :** - Jumlah laporan daerah terdampak penyakit hewan yang terkendali - Jumlah laporan wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	- Laporan daerah terdampak penyakit hewan yang terkendali - Laporan wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terawasinya pemasukan dan pengeluaran	Laporan	**Konsep :** Kegiatan Pemantauan terhadap pergerakan (lalu lintas) hewan dan produk hewan, baik yang masuk ke dalam wilayah kabupaten/kota tersebut maupun yang keluar dari wilayah tersebut.	- Laporan pengawasan penerapan persyaratan	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		hewan dan produk hewan daerah kabupaten/ kota		**Definisi Operasional :** Laporan tentang kegiatan pemantauan terhadap pergerakan (lalu lintas) hewan dan produk hewan, baik yang masuk ke dalam wilayah kabupaten/kota tersebut maupun yang keluar dari wilayah tersebut. **Formulasi Perhitungan :** - Jumlah laporan pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM - Jumlah laporan kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM - Laporan kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	
		Terkelolanya pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota	Laporan	**Konsep :** Laporan layanan yang berkaitan dengan kesehatan hewan di wilayah kabupaten atau kota dilakukan secara terstruktur, terencana, dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas veteriner. **Definisi Operasional :** Terlaksananya laporan layanan yang berkaitan dengan kesehatan hewan di wilayah kabupaten atau kota dilakukan secara terstruktur, terencana, dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas veteriner. **Formulasi Perhitungan :** - Jumlah laporan pelayanan jasa medik veteriner - Jumlah laporan pelayanan jasa laboratorium	- Laporan pelayanan jasa medik veteriner - Laporan pelayanan jasa laboratorium	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	-Laporan -Unit Usaha	**Konsep :** Kegiatan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner untuk melindungi kesehatan manusia dari bahaya yang berasal dari hewan dan produk hewan, serta menjamin keamanan pangan asal hewan **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner untuk melindungi kesehatan manusia dari bahaya yang berasal dari hewan dan produk hewan, serta menjamin keamanan pangan asal hewan **Formulasi Perhitungan :** - Jumlah laporan Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi - Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	- Data Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi - Data unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					penerapan persyaratan higiene sanitasi	
		Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan	Unit Usaha	**Konsep :** Kegiatan yang melibatkan pengawasan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan interaksi manusia dengan hewan telah memenuhi standar dan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan **Definisi Operasional :** Terlaksananya pengawasan kesejahteraan hewan seperti di rumah potong hewan, tempat pemeliharaan, atau unit usaha produk hewan dan memastikan hewan diperlakukan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Data unit usaha yang dibina	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.	Terbitnya rekomendasi usaha peternakan	Prosentase terbitnya rekomendasi usaha peternakan	Persen	**Konsep :** Persentase keberhasilan penerbitan rekomendasi usaha peternakan bergantung sepenuhnya pada kemampuan pemohon untuk memenuhi semua kriteria dan komitmen yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. **Definisi Operasional :** Jumlah rekomendasi usaha peternakan yang berhasil diterbitkan secara sah oleh instansi berwenang dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan jumlah total permohonan yang diajukan. **Formulasi Perhitungan :** $Persentase\ terbitnya\ rekomendas\ usaha\ peternakan = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ usaha\ peternakan\ yang\ terbit}{\text{Jumlah pelaku usaha peternakan } yang\ mengajukan\ rekomendasi} x\ 100\%$	Data Unit Usaha Peternakan	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan usaha peternakan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) usaha peternakan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar mutu, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), dan kelestarian lingkungan **Definisi Operasional :** Jumlah kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) usaha peternakan	Data Unit Usaha Peternakan	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan usaha peternakan yang dibina dan diawasi		
		Terlaksananya pengawasan pelaku usaha obat hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) pelaku usaha obat hewan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar mutu, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), dan kelestarian lingkungan **Definisi Operasional :** Jumlah kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) pelaku usaha obat hewan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pelaku usaha obat hewan yang dibina dan diawasi	Data Pelaku Usaha Obat Hewan	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Medik Veteriner Ahli Madya
Tugas : Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan.
Fungsi :
1. Mengkaji rencana kerja tingkat lapangan dalam rangka persiapan pengendalian HPH dan pengamanan produk hewan;
2. Melakukan penilaian persiapan bahan, peralatan, media dan sampel;
3. Melaksanakan vaksinasi secara suntikan;
4. Melakukan pemeriksaan klinis dan/atau Pemeriksaan ante mortem untuk tingkat kesulitan II;
5. Melaksanakan pengobatan hewan;
6. Melakukan pemeriksaan post mortem untuk tingkat kesulitan II;
7. Melakukan pemeriksaan bedah bangkai/autopsi/nekropsi untuk tingkat kesulitan II;
8. Melakukan pemeriksaan organoleptik produk hewan untuk konsumsi manusia;
9. Membuat analisis dan rekomendasi hasil pemeriksaan;
10. Menganalisa dan memberikan rekomendasi hasil pengamatan penyakit hewan;
11. Membuat bahan presentasi sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
12. Tugas lain yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota	Terawasinya mutu benih/bibit ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	Laporan	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pengawasan mutu benih atau bibit ternak, bahan pakan atau pakan atau tanaman skala kecil untuk memastikan produk yang beredar di pasaran aman, berkualitas, sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan mutu benih atau bibit ternak, bahan pakan atau pakan atau tanaman skala kecil untuk memastikan produk yang beredar di pasaran aman, berkualitas, sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan kegiatan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota	Medik Veteriner Ahli Madya
		Terawasinya peredaran bahan	Laporan	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan	Laporan pengawasan bahan	Medik Veteriner Ahli Madya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak		petani peternak. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	
2.	Terawasinya peredaran obat hewan di tingkat pengecer	Terperiksanya mutu, khasiat dan keamanan obat hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan pengawasan penjaminan mutu, khasiat, keamanan, dan legalitas obat hewan untuk me/ lindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan lingkungan **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengawasan penjaminan mutu, khasiat, keamanan, dan legalitas obat hewan untuk melindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan lingkungan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Laporan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Medik Veteriner Ahli Madya
3.	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/ kota	Terawasinya produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan untuk menjamin mutu genetik dan kesehatan ternak serta ketersediaan pakan yang memadai **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan untuk memastikan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak serta hijauan pakan ternak (HPT) sesuai dengan standar mutu dan peraturan yang berlaku. **Formulasi Perhitungan :** - Jumlah Laporan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan,	Laporan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Medik Veteriner Ahli Madya
		Terjaminnya peredaran		**Konsep :** Kegiatan pengawasan untuk memastikan benih/bibit ternak yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu tertentu (genetik, fisik, fisiologis, dan kesehatan), sehingga dapat	Data benih/bibit ternak yang beredar	Medik Veteriner Ahli Madya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		benih/bibit ternak		mendukung produktivitas ternak yang optimal dan melindungi konsumen serta petani ternak. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengawasan untuk memastikan benih/bibit ternak yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu tertentu (genetik, fisik, fisiologis, dan kesehatan), sehingga dapat mendukung produktivitas ternak yang optimal dan melindungi konsumen serta petani ternak. **Formulasi Perhitungan :** - Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar		
4.	Tersusunnya laporan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah	Tertanggulangi nya daerah terdampak wabah penyakit hewan menular	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan melalui pemantauan rutin dan pemeriksaan serta mengisolasi area yang teridentifikasi wabah untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan mengenai seluruh kegiatan terkait upaya penjaminan kesehatan hewan, serta tindakan administratif dan teknis yang dilakukan dalam rangka penutupan dan pembukaan kembali daerah yang mengalami wabah penyakit hewan menular. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali	Data daerah terdampak wabah penyakit	Medik Veteriner Ahli Madya
		Terbentuknya kader zoonoziz	Orang	**Konsep :** Kegiatan pelatihan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengendalian penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kader ini bertindak sebagai garda terdepan di tingkat komunitas, berperan sebagai kepanjangan tangan petugas kesehatan hewan untuk edukasi, deteksi dini, dan pelaporan kasus zoonosis. **Definisi Operasional :** Jumlah kader zoonosis yang dilatih dalam pengendalian penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kader ini bertindak sebagai garda terdepan di tingkat komunitas, berperan sebagai kepanjangan tangan petugas kesehatan hewan untuk edukasi, deteksi dini, dan pelaporan kasus zoonosis. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kader zoonosis	Data kader zoonosis	Medik Veteriner Ahli Madya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada hewan	Wilayah	**Konsep :** Kegiatan pemantauan sistematis untuk mendeteksi dini penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Hal ini bertujuan untuk memantau situasi penyakit, mengendalikan penyebarannya, serta mencegah masuknya penyakit baru yang dapat mengancam kesehatan hewan dan masyarakat. Pelaksanaannya melibatkan pengumpulan data, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta kerja sama antar sektor kesehatan hewan dan kesehatan manusia **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pemantauan sistematis untuk mendeteksi dini penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Hal ini bertujuan untuk memantau situasi penyakit, mengendalikan penyebarannya, serta mencegah masuknya penyakit baru yang dapat mengancam kesehatan hewan dan masyarakat. Pelaksanaannya melibatkan pengumpulan data, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta kerja sama antar sektor kesehatan hewan dan kesehatan manusia **Formulasi Perhitungan :** Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan	Data wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan	Medik Veteriner Ahli Madya
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Laporan	**Konsep :** Kegiatan untuk menurunkan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis di tingkat kabupaten/kota yang meliputi tindakan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewan, peningkatan hygiene, dan sosiaisasi penyakit hewan. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan sosialisasi penyakit hewan, vaksinasi, pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas ternak untuk pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Data wilayah/kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Medik Veteriner Ahli Madya
5.	Terawasinya pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pemantauan terhadap pergerakan (lalu lintas) hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan (HPM) baik yang masuk ke dalam wilayah kabupaten/kota tersebut maupun yang keluar dari wilayah tersebut. **Definisi Operasional :** Laporan tentang kegiatan pemantauan terhadap pergerakan (lalu lintas) hewan dan produk	Laporan pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau	Medik Veteriner Ahli Madya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kabupaten/ kota	pengeluaran HPM		hewan, baik yang masuk ke dalam wilayah kabupaten/kota tersebut maupun yang keluar dari wilayah tersebut. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	pengeluaran HPM	
		Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan peredaran produk hewan didasari pada upaya menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan (ASUH) pangan asal hewan yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini merupakan bagian integral dari sistem kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) dan bertujuan untuk melindungi konsumen dari bahaya penyakit hewan menular (zoonosis), cemaran biologis, kimia, dan fisik, serta memastikan produk yang dikonsumsi bermutu dan bergizi. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan peredaran produk hewan didasari pada upaya menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan (ASUH) pangan asal hewan yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini merupakan bagian integral dari sistem kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) dan bertujuan untuk melindungi konsumen dari bahaya penyakit hewan menular (zoonosis), cemaran biologis, kimia, dan fisik, serta memastikan produk yang dikonsumsi bermutu dan bergizi. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Medik Veteriner Ahli Madya
6.	Terkelolanya pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota	Tersedianya pelayanan jasa laboratorium	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pelayanan jasa laboratorium yang mencakup berbagai layanan diagnostik dan pengujian untuk mendukung kesehatan hewan, keamanan pangan, dan penelitian. Layanan ini meliputi pemeriksaan penyakit melalui patologi klinis, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya, serta pengujian nutrisi dan pakan ternak. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pelayanan jasa laboratorium yang mencakup berbagai layanan diagnostik dan pengujian untuk mendukung kesehatan hewan, keamanan pangan, dan penelitian. Layanan ini meliputi pemeriksaan penyakit melalui patologi klinis, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya, serta pengujian nutrisi dan pakan ternak. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pelayanan jasa laboratorium	Laporan pelayanan jasa laboratorium	Medik Veteriner Ahli Madya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Tersedianya pelayanan jasa medik veteriner	Laporan	**Konsep :** Tersedianya serangkaian layanan kesehatan hewan yang mencakup diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, dan konsultasi untuk hewan. Layanan ini meliputi tindakan klinis, patologis, laboratorium, forensik, serta tindakan terapi seperti promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan medik reproduksi. Pelayanan ini dapat dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga paramedis veteriner di berbagai fasilitas, seperti klinik hewan, rumah sakit hewan, atau puskeswan **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan layanan kesehatan hewan yang mencakup diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, dan konsultasi untuk hewan. Layanan ini meliputi tindakan klinis, patologis, laboratorium, forensik, serta tindakan terapi seperti promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan medik reproduksi. Pelayanan ini dapat dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga paramedis veteriner di berbagai fasilitas, seperti klinik hewan, rumah sakit hewan, atau puskeswan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pelayanan jasa medik veteriner	Laporan pelayanan jasa medik veteriner	Medik Veteriner Ahli Madya
7.	Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan hygiene sanitasi	Unit Usaha	**Konsep :** Kegiatan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner untuk melindungi kesehatan manusia dari bahaya yang berasal dari hewan dan produk hewan, serta menjamin keamanan pangan asal hewan **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner untuk melindungi kesehatan manusia dari bahaya yang berasal dari hewan dan produk hewan, serta menjamin keamanan pangan asal hewan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Data unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Medik Veteriner Ahli Madya
		Terlaksananya pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat	Orang	**Konsep :** Kegiatan pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan yang meliputi peningkatan keterampilan teknis, pemahaman kebijakan, serta kemampuan adaptasi terhadap ilmu dan teknologi baru. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan penting untuk memastikan petugas dapat melakukan diagnosis, penanganan penyakit, pengawasan produk hewan, dan memastikan kesejahteraan hewan sesuai standar.	Data Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan hewan yang	Medik Veteriner Ahli Madya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		veteriner, dan kesejahteraan hewan		**Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan yang meliputi peningkatan keterampilan teknis, pemahaman kebijakan, serta kemampuan adaptasi terhadap ilmu dan teknologi baru. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan penting untuk memastikan petugas dapat melakukan diagnosis, penanganan penyakit, pengawasan produk hewan, dan memastikan kesejahteraan hewan sesuai standar. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	mengikuti pengembangan kompetensi	
8.	Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan	Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Unit Usaha	**Konsep :** Kegiatan yang melibatkan pengawasan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan interaksi manusia dengan hewan telah memenuhi standar dan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan **Definisi Operasional :** Terlaksananya pengawasan kesejahteraan hewan seperti di rumah potong hewan, tempat pemeliharaan, atau unit usaha produk hewan dan memastikan hewan diperlakukan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Data unit usaha yang dibina	Medik Veteriner Ahli Madya
9.	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan usaha peternakan	Terawasinya pelaksanaan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) usaha peternakan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar mutu, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), dan kelestarian lingkungan **Definisi Operasional :** Jumlah kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) usaha peternakan. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan yang diawasi	Data Unit Usaha Peternakan	Medik Veteriner Ahli Madya
		Terawasinya pelaksanaan izin usaha	Laporan	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pengawasan proses perizinan resmi yang harus dijalani oleh pengusaha untuk mendapatkan legalitas dalam mendirikan dan mengoperasikan RPH sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin ini memastikan operasional RPH memenuhi	Data Rumah Potong Hewan	Medik Veteriner Ahli Madya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Rumah Potong Hewan		standar higienis, kesehatan hewan, dan keamanan pangan demi menghasilkan daging yang aman dikonsumsi oleh masyarakat. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan proses perizinan resmi yang harus dijalani oleh pengusaha untuk mendapatkan legalitas dalam mendirikan dan mengoperasikan RPH sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin ini memastikan operasional RPH memenuhi standar higienis, kesehatan hewan, dan keamanan pangan demi menghasilkan daging yang aman dikonsumsi oleh masyarakat. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi		
		Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktek Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner atau Pasar Hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa semua persyaratan untuk izin usaha telah dipenuhi dan dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk kegiatan pelayanan kesehatan hewan seperti Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, dan lainnya. Ini memastikan bahwa semua praktik yang dilakukan legal dan memenuhi standar, seperti memiliki izin usaha dan izin praktik dari pihak berwenang. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa semua persyaratan untuk izin usaha telah dipenuhi dan dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk kegiatan pelayanan kesehatan hewan seperti Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, dan lainnya. Ini memastikan bahwa semua praktik yang dilakukan legal dan memenuhi standar, seperti memiliki izin usaha dan izin praktik dari pihak berwenang. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktek Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner atau Pasar Hewan yang diawasi	- Data Rumah Sakit Hewan, - Data Klinik Hewan, - Data Ambulatori, - Data Praktek Dokter Hewan Mandiri/ Puskeswan Mandiri, - Data Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner - Data Pasar Hewan	Medik Veteriner Ahli Madya
10.	Terlaksananya pengawasan pelaku usaha obat hewan	Terawasinya pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) pelaku usaha obat hewan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar mutu, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), dan kelestarian lingkungan **Definisi Operasional :** Jumlah kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) pelaku usaha obat hewan	Data Pelaku Usaha Obat Hewan	Medik Veteriner Ahli Madya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Formulasi Perhitungan : Jumlah izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Medik Veteriner Ahli Muda
Tugas : Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan.
Fungsi :
1. Menyusun rencana kerja dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
2. Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan berupa pengobatan;
3. Melaksanakan pengendalian penyakit hewan melalui vaksinasi;
4. Melaksanakan pengawasan obat;
5. Melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
6. Melaksanakan KIE tentang pencegahan dan pengendalian penyakit hewan;
7. Melaksanakan surveilans untuk kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
8. Melaksanakan pengambilan sampel untuk uji klinis untuk kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
9. Melaksanakan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota	Terawasinya mutu benih/bibit ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	Laporan	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pengawasan mutu benih atau bibit ternak, bahan pakan atau pakan atau tanaman skala kecil untuk memastikan produk yang beredar di pasaran aman, berkualitas, sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan mutu benih atau bibit ternak, bahan pakan atau pakan atau tanaman skala kecil untuk memastikan produk yang beredar di pasaran aman, berkualitas, sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan kegiatan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota	Medik Veteriner Ahli Muda
		Terawasinya peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit	Laporan	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak.	Laporan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit	Medik Veteriner Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		hijauan pakan ternak		**Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	hijauan pakan ternak yang beredar	
2.	Terawasinya peredaran obat hewan di tingkat pengecer	Terperiksanya mutu, khasiat dan keamanan obat hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan pengawasan penjaminan mutu, khasiat, keamanan, dan legalitas obat hewan untuk me/ lindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan lingkungan **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengawasan penjaminan mutu, khasiat, keamanan, dan legalitas obat hewan untuk melindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan lingkungan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Laporan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Medik Veteriner Ahli Muda
3.	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/ kota	Terawasinya produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan untuk menjamin mutu genetik dan kesehatan ternak serta ketersediaan pakan yang memadai **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan untuk memastikan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak serta hijauan pakan ternak (HPT) sesuai dengan standar mutu dan peraturan yang berlaku. **Formulasi Perhitungan :** - Jumlah Laporan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan,	Laporan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Medik Veteriner Ahli Muda
		Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak		**Konsep :** Kegiatan pengawasan untuk memastikan benih/bibit ternak yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu tertentu (genetik, fisik, fisiologis, dan kesehatan), sehingga dapat mendukung produktivitas ternak yang optimal dan melindungi konsumen serta petani ternak.	Data benih/bibit ternak yang beredar	Medik Veteriner Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Definisi Operasional : Terlaksananya kegiatan pengawasan untuk memastikan benih/bibit ternak yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu tertentu (genetik, fisik, fisiologis, dan kesehatan), sehingga dapat mendukung produktivitas ternak yang optimal dan melindungi konsumen serta petani ternak. **Formulasi Perhitungan :** - Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar		
4.	Tersusunnya laporan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah	Tertanggulangi nya daerah terdampak wabah penyakit hewan menular	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan melalui pemantauan rutin dan pemeriksaan serta mengisolasi area yang teridentifikasi wabah untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan mengenai seluruh kegiatan terkait upaya penjaminan kesehatan hewan, serta tindakan administratif dan teknis yang dilakukan dalam rangka penutupan dan pembukaan kembali daerah yang mengalami wabah penyakit hewan menular. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali	Data daerah terdampak wabah penyakit	Medik Veteriner Ahli Muda
		Terbentuknya kader zoonoziz	Orang	**Konsep :** Kegiatan pelatihan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengendalian penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kader ini bertindak sebagai garda terdepan di tingkat komunitas, berperan sebagai kepanjangan tangan petugas kesehatan hewan untuk edukasi, deteksi dini, dan pelaporan kasus zoonosis. **Definisi Operasional :** Jumlah kader zoonosis yang dilatih dalam pengendalian penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kader ini bertindak sebagai garda terdepan di tingkat komunitas, berperan sebagai kepanjangan tangan petugas kesehatan hewan untuk edukasi, deteksi dini, dan pelaporan kasus zoonosis. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kader zoonosis	Data kader zoonosis	Medik Veteriner Ahli Muda
		Terlaksananya surveilans penyakit hewan	Wilayah	**Konsep :** Kegiatan pemantauan sistematis untuk mendeteksi dini penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Hal ini bertujuan untuk memantau situasi penyakit, mengendalikan penyebarannya, serta mencegah masuknya penyakit baru yang dapat mengancam	Data wilayah yang dilakukan surveilans dan	Medik Veteriner Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dan zoonosis pada hewan		kesehatan hewan dan masyarakat. Pelaksanaannya melibatkan pengumpulan data, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta kerja sama antar sektor kesehatan hewan dan kesehatan manusia **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pemantauan sistematis untuk mendeteksi dini penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Hal ini bertujuan untuk memantau situasi penyakit, mengendalikan penyebarannya, serta mencegah masuknya penyakit baru yang dapat mengancam kesehatan hewan dan masyarakat. Pelaksanaannya melibatkan pengumpulan data, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta kerja sama antar sektor kesehatan hewan dan kesehatan manusia **Formulasi Perhitungan :** Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan	zoonosis pada hewan	
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Laporan	**Konsep :** Kegiatan untuk menurunkan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis di tingkat kabupaten/kota yang meliputi tindakan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewan, peningkatan hygiene, dan sosiaisasi penyakit hewan. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan sosialisasi penyakit hewan, vaksinasi, pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas ternak untuk pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Data wilayah/kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Medik Veteriner Ahli Muda
5.	Terawasinya pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/ kota	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pemantauan terhadap pergerakan (lalu lintas) hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan (HPM) baik yang masuk ke dalam wilayah kabupaten/kota tersebut maupun yang keluar dari wilayah tersebut. **Definisi Operasional :** Laporan tentang kegiatan pemantauan terhadap pergerakan (lalu lintas) hewan dan produk hewan, baik yang masuk ke dalam wilayah kabupaten/kota tersebut maupun yang keluar dari wilayah tersebut.	Laporan pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Medik Veteriner Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM		
		Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan peredaran produk hewan didasari pada upaya menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan (ASUH) pangan asal hewan yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini merupakan bagian integral dari sistem kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) dan bertujuan untuk melindungi konsumen dari bahaya penyakit hewan menular (zoonosis), cemaran biologis, kimia, dan fisik, serta memastikan produk yang dikonsumsi bermutu dan bergizi. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan peredaran produk hewan didasari pada upaya menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan (ASUH) pangan asal hewan yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini merupakan bagian integral dari sistem kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) dan bertujuan untuk melindungi konsumen dari bahaya penyakit hewan menular (zoonosis), cemaran biologis, kimia, dan fisik, serta memastikan produk yang dikonsumsi bermutu dan bergizi. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Medik Veteriner Ahli Muda
6.	Terkelolanya pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota	Tersedianya pelayanan jasa laboratorium	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pelayanan jasa laboratorium yang mencakup berbagai layanan diagnostik dan pengujian untuk mendukung kesehatan hewan, keamanan pangan, dan penelitian. Layanan ini meliputi pemeriksaan penyakit melalui patologi klinis, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya, serta pengujian nutrisi dan pakan ternak. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pelayanan jasa laboratorium yang mencakup berbagai layanan diagnostik dan pengujian untuk mendukung kesehatan hewan, keamanan pangan, dan penelitian. Layanan ini meliputi pemeriksaan penyakit melalui patologi klinis, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya, serta pengujian nutrisi dan pakan ternak. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pelayanan jasa laboratorium	Laporan pelayanan jasa laboratorium	Medik Veteriner Ahli Muda
		Tersedianya pelayanan jasa medik veteriner	Laporan	**Konsep :** Tersedianya serangkaian layanan kesehatan hewan yang mencakup diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, dan konsultasi untuk hewan. Layanan ini meliputi tindakan klinis,	Laporan pelayanan jasa medik veteriner	Medik Veteriner Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				patologis, laboratorium, forensik, serta tindakan terapi seperti promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan medik reproduksi. Pelayanan ini dapat dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga paramedis veteriner di berbagai fasilitas, seperti klinik hewan, rumah sakit hewan, atau puskeswan **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan layanan kesehatan hewan yang mencakup diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, dan konsultasi untuk hewan. Layanan ini meliputi tindakan klinis, patologis, laboratorium, forensik, serta tindakan terapi seperti promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan medik reproduksi. Pelayanan ini dapat dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga paramedis veteriner di berbagai fasilitas, seperti klinik hewan, rumah sakit hewan, atau puskeswan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pelayanan jasa medik veteriner		
7.	Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan hygiene sanitasi	Unit Usaha	**Konsep :** Kegiatan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner untuk melindungi kesehatan manusia dari bahaya yang berasal dari hewan dan produk hewan, serta menjamin keamanan pangan asal hewan **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner untuk melindungi kesehatan manusia dari bahaya yang berasal dari hewan dan produk hewan, serta menjamin keamanan pangan asal hewan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Data unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Medik Veteriner Ahli Muda
		Terlaksananya pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan	Orang	**Konsep :** Kegiatan pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan yang meliputi peningkatan keterampilan teknis, pemahaman kebijakan, serta kemampuan adaptasi terhadap ilmu dan teknologi baru. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan penting untuk memastikan petugas dapat melakukan diagnosis, penanganan penyakit, pengawasan produk hewan, dan memastikan kesejahteraan hewan sesuai standar. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan yang meliputi peningkatan	Data Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Medik Veteriner Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				keterampilan teknis, pemahaman kebijakan, serta kemampuan adaptasi terhadap ilmu dan teknologi baru. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan penting untuk memastikan petugas dapat melakukan diagnosis, penanganan penyakit, pengawasan produk hewan, dan memastikan kesejahteraan hewan sesuai standar. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi		
8.	Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan	Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Unit Usaha	**Konsep :** Kegiatan yang melibatkan pengawasan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan interaksi manusia dengan hewan telah memenuhi standar dan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan **Definisi Operasional :** Terlaksananya pengawasan kesejahteraan hewan seperti di rumah potong hewan, tempat pemeliharaan, atau unit usaha produk hewan dan memastikan hewan diperlakukan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Data unit usaha yang dibina	Medik Veteriner Ahli Muda
9.	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan usaha peternakan	Terawasinya pelaksanaan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) usaha peternakan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar mutu, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), dan kelestarian lingkungan **Definisi Operasional :** Jumlah kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) usaha peternakan. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan yang diawasi	Data Unit Usaha Peternakan	Medik Veteriner Ahli Muda
		Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Potong Hewan	Laporan	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pengawasan proses perizinan resmi yang harus dijalani oleh pengusaha untuk mendapatkan legalitas dalam mendirikan dan mengoperasikan RPH sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin ini memastikan operasional RPH memenuhi standar higienis, kesehatan hewan, dan keamanan pangan demi menghasilkan daging yang aman dikonsumsi oleh masyarakat.	Data Rumah Potong Hewan	Medik Veteriner Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Definisi Operasional : Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan proses perizinan resmi yang harus dijalani oleh pengusaha untuk mendapatkan legalitas dalam mendirikan dan mengoperasikan RPH sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin ini memastikan operasional RPH memenuhi standar higienis, kesehatan hewan, dan keamanan pangan demi menghasilkan daging yang aman dikonsumsi oleh masyarakat. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi		
		Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktek Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner atau Pasar Hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa semua persyaratan untuk izin usaha telah dipenuhi dan dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk kegiatan pelayanan kesehatan hewan seperti Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, dan lainnya. Ini memastikan bahwa semua praktik yang dilakukan legal dan memenuhi standar, seperti memiliki izin usaha dan izin praktik dari pihak berwenang. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa semua persyaratan untuk izin usaha telah dipenuhi dan dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk kegiatan pelayanan kesehatan hewan seperti Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, dan lainnya. Ini memastikan bahwa semua praktik yang dilakukan legal dan memenuhi standar, seperti memiliki izin usaha dan izin praktik dari pihak berwenang. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktek Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner atau Pasar Hewan yang diawasi	- Data Rumah Sakit Hewan, - Data Klinik Hewan, - Data Ambulatori, - Data Praktek Dokter Hewan Mandiri/ Puskeswan Mandiri, - Data Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner - Data Pasar Hewan	Medik Veteriner Ahli Muda
10.	Terlaksananya pengawasan pelaku usaha obat hewan	Terawasinya pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) pelaku usaha obat hewan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar mutu, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), dan kelestarian lingkungan **Definisi Operasional :** Jumlah kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) pelaku usaha obat hewan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi	Data Pelaku Usaha Obat Hewan	Medik Veteriner Ahli Muda

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Medik Veteriner Ahli Pertama
Tugas : Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan.
Fungsi :
1. Menyusun kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
2. Melaksanakan Pelayanan kesehatan hewan;
3. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
4. Melaksanakan pengawasan obat hewan;
5. Melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
6. Melaksanakan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
7. Melaksanakan untuk surveillance kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
8. Melaksanakan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota	Terawasinya mutu benih/bibit ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	Laporan	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pengawasan mutu benih atau bibit ternak, bahan pakan atau pakan atau tanaman skala kecil untuk memastikan produk yang beredar di pasaran aman, berkualitas, sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan mutu benih atau bibit ternak, bahan pakan atau pakan atau tanaman skala kecil untuk memastikan produk yang beredar di pasaran aman, berkualitas, sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan kegiatan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota	Medik Veteriner Ahli Pertama
		Terawasinya peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak	Laporan	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi	Laporan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan	Medik Veteriner Ahli Pertama

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kebutuhan petani peternak. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	ternak yang beredar	
2.	Terawasinya peredaran obat hewan di tingkat pengecer	Terperiksanya mutu, khasiat dan keamanan obat hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan pengawasan penjaminan mutu, khasiat, keamanan, dan legalitas obat hewan untuk me/ lindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan lingkungan **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengawasan penjaminan mutu, khasiat, keamanan, dan legalitas obat hewan untuk melindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan lingkungan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Laporan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Medik Veteriner Ahli Pertama
3.	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/ kota	Terawasinya produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan untuk menjamin mutu genetik dan kesehatan ternak serta ketersediaan pakan yang memadai **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan untuk memastikan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak serta hijauan pakan ternak (HPT) sesuai dengan standar mutu dan peraturan yang berlaku. **Formulasi Perhitungan :** - Jumlah Laporan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan,	Laporan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Medik Veteriner Ahli Pertama
		Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak		**Konsep :** Kegiatan pengawasan untuk memastikan benih/bibit ternak yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu tertentu (genetik, fisik, fisiologis, dan kesehatan), sehingga dapat mendukung produktivitas ternak yang optimal dan melindungi konsumen serta petani ternak. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengawasan untuk memastikan benih/bibit ternak yang beredar di	Data benih/bibit ternak yang beredar	Medik Veteriner Ahli Pertama

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				masyarakat memenuhi standar mutu tertentu (genetik, fisik, fisiologis, dan kesehatan), sehingga dapat mendukung produktivitas ternak yang optimal dan melindungi konsumen serta petani ternak. **Formulasi Perhitungan :** - Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar		
4.	Tersusunnya laporan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah	Tertanggulangi nya daerah terdampak wabah penyakit hewan menular	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan melalui pemantauan rutin dan pemeriksaan serta mengisolasi area yang teridentifikasi wabah untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan mengenai seluruh kegiatan terkait upaya penjaminan kesehatan hewan, serta tindakan administratif dan teknis yang dilakukan dalam rangka penutupan dan pembukaan kembali daerah yang mengalami wabah penyakit hewan menular. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali	Data daerah terdampak wabah penyakit	Medik Veteriner Ahli Pertama
		Terbentuknya kader zoonoziz	Orang	**Konsep :** Kegiatan pelatihan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengendalian penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kader ini bertindak sebagai garda terdepan di tingkat komunitas, berperan sebagai kepanjangan tangan petugas kesehatan hewan untuk edukasi, deteksi dini, dan pelaporan kasus zoonosis. **Definisi Operasional :** Jumlah kader zoonosis yang dilatih dalam pengendalian penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kader ini bertindak sebagai garda terdepan di tingkat komunitas, berperan sebagai kepanjangan tangan petugas kesehatan hewan untuk edukasi, deteksi dini, dan pelaporan kasus zoonosis. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kader zoonosis	Data kader zoonosis	Medik Veteriner Ahli Pertama
		Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada hewan	Wilayah	**Konsep :** Kegiatan pemantauan sistematis untuk mendeteksi dini penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Hal ini bertujuan untuk memantau situasi penyakit, mengendalikan penyebarannya, serta mencegah masuknya penyakit baru yang dapat mengancam kesehatan hewan dan masyarakat. Pelaksanaannya melibatkan pengumpulan data, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta kerja sama antar sektor kesehatan	Data wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan	Medik Veteriner Ahli Pertama

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				hewan dan kesehatan manusia **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pemantauan sistematis untuk mendeteksi dini penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Hal ini bertujuan untuk memantau situasi penyakit, mengendalikan penyebarannya, serta mencegah masuknya penyakit baru yang dapat mengancam kesehatan hewan dan masyarakat. Pelaksanaannya melibatkan pengumpulan data, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta kerja sama antar sektor kesehatan hewan dan kesehatan manusia **Formulasi Perhitungan :** Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan		
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Laporan	**Konsep :** Kegiatan untuk menurunkan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis di tingkat kabupaten/kota yang meliputi tindakan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewan, peningkatan hygiene, dan sosiaisasi penyakit hewan. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan sosialisasi penyakit hewan, vaksinasi, pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas ternak untuk pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Data wilayah/kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Medik Veteriner Ahli Pertama
5.	Terawasinya pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/ kota	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pemantauan terhadap pergerakan (lalu lintas) hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan (HPM) baik yang masuk ke dalam wilayah kabupaten/kota tersebut maupun yang keluar dari wilayah tersebut. **Definisi Operasional :** Laporan tentang kegiatan pemantauan terhadap pergerakan (lalu lintas) hewan dan produk hewan, baik yang masuk ke dalam wilayah kabupaten/kota tersebut maupun yang keluar dari wilayah tersebut. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Medik Veteriner Ahli Pertama

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan peredaran produk hewan didasari pada upaya menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan (ASUH) pangan asal hewan yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini merupakan bagian integral dari sistem kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) dan bertujuan untuk melindungi konsumen dari bahaya penyakit hewan menular (zoonosis), cemaran biologis, kimia, dan fisik, serta memastikan produk yang dikonsumsi bermutu dan bergizi. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan peredaran produk hewan didasari pada upaya menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan (ASUH) pangan asal hewan yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini merupakan bagian integral dari sistem kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) dan bertujuan untuk melindungi konsumen dari bahaya penyakit hewan menular (zoonosis), cemaran biologis, kimia, dan fisik, serta memastikan produk yang dikonsumsi bermutu dan bergizi. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Medik Veteriner Ahli Pertama
6.	Terkelolanya pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota	Tersedianya pelayanan jasa laboratorium	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pelayanan jasa laboratorium yang mencakup berbagai layanan diagnostik dan pengujian untuk mendukung kesehatan hewan, keamanan pangan, dan penelitian. Layanan ini meliputi pemeriksaan penyakit melalui patologi klinis, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya, serta pengujian nutrisi dan pakan ternak. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pelayanan jasa laboratorium yang mencakup berbagai layanan diagnostik dan pengujian untuk mendukung kesehatan hewan, keamanan pangan, dan penelitian. Layanan ini meliputi pemeriksaan penyakit melalui patologi klinis, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya, serta pengujian nutrisi dan pakan ternak. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pelayanan jasa laboratorium	Laporan pelayanan jasa laboratorium	Medik Veteriner Ahli Pertama
		Tersedianya pelayanan jasa medik veteriner	Laporan	**Konsep :** Tersedianya serangkaian layanan kesehatan hewan yang mencakup diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, dan konsultasi untuk hewan. Layanan ini meliputi tindakan klinis, patologis, laboratorium, forensik, serta tindakan terapi seperti promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan medik reproduksi. Pelayanan ini dapat dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga paramedis veteriner di berbagai fasilitas, seperti klinik hewan, rumah sakit hewan, atau puskeswan	Laporan pelayanan jasa medik veteriner	Medik Veteriner Ahli Pertama

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Definisi Operasional : Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan layanan kesehatan hewan yang mencakup diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, dan konsultasi untuk hewan. Layanan ini meliputi tindakan klinis, patologis, laboratorium, forensik, serta tindakan terapi seperti promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan medik reproduksi. Pelayanan ini dapat dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga paramedis veteriner di berbagai fasilitas, seperti klinik hewan, rumah sakit hewan, atau puskeswan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pelayanan jasa medik veteriner		
7.	Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan hygiene sanitasi	Unit Usaha	**Konsep :** Kegiatan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner untuk melindungi kesehatan manusia dari bahaya yang berasal dari hewan dan produk hewan, serta menjamin keamanan pangan asal hewan **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner untuk melindungi kesehatan manusia dari bahaya yang berasal dari hewan dan produk hewan, serta menjamin keamanan pangan asal hewan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Data unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Medik Veteriner Ahli Pertama
		Terlaksananya pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan	Orang	**Konsep :** Kegiatan pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan yang meliputi peningkatan keterampilan teknis, pemahaman kebijakan, serta kemampuan adaptasi terhadap ilmu dan teknologi baru. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan penting untuk memastikan petugas dapat melakukan diagnosis, penanganan penyakit, pengawasan produk hewan, dan memastikan kesejahteraan hewan sesuai standar. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan yang meliputi peningkatan keterampilan teknis, pemahaman kebijakan, serta kemampuan adaptasi terhadap ilmu dan teknologi baru. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan penting untuk memastikan petugas dapat melakukan diagnosis, penanganan penyakit, pengawasan produk hewan, dan memastikan kesejahteraan hewan sesuai standar.	Data Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Medik Veteriner Ahli Pertama

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Formulasi Perhitungan : Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi		
8.	Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan	Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Unit Usaha	**Konsep :** Kegiatan yang melibatkan pengawasan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan interaksi manusia dengan hewan telah memenuhi standar dan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan **Definisi Operasional :** Terlaksananya pengawasan kesejahteraan hewan seperti di rumah potong hewan, tempat pemeliharaan, atau unit usaha produk hewan dan memastikan hewan diperlakukan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Data unit usaha yang dibina	Medik Veteriner Ahli Pertama
9.	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan usaha peternakan	Terawasinya pelaksanaan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) usaha peternakan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar mutu, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), dan kelestarian lingkungan **Definisi Operasional :** Jumlah kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) usaha peternakan. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan yang diawasi	Data Unit Usaha Peternakan	Medik Veteriner Ahli Pertama
		Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Potong Hewan	Laporan	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pengawasan proses perizinan resmi yang harus dijalani oleh pengusaha untuk mendapatkan legalitas dalam mendirikan dan mengoperasikan RPH sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin ini memastikan operasional RPH memenuhi standar higienis, kesehatan hewan, dan keamanan pangan demi menghasilkan daging yang aman dikonsumsi oleh masyarakat. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan proses perizinan resmi yang harus dijalani oleh pengusaha untuk mendapatkan legalitas dalam mendirikan dan mengoperasikan RPH sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin ini memastikan operasional RPH memenuhi standar higienis, kesehatan hewan, dan keamanan pangan demi menghasilkan daging yang	Data Rumah Potong Hewan	Medik Veteriner Ahli Pertama

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				aman dikonsumsi oleh masyarakat. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi		
		Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktek Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner atau Pasar Hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa semua persyaratan untuk izin usaha telah dipenuhi dan dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk kegiatan pelayanan kesehatan hewan seperti Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, dan lainnya. Ini memastikan bahwa semua praktik yang dilakukan legal dan memenuhi standar, seperti memiliki izin usaha dan izin praktik dari pihak berwenang. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa semua persyaratan untuk izin usaha telah dipenuhi dan dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk kegiatan pelayanan kesehatan hewan seperti Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, dan lainnya. Ini memastikan bahwa semua praktik yang dilakukan legal dan memenuhi standar, seperti memiliki izin usaha dan izin praktik dari pihak berwenang. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktek Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner atau Pasar Hewan yang diawasi	- Data Rumah Sakit Hewan, - Data Klinik Hewan, - Data Ambulatori, - Data Praktek Dokter Hewan Mandiri/ Puskeswan Mandiri, - Data Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner - Data Pasar Hewan	Medik Veteriner Ahli Pertama
10.	Terlaksananya pengawasan pelaku usaha obat hewan	Terawasinya pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) pelaku usaha obat hewan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar mutu, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), dan kelestarian lingkungan **Definisi Operasional :** Jumlah kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) pelaku usaha obat hewan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi	Data Pelaku Usaha Obat Hewan	Medik Veteriner Ahli Pertama

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
Tugas : Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih
Fungsi :
1. Menyusun rencana kerja di bidang pengawasan bibit ternak;
2. Mengolah dan menganalisa data pada proses produksi bibit/benih;
3. Melakunan pengamatan Proses produksi bibit ternak;
4. Melakukan seleksi terhadap donor dalam rangka proses produksi embrio;
5. Melakukan pemeriksaan mutu semen segar yang akan diproses menjadi semen beku secara motilitas;
6. Melaksanakan pengawasan Proses produksi dan seleksi telur tetas;
7. Melaksanakan Pengawasan mutu bibit ternak;
8. Melaksanakan Pengawasan mutu benih;
9. Melaksanakan Pengawasan peredaran bibit dan benih;
10. Melaksanakan Evaluasi metode pengawasan bibit dan benih;
11. Melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran Bibit dan benih;
12. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota	Terawasinya mutu benih/bibit ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	Laporan	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pengawasan mutu benih atau bibit ternak, bahan pakan atau pakan atau tanaman skala kecil untuk memastikan produk yang beredar di pasaran aman, berkualitas, sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan mutu benih atau bibit ternak, bahan pakan atau pakan atau tanaman skala kecil untuk memastikan produk yang beredar di pasaran aman, berkualitas, sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan kegiatan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Terawasinya peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak	Laporan	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	Laporan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
2.	Terawasinya peredaran obat hewan di tingkat pengecer	Terperiksanya mutu, khasiat dan keamanan obat hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan pengawasan penjaminan mutu, khasiat, keamanan, dan legalitas obat hewan untuk me/ lindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan lingkungan **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengawasan penjaminan mutu, khasiat, keamanan, dan legalitas obat hewan untuk melindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan lingkungan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Laporan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
3.	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/ kota	Terawasinya produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan untuk menjamin mutu genetik dan kesehatan ternak serta ketersediaan pakan yang memadai **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan untuk memastikan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak serta hijauan pakan ternak (HPT) sesuai dengan standar mutu dan peraturan yang berlaku. **Formulasi Perhitungan :** - Jumlah Laporan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan,	Laporan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak		**Konsep :** Kegiatan pengawasan untuk memastikan benih/bibit ternak yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu tertentu (genetik, fisik, fisiologis, dan kesehatan), sehingga dapat mendukung produktivitas ternak yang optimal dan melindungi konsumen serta petani ternak. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengawasan untuk memastikan benih/bibit ternak yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu tertentu (genetik, fisik, fisiologis, dan kesehatan), sehingga dapat mendukung produktivitas ternak yang optimal dan melindungi konsumen serta petani ternak. **Formulasi Perhitungan :** - Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Data benih/bibit ternak yang beredar	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
4.	Tersusunnya laporan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah	Tertanggulangi nya daerah terdampak wabah penyakit hewan menular	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan melalui pemantauan rutin dan pemeriksaan serta mengisolasi area yang teridentifikasi wabah untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan mengenai seluruh kegiatan terkait upaya penjaminan kesehatan hewan, serta tindakan administratif dan teknis yang dilakukan dalam rangka penutupan dan pembukaan kembali daerah yang mengalami wabah penyakit hewan menular. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali	Data daerah terdampak wabah penyakit	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
		Terbentuknya kader zoonoziz	Orang	**Konsep :** Kegiatan pelatihan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengendalian penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kader ini bertindak sebagai garda terdepan di tingkat komunitas, berperan sebagai kepanjangan tangan petugas kesehatan hewan untuk edukasi, deteksi dini, dan pelaporan kasus zoonosis. **Definisi Operasional :** Jumlah kader zoonosis yang dilatih dalam pengendalian penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kader ini bertindak sebagai garda terdepan di tingkat komunitas, berperan sebagai kepanjangan tangan petugas kesehatan hewan untuk edukasi, deteksi dini, dan pelaporan kasus zoonosis.	Data kader zoonosis	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Formulasi Perhitungan : Jumlah kader zoonosis		
		Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada hewan	Wilayah	**Konsep :** Kegiatan pemantauan sistematis untuk mendeteksi dini penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Hal ini bertujuan untuk memantau situasi penyakit, mengendalikan penyebarannya, serta mencegah masuknya penyakit baru yang dapat mengancam kesehatan hewan dan masyarakat. Pelaksanaannya melibatkan pengumpulan data, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta kerja sama antar sektor kesehatan hewan dan kesehatan manusia **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pemantauan sistematis untuk mendeteksi dini penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Hal ini bertujuan untuk memantau situasi penyakit, mengendalikan penyebarannya, serta mencegah masuknya penyakit baru yang dapat mengancam kesehatan hewan dan masyarakat. Pelaksanaannya melibatkan pengumpulan data, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta kerja sama antar sektor kesehatan hewan dan kesehatan manusia **Formulasi Perhitungan :** Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan	Data wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Laporan	**Konsep :** Kegiatan untuk menurunkan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis di tingkat kabupaten/kota yang meliputi tindakan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewan, peningkatan hygiene, dan sosiaisasi penyakit hewan. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan sosialisasi penyakit hewan, vaksinasi, pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas ternak untuk pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Data wilayah/kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
5.	Terawasinya pemasukan dan pengeluaran hewan dan	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pemantauan terhadap pergerakan (lalu lintas) hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan (HPM) baik yang masuk ke dalam wilayah kabupaten/kota tersebut maupun yang keluar dari wilayah tersebut.	Laporan pengawasan penerapan persyaratan	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	produk hewan daerah kabupaten/ kota	pemasukan dan/atau pengeluaran HPM		**Definisi Operasional :** Laporan tentang kegiatan pemantauan terhadap pergerakan (lalu lintas) hewan dan produk hewan, baik yang masuk ke dalam wilayah kabupaten/kota tersebut maupun yang keluar dari wilayah tersebut. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	
		Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan peredaran produk hewan didasari pada upaya menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan (ASUH) pangan asal hewan yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini merupakan bagian integral dari sistem kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) dan bertujuan untuk melindungi konsumen dari bahaya penyakit hewan menular (zoonosis), cemaran biologis, kimia, dan fisik, serta memastikan produk yang dikonsumsi bermutu dan bergizi. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan peredaran produk hewan didasari pada upaya menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan (ASUH) pangan asal hewan yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini merupakan bagian integral dari sistem kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) dan bertujuan untuk melindungi konsumen dari bahaya penyakit hewan menular (zoonosis), cemaran biologis, kimia, dan fisik, serta memastikan produk yang dikonsumsi bermutu dan bergizi. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
6.	Terkelolanya pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota	Tersedianya pelayanan jasa laboratorium	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pelayanan jasa laboratorium yang mencakup berbagai layanan diagnostik dan pengujian untuk mendukung kesehatan hewan, keamanan pangan, dan penelitian. Layanan ini meliputi pemeriksaan penyakit melalui patologi klinis, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya, serta pengujian nutrisi dan pakan ternak. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pelayanan jasa laboratorium yang mencakup berbagai layanan diagnostik dan pengujian untuk mendukung kesehatan hewan, keamanan pangan, dan penelitian. Layanan ini meliputi pemeriksaan penyakit melalui patologi klinis, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya, serta pengujian nutrisi dan pakan ternak. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pelayanan jasa laboratorium	Laporan pelayanan jasa laboratorium	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Tersedianya pelayanan jasa medik veteriner	Laporan	**Konsep :** Tersedianya serangkaian layanan kesehatan hewan yang mencakup diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, dan konsultasi untuk hewan. Layanan ini meliputi tindakan klinis, patologis, laboratorium, forensik, serta tindakan terapi seperti promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan medik reproduksi. Pelayanan ini dapat dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga paramedis veteriner di berbagai fasilitas, seperti klinik hewan, rumah sakit hewan, atau puskeswan **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan layanan kesehatan hewan yang mencakup diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, dan konsultasi untuk hewan. Layanan ini meliputi tindakan klinis, patologis, laboratorium, forensik, serta tindakan terapi seperti promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan medik reproduksi. Pelayanan ini dapat dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga paramedis veteriner di berbagai fasilitas, seperti klinik hewan, rumah sakit hewan, atau puskeswan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pelayanan jasa medik veteriner	Laporan pelayanan jasa medik veteriner	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
7.	Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan hygiene sanitasi	Unit Usaha	**Konsep :** Kegiatan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner untuk melindungi kesehatan manusia dari bahaya yang berasal dari hewan dan produk hewan, serta menjamin keamanan pangan asal hewan **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner untuk melindungi kesehatan manusia dari bahaya yang berasal dari hewan dan produk hewan, serta menjamin keamanan pangan asal hewan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Data unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
		Terlaksananya pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat	Orang	**Konsep :** Kegiatan pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan yang meliputi peningkatan keterampilan teknis, pemahaman kebijakan, serta kemampuan adaptasi terhadap ilmu dan teknologi baru. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan penting untuk memastikan petugas dapat melakukan diagnosis, penanganan penyakit, pengawasan produk hewan, dan memastikan kesejahteraan hewan sesuai standar.	Data Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan hewan yang	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		veteriner, dan kesejahteraan hewan		**Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan yang meliputi peningkatan keterampilan teknis, pemahaman kebijakan, serta kemampuan adaptasi terhadap ilmu dan teknologi baru. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan penting untuk memastikan petugas dapat melakukan diagnosis, penanganan penyakit, pengawasan produk hewan, dan memastikan kesejahteraan hewan sesuai standar. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	mengikuti pengembangan kompetensi	
8.	Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan	Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Unit Usaha	**Konsep :** Kegiatan yang melibatkan pengawasan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan interaksi manusia dengan hewan telah memenuhi standar dan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan **Definisi Operasional :** Terlaksananya pengawasan kesejahteraan hewan seperti di rumah potong hewan, tempat pemeliharaan, atau unit usaha produk hewan dan memastikan hewan diperlakukan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Data unit usaha yang dibina	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
9.	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan usaha peternakan	Terawasinya pelaksanaan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) usaha peternakan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar mutu, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), dan kelestarian lingkungan **Definisi Operasional :** Jumlah kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) usaha peternakan. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan yang diawasi	Data Unit Usaha Peternakan	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
		Terawasinya pelaksanaan izin usaha	Laporan	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pengawasan proses perizinan resmi yang harus dijalani oleh pengusaha untuk mendapatkan legalitas dalam mendirikan dan mengoperasikan RPH sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin ini memastikan operasional RPH memenuhi	Data Rumah Potong Hewan	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Rumah Potong Hewan		standar higienis, kesehatan hewan, dan keamanan pangan demi menghasilkan daging yang aman dikonsumsi oleh masyarakat. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan proses perizinan resmi yang harus dijalani oleh pengusaha untuk mendapatkan legalitas dalam mendirikan dan mengoperasikan RPH sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin ini memastikan operasional RPH memenuhi standar higienis, kesehatan hewan, dan keamanan pangan demi menghasilkan daging yang aman dikonsumsi oleh masyarakat. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi		
		Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktek Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner atau Pasar Hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa semua persyaratan untuk izin usaha telah dipenuhi dan dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk kegiatan pelayanan kesehatan hewan seperti Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, dan lainnya. Ini memastikan bahwa semua praktik yang dilakukan legal dan memenuhi standar, seperti memiliki izin usaha dan izin praktik dari pihak berwenang. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa semua persyaratan untuk izin usaha telah dipenuhi dan dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk kegiatan pelayanan kesehatan hewan seperti Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, dan lainnya. Ini memastikan bahwa semua praktik yang dilakukan legal dan memenuhi standar, seperti memiliki izin usaha dan izin praktik dari pihak berwenang. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktek Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner atau Pasar Hewan yang diawasi	- Data Rumah Sakit Hewan, - Data Klinik Hewan, - Data Ambulatori, - Data Praktek Dokter Hewan Mandiri/ Puskeswan Mandiri, - Data Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner - Data Pasar Hewan	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
10.	Terlaksananya pengawasan pelaku usaha obat hewan	Terawasinya pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) pelaku usaha obat hewan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar mutu, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), dan kelestarian lingkungan **Definisi Operasional :** Jumlah kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) pelaku usaha obat hewan	Data Pelaku Usaha Obat Hewan	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Formulasi Perhitungan : Jumlah izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda
Tugas : Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan.
Fungsi :
1. Menginventarisasi peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan terkait dengan ketersediaan dan cadangan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, kerawanan pangan, keamanan pangan dan gizi untuk digunakan sebagai landasan hukum pengambilan keputusan;
2. Mengumpulkan data-data dan informasi serta permasalahan tentang ketersediaan dan cadangan pangan, kebutuhan pangan, akses pangan, diversifikasi pangan, keamanan pangan dan gizi yang ada sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kerja;
3. Menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan pakan/pakan;
4. Menghitung kebutuhan pakan ternak berdasarkan jenis dan perkembangan fase biologis;
5. Melakukan bimbingan teknis dibidang pengawasan mutu pakan;
6. Menganalisis hasil pengujian sampel dalam rangka pemeriksaan mikotoksin/ Meat Bone Meal (MBM)/ salmonella/ risk material menggunakan Elisa Reader;
7. Melakukan penilaian kelayakan terhadap perhitungan data hasil pengujian dan melakukan penilaian kelayakan terhadap hasil analisis pakan secara keseluruhan;
8. Menyusun rekomendasi hasil pengujian;
9. Membuat laporan hasil pengawasan atau pengujian;
10. Merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
11. Merencanakan penerapan sistem manajemen mutu.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota	Terawasinya mutu benih/bibit ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	Laporan	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pengawasan mutu benih atau bibit ternak, bahan pakan atau pakan atau tanaman skala kecil untuk memastikan produk yang beredar di pasaran aman, berkualitas, sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan mutu benih atau bibit ternak, bahan pakan atau pakan atau tanaman skala kecil untuk memastikan produk yang beredar di pasaran aman, berkualitas, sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan kegiatan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Terawasinya peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak	Laporan	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	Laporan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda
2.	Terawasinya peredaran obat hewan di tingkat pengecer	Terperiksanya mutu, khasiat dan keamanan obat hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan pengawasan penjaminan mutu, khasiat, keamanan, dan legalitas obat hewan untuk me/ lindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan lingkungan **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengawasan penjaminan mutu, khasiat, keamanan, dan legalitas obat hewan untuk melindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan lingkungan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Laporan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda
3.	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/ kota	Terawasinya produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan untuk menjamin mutu genetik dan kesehatan ternak serta ketersediaan pakan yang memadai **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan untuk memastikan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak serta hijauan pakan ternak (HPT) sesuai dengan standar mutu dan peraturan yang berlaku. **Formulasi Perhitungan :** - Jumlah Laporan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan,	Laporan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak		**Konsep :** Kegiatan pengawasan untuk memastikan benih/bibit ternak yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu tertentu (genetik, fisik, fisiologis, dan kesehatan), sehingga dapat mendukung produktivitas ternak yang optimal dan melindungi konsumen serta petani ternak. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengawasan untuk memastikan benih/bibit ternak yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu tertentu (genetik, fisik, fisiologis, dan kesehatan), sehingga dapat mendukung produktivitas ternak yang optimal dan melindungi konsumen serta petani ternak. **Formulasi Perhitungan :** - Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Data benih/bibit ternak yang beredar	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda
4.	Tersusunnya laporan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah	Tertanggulangi nya daerah terdampak wabah penyakit hewan menular	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan melalui pemantauan rutin dan pemeriksaan serta mengisolasi area yang teridentifikasi wabah untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan mengenai seluruh kegiatan terkait upaya penjaminan kesehatan hewan, serta tindakan administratif dan teknis yang dilakukan dalam rangka penutupan dan pembukaan kembali daerah yang mengalami wabah penyakit hewan menular. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali	Data daerah terdampak wabah penyakit	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda
		Terbentuknya kader zoonoziz	Orang	**Konsep :** Kegiatan pelatihan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengendalian penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kader ini bertindak sebagai garda terdepan di tingkat komunitas, berperan sebagai kepanjangan tangan petugas kesehatan hewan untuk edukasi, deteksi dini, dan pelaporan kasus zoonosis. **Definisi Operasional :** Jumlah kader zoonosis yang dilatih dalam pengendalian penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kader ini bertindak sebagai garda terdepan di tingkat komunitas, berperan sebagai kepanjangan tangan petugas kesehatan hewan untuk edukasi, deteksi dini, dan pelaporan kasus zoonosis. **Formulasi Perhitungan :**	Data kader zoonosis	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah kader zoonosis		
		Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada hewan	Wilayah	**Konsep :** Kegiatan pemantauan sistematis untuk mendeteksi dini penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Hal ini bertujuan untuk memantau situasi penyakit, mengendalikan penyebarannya, serta mencegah masuknya penyakit baru yang dapat mengancam kesehatan hewan dan masyarakat. Pelaksanaannya melibatkan pengumpulan data, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta kerja sama antar sektor kesehatan hewan dan kesehatan manusia **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pemantauan sistematis untuk mendeteksi dini penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Hal ini bertujuan untuk memantau situasi penyakit, mengendalikan penyebarannya, serta mencegah masuknya penyakit baru yang dapat mengancam kesehatan hewan dan masyarakat. Pelaksanaannya melibatkan pengumpulan data, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta kerja sama antar sektor kesehatan hewan dan kesehatan manusia **Formulasi Perhitungan :** Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan	Data wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Laporan	**Konsep :** Kegiatan untuk menurunkan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis di tingkat kabupaten/kota yang meliputi tindakan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewan, peningkatan hygiene, dan sosiaisasi penyakit hewan. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan sosialisasi penyakit hewan, vaksinasi, pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas ternak untuk pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Data wilayah/kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda
5.	Terawasinya pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pemantauan terhadap pergerakan (lalu lintas) hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan (HPM) baik yang masuk ke dalam wilayah kabupaten/kota tersebut maupun yang keluar dari wilayah tersebut.	Laporan pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	daerah kabupaten/ kota	dan/atau pengeluaran HPM		**Definisi Operasional :** Laporan tentang kegiatan pemantauan terhadap pergerakan (lalu lintas) hewan dan produk hewan, baik yang masuk ke dalam wilayah kabupaten/kota tersebut maupun yang keluar dari wilayah tersebut. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	
		Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan peredaran produk hewan didasari pada upaya menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan (ASUH) pangan asal hewan yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini merupakan bagian integral dari sistem kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) dan bertujuan untuk melindungi konsumen dari bahaya penyakit hewan menular (zoonosis), cemaran biologis, kimia, dan fisik, serta memastikan produk yang dikonsumsi bermutu dan bergizi. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan peredaran produk hewan didasari pada upaya menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan (ASUH) pangan asal hewan yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini merupakan bagian integral dari sistem kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) dan bertujuan untuk melindungi konsumen dari bahaya penyakit hewan menular (zoonosis), cemaran biologis, kimia, dan fisik, serta memastikan produk yang dikonsumsi bermutu dan bergizi. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda
6.	Terkelolanya pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota	Tersedianya pelayanan jasa laboratorium	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pelayanan jasa laboratorium yang mencakup berbagai layanan diagnostik dan pengujian untuk mendukung kesehatan hewan, keamanan pangan, dan penelitian. Layanan ini meliputi pemeriksaan penyakit melalui patologi klinis, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya, serta pengujian nutrisi dan pakan ternak. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pelayanan jasa laboratorium yang mencakup berbagai layanan diagnostik dan pengujian untuk mendukung kesehatan hewan, keamanan pangan, dan penelitian. Layanan ini meliputi pemeriksaan penyakit melalui patologi klinis, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya, serta pengujian nutrisi dan pakan ternak. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pelayanan jasa laboratorium	Laporan pelayanan jasa laboratorium	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Tersedianya pelayanan jasa medik veteriner	Laporan	**Konsep :** Tersedianya serangkaian layanan kesehatan hewan yang mencakup diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, dan konsultasi untuk hewan. Layanan ini meliputi tindakan klinis, patologis, laboratorium, forensik, serta tindakan terapi seperti promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan medik reproduksi. Pelayanan ini dapat dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga paramedis veteriner di berbagai fasilitas, seperti klinik hewan, rumah sakit hewan, atau puskeswan **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan layanan kesehatan hewan yang mencakup diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, dan konsultasi untuk hewan. Layanan ini meliputi tindakan klinis, patologis, laboratorium, forensik, serta tindakan terapi seperti promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan medik reproduksi. Pelayanan ini dapat dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga paramedis veteriner di berbagai fasilitas, seperti klinik hewan, rumah sakit hewan, atau puskeswan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pelayanan jasa medik veteriner	Laporan pelayanan jasa medik veteriner	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda
7.	Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan hygiene sanitasi	Unit Usaha	**Konsep :** Kegiatan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner untuk melindungi kesehatan manusia dari bahaya yang berasal dari hewan dan produk hewan, serta menjamin keamanan pangan asal hewan **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner untuk melindungi kesehatan manusia dari bahaya yang berasal dari hewan dan produk hewan, serta menjamin keamanan pangan asal hewan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Data unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda
		Terlaksananya pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat	Orang	**Konsep :** Kegiatan pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan yang meliputi peningkatan keterampilan teknis, pemahaman kebijakan, serta kemampuan adaptasi terhadap ilmu dan teknologi baru. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan penting untuk memastikan petugas dapat melakukan diagnosis, penanganan penyakit, pengawasan produk hewan, dan memastikan kesejahteraan hewan sesuai standar.	Data Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan hewan yang	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		veteriner, dan kesejahteraan hewan		**Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan yang meliputi peningkatan keterampilan teknis, pemahaman kebijakan, serta kemampuan adaptasi terhadap ilmu dan teknologi baru. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan penting untuk memastikan petugas dapat melakukan diagnosis, penanganan penyakit, pengawasan produk hewan, dan memastikan kesejahteraan hewan sesuai standar. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	mengikuti pengembangan kompetensi	
8.	Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan	Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Unit Usaha	**Konsep :** Kegiatan yang melibatkan pengawasan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan interaksi manusia dengan hewan telah memenuhi standar dan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan **Definisi Operasional :** Terlaksananya pengawasan kesejahteraan hewan seperti di rumah potong hewan, tempat pemeliharaan, atau unit usaha produk hewan dan memastikan hewan diperlakukan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Data unit usaha yang dibina	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda
9.	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan usaha peternakan	Terawasinya pelaksanaan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) usaha peternakan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar mutu, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), dan kelestarian lingkungan **Definisi Operasional :** Jumlah kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) usaha peternakan. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan yang diawasi	Data Unit Usaha Peternakan	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda
		Terawasinya pelaksanaan izin usaha	Laporan	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pengawasan proses perizinan resmi yang harus dijalani oleh pengusaha untuk mendapatkan legalitas dalam mendirikan dan mengoperasikan RPH sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin ini memastikan operasional RPH memenuhi	Data Rumah Potong Hewan	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Rumah Potong Hewan		standar higienis, kesehatan hewan, dan keamanan pangan demi menghasilkan daging yang aman dikonsumsi oleh masyarakat. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan proses perizinan resmi yang harus dijalani oleh pengusaha untuk mendapatkan legalitas dalam mendirikan dan mengoperasikan RPH sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin ini memastikan operasional RPH memenuhi standar higienis, kesehatan hewan, dan keamanan pangan demi menghasilkan daging yang aman dikonsumsi oleh masyarakat. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi		
		Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktek Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner atau Pasar Hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa semua persyaratan untuk izin usaha telah dipenuhi dan dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk kegiatan pelayanan kesehatan hewan seperti Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, dan lainnya. Ini memastikan bahwa semua praktik yang dilakukan legal dan memenuhi standar, seperti memiliki izin usaha dan izin praktik dari pihak berwenang. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa semua persyaratan untuk izin usaha telah dipenuhi dan dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk kegiatan pelayanan kesehatan hewan seperti Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, dan lainnya. Ini memastikan bahwa semua praktik yang dilakukan legal dan memenuhi standar, seperti memiliki izin usaha dan izin praktik dari pihak berwenang. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktek Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner atau Pasar Hewan yang diawasi	- Data Rumah Sakit Hewan, - Data Klinik Hewan, - Data Ambulatori, - Data Praktek Dokter Hewan Mandiri/ Puskeswan Mandiri, - Data Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner - Data Pasar Hewan	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda
10.	Terlaksananya pengawasan pelaku usaha obat hewan	Terawasinya pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) pelaku usaha obat hewan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar mutu, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), dan kelestarian lingkungan **Definisi Operasional :** Jumlah kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) pelaku usaha obat hewan	Data Pelaku Usaha Obat Hewan	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Formulasi Perhitungan : Jumlah izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
Tugas : Menerima dan mengolah data bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dilengkapi hasil laporan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.
Fungsi :

1. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
2. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan sifat data dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
3. Menganalisis data peternakan dan kesehatan hewan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk;
4. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data yang masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mengetahui volume dan jenis data bidang peternakan dan kesehatan hewan yang akan diolah;
5. Mencatat perkembangan dan permasalahan data bidang peternakan dan kesehatan hewan secara periodik, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya;
6. Mengolah dan menyajikan data bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut;
7. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan, sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terawasinya mutu benih/bibit ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah bahan penyusunan laporan kegiatan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	Laporan	**Konsep :** Tersedianya bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu benih atau bibit ternak, bahan pakan atau pakan atau tanaman skala kecil untuk memastikan produk yang beredar di pasaran aman, berkualitas, sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Definisi Operasional :** Jumlah bahan yang disediakan dalam penyusunan laporan kegiatan pengawasan mutu benih atau bibit ternak, bahan pakan atau pakan atau tanaman skala kecil untuk memastikan produk yang beredar di pasaran aman, berkualitas, sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan laporan kegiatan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota	Pengolah Data dan Informasi

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Terawasinya peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak	Jumlah bahan penyusunan laporan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	Laporan	**Konsep :** Tersedianya bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Definisi Operasional :** Jumlah bahan yang disediakan dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar sesuai standar (misalnya SNI atau PTM), dan memenuhi kebutuhan petani peternak. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan laporan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	Laporan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	Pengolah Data dan Informasi
2.	Terperiksanya mutu, khasiat dan keamanan obat hewan	Jumlah bahan penyusunan laporan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Laporan	**Konsep :** Tersedianya bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan pengawasan penjaminan mutu, khasiat, keamanan, dan legalitas obat hewan untuk me/ lindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan lingkungan **Definisi Operasional :** Jumlah bahan yang disediakan dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan penjaminan mutu, khasiat, keamanan, dan legalitas obat hewan untuk melindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan lingkungan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan laporan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Laporan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Pengolah Data dan Informasi
3.	Terawasinya produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan	Jumlah bahan penyusunan laporan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	**Konsep :** Tersedianya bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan untuk menjamin mutu genetik dan kesehatan ternak serta ketersediaan pakan yang memadai **Definisi Operasional :** Jumlah bahan yang disediakan dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak serta hijauan pakan ternak (HPT) sesuai dengan standar mutu dan peraturan yang berlaku. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan Laporan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT,	Laporan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pengolah Data dan Informasi

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Bahan Pakan/Pakan,		
	Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah bahan penyusunan laporan benih/bibit ternak yang beredar	Kegiatan	**Konsep :** Tersedianya bahan penyusunan laporan kegiatan pengawasan untuk memastikan benih/bibit ternak yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu tertentu (genetik, fisik, fisiologis, dan kesehatan), sehingga dapat mendukung produktivitas ternak yang optimal dan melindungi konsumen serta petani ternak. **Definisi Operasional :** Jumlah bahan yang disediakan dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk memastikan benih/bibit ternak yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu tertentu (genetik, fisik, fisiologis, dan kesehatan), sehingga dapat mendukung produktivitas ternak yang optimal dan melindungi konsumen serta petani ternak. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah bahan penyusunan laporan benih/bibit ternak yang beredar	Data benih/bibit ternak yang beredar	Pengolah Data dan Informasi
4.	Tertanggulangi nya daerah terdampak wabah penyakit hewan menular	Jumlah data daerah terdampak wabah yang terkendali	Dokumen	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pendataan daerah terdampak wabah penyakit hewan yang terkendali **Definisi Operasional :** Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam pendataan daerah terdampak wabah penyakit hewan yang terkendali **Formulasi Perhitungan :** Jumlah data daerah terdampak wabah yang terkendali	Data daerah terdampak wabah penyakit	Pengolah Data dan Informasi
	Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah dokumen data kader zoonosis	Dokumen	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan penyusunan data kader zoonosis. **Definisi Operasional :** Tersusunnya data kader zoonosis. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah dokumen data kader zoonosis	Data kader zoonosis	Pengolah Data dan Informasi
	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada hewan	Jumlah bahan penyusunan laporan kegiatan wilayah yang	Wilayah	**Konsep :** Kegiatan pemantauan sistematis untuk mendeteksi dini penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Hal ini bertujuan untuk memantau situasi penyakit, mengendalikan penyebarannya, serta mencegah masuknya penyakit baru yang dapat mengancam kesehatan hewan dan masyarakat. Pelaksanaannya melibatkan pengumpulan data,	Data wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan	Pengolah Data dan Informasi

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan		pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta kerja sama antar sektor kesehatan hewan dan kesehatan manusia **Definisi Operasional :** Tersedianya bahan penyusunan laporan kegiatan pemantauan sistematis untuk mendeteksi dini penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Hal ini bertujuan untuk memantau situasi penyakit, mengendalikan penyebarannya, serta mencegah masuknya penyakit baru yang dapat mengancam kesehatan hewan dan masyarakat. Pelaksanaannya melibatkan pengumpulan data, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta kerja sama antar sektor kesehatan hewan dan kesehatan manusia **Formulasi Perhitungan :** Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan		
	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kot a	Laporan	**Konsep :** Kegiatan untuk menurunkan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis di tingkat kabupaten/kota yang meliputi tindakan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewan, peningkatan hygiene, dan sosiaisasi penyakit hewan. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan sosialisasi penyakit hewan, vaksinasi, pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas ternak untuk pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Data wilayah/kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pengolah Data dan Informasi
5.	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah laporan pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pemantauan terhadap pergerakan (lalu lintas) hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan (HPM) baik yang masuk ke dalam wilayah kabupaten/kota tersebut maupun yang keluar dari wilayah tersebut. **Definisi Operasional :** Laporan tentang kegiatan pemantauan terhadap pergerakan (lalu lintas) hewan dan produk hewan, baik yang masuk ke dalam wilayah kabupaten/kota tersebut maupun yang keluar dari wilayah tersebut. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Pengolah Data dan Informasi

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan peredaran produk hewan didasari pada upaya menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan (ASUH) pangan asal hewan yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini merupakan bagian integral dari sistem kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) dan bertujuan untuk melindungi konsumen dari bahaya penyakit hewan menular (zoonosis), cemaran biologis, kimia, dan fisik, serta memastikan produk yang dikonsumsi bermutu dan bergizi. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan peredaran produk hewan didasari pada upaya menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan (ASUH) pangan asal hewan yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini merupakan bagian integral dari sistem kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) dan bertujuan untuk melindungi konsumen dari bahaya penyakit hewan menular (zoonosis), cemaran biologis, kimia, dan fisik, serta memastikan produk yang dikonsumsi bermutu dan bergizi. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Pengolah Data dan Informasi
6.	Tersedianya pelayanan jasa laboratorium	Jumlah laporan pelayanan jasa laboratorium	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pelayanan jasa laboratorium yang mencakup berbagai layanan diagnostik dan pengujian untuk mendukung kesehatan hewan, keamanan pangan, dan penelitian. Layanan ini meliputi pemeriksaan penyakit melalui patologi klinis, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya, serta pengujian nutrisi dan pakan ternak. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pelayanan jasa laboratorium yang mencakup berbagai layanan diagnostik dan pengujian untuk mendukung kesehatan hewan, keamanan pangan, dan penelitian. Layanan ini meliputi pemeriksaan penyakit melalui patologi klinis, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya, serta pengujian nutrisi dan pakan ternak. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pelayanan jasa laboratorium	Laporan pelayanan jasa laboratorium	Pengolah Data dan Informasi
	Tersedianya pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah laporan pelayanan jasa medik veteriner	Laporan	**Konsep :** Tersedianya serangkaian layanan kesehatan hewan yang mencakup diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, dan konsultasi untuk hewan. Layanan ini meliputi tindakan klinis, patologis, laboratorium, forensik, serta tindakan terapi seperti promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan medik reproduksi. Pelayanan ini dapat dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga paramedis veteriner di berbagai fasilitas, seperti klinik hewan, rumah sakit hewan, atau puskeswan	Laporan pelayanan jasa medik veteriner	Pengolah Data dan Informasi

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Definisi Operasional : Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan layanan kesehatan hewan yang mencakup diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, dan konsultasi untuk hewan. Layanan ini meliputi tindakan klinis, patologis, laboratorium, forensik, serta tindakan terapi seperti promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan medik reproduksi. Pelayanan ini dapat dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga paramedis veteriner di berbagai fasilitas, seperti klinik hewan, rumah sakit hewan, atau puskeswan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah laporan pelayanan jasa medik veteriner		
7.	Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan hygiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha	**Konsep :** Kegiatan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner untuk melindungi kesehatan manusia dari bahaya yang berasal dari hewan dan produk hewan, serta menjamin keamanan pangan asal hewan **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner untuk melindungi kesehatan manusia dari bahaya yang berasal dari hewan dan produk hewan, serta menjamin keamanan pangan asal hewan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Data unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Pengolah Data dan Informasi
	Terlaksananya pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	**Konsep :** Kegiatan pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan yang meliputi peningkatan keterampilan teknis, pemahaman kebijakan, serta kemampuan adaptasi terhadap ilmu dan teknologi baru. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan penting untuk memastikan petugas dapat melakukan diagnosis, penanganan penyakit, pengawasan produk hewan, dan memastikan kesejahteraan hewan sesuai standar. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan yang meliputi peningkatan keterampilan teknis, pemahaman kebijakan, serta kemampuan adaptasi terhadap ilmu dan teknologi baru. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan penting untuk memastikan petugas dapat melakukan diagnosis, penanganan penyakit, pengawasan produk hewan, dan memastikan kesejahteraan hewan sesuai standar.	Data Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Pengolah Data dan Informasi

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Formulasi Perhitungan : Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi		
8.	Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit Usaha	**Konsep :** Kegiatan yang melibatkan pengawasan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan interaksi manusia dengan hewan telah memenuhi standar dan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan **Definisi Operasional :** Terlaksananya pengawasan kesejahteraan hewan seperti di rumah potong hewan, tempat pemeliharaan, atau unit usaha produk hewan dan memastikan hewan diperlakukan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Data unit usaha yang dibina	Pengolah Data dan Informasi
9.	Terawasinya pelaksanaan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	Jumlah izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan yang diawasi	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) usaha peternakan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar mutu, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), dan kelestarian lingkungan **Definisi Operasional :** Jumlah kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) usaha peternakan. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan yang diawasi	Data Unit Usaha Peternakan	Pengolah Data dan Informasi
	Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah izin usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi	Laporan	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pengawasan proses perizinan resmi yang harus dijalani oleh pengusaha untuk mendapatkan legalitas dalam mendirikan dan mengoperasikan RPH sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin ini memastikan operasional RPH memenuhi standar higienis, kesehatan hewan, dan keamanan pangan demi menghasilkan daging yang aman dikonsumsi oleh masyarakat. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan proses perizinan resmi yang harus dijalani oleh pengusaha untuk mendapatkan legalitas dalam mendirikan dan mengoperasikan RPH sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin ini memastikan operasional RPH memenuhi standar higienis, kesehatan hewan, dan keamanan pangan demi menghasilkan daging yang	Data Rumah Potong Hewan	Pengolah Data dan Informasi

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				aman dikonsumsi oleh masyarakat. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi		
	Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktek Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktek Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner atau Pasar Hewan yang diawasi	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa semua persyaratan untuk izin usaha telah dipenuhi dan dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk kegiatan pelayanan kesehatan hewan seperti Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, dan lainnya. Ini memastikan bahwa semua praktik yang dilakukan legal dan memenuhi standar, seperti memiliki izin usaha dan izin praktik dari pihak berwenang. **Definisi Operasional :** Tersusunnya laporan kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa semua persyaratan untuk izin usaha telah dipenuhi dan dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk kegiatan pelayanan kesehatan hewan seperti Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, dan lainnya. Ini memastikan bahwa semua praktik yang dilakukan legal dan memenuhi standar, seperti memiliki izin usaha dan izin praktik dari pihak berwenang. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktek Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner atau Pasar Hewan yang diawasi	- Data Rumah Sakit Hewan, - Data Klinik Hewan, - Data Ambulatori, - Data Praktek Dokter Hewan Mandiri/ Puskeswan Mandiri, - Data Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner - Data Pasar Hewan	Pengolah Data dan Informasi
10.	Terawasinya pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan	Jumlah izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi	Laporan	**Konsep :** Kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) pelaku usaha obat hewan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar mutu, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), dan kelestarian lingkungan **Definisi Operasional :** Jumlah kegiatan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan pembinaan (fasilitasi dan pendampingan) pelaku usaha obat hewan **Formulasi Perhitungan :** Jumlah izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi	Data Pelaku Usaha Obat Hewan	Pengolah Data dan Informasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Tugas : Melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengkajian kebijakan, dan pengembangan layanan di bidang pengawas mutu hasil pertanian.
Fungsi :
1. Menyusun rencana kerja pengembangan standar keamanan dan/atau mutu hasil pertanian;
2. Menyusun rencana kerja pengawasan keamanan dan/atau mutu hasil pertanian;
3. Menyusun materi muatan regulasi teknis di bidang peningkatan produksi, keamanan dan/atau mutu hasil pertanian;
4. Melaksanakan disminasi informasi pertanian kepada pelaku usaha;
5. Fasilitasi penerapan/pengawasan keamanan dan/atau mutu hasil pertanian, dan upaya peningkatan produksi;
6. Mengumpulkan data pelaku usaha/unit usaha dan rekomendasi teknis;
7. Melaksanakan pengawasan keamanan dan/atau mutu hasil pertanian;
8. Mengembangkan sistem dan metode di bidang peningkatan produksi, keamanan dan mutu hasil pertanian;
9. Mengembangkan sistem peningkatan produksi, manajemen mutu dan/atau keamanan pangan hasil pertanian;
10. Melaksanakan analisa risiko terhadap sistem keamanan dan/atau mutu hasil pertanian;
11. Melakukan pengujian keamanan dan mutu hasil pertanian;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya pelatihan di kelompok tani	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Unit	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa untuk memperkuat kelembagaan yang ada di tingkat kecamatan dan desa agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan **Definisi Operasional :** Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Data kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
		Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan petani di	Unit	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pelatihan kelembagaan petani di kecamatan dan desa untuk memperkuat kelembagaan yang ada di tingkat kecamatan dan desa agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan	Data kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kecamatan dan desa		**Definisi Operasional :** Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya		
		Tersedia dan termanfaatkannya sarana dan prasarana penyuluh pertanian	Unit	**Konsep :** Tersedianya fasilitas pendukung yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan secara optimal dan digunakan secara efektif oleh para penyuluh dan petani untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian. **Definisi Operasional :** Jumlah fasilitas pendukung yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan secara optimal dan digunakan secara efektif oleh para penyuluh dan petani untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah sarana dan prasarana penyuluh pertanian yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan pertanian berada dalam kondisi siap pakai, dapat diakses, dan digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan penyuluhan, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani.	Data sarana dan prasarana penyuluh pertanian	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
		Terbentuknya dan terselenggaranya sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Unit	**Konsep :** Terlaksananya proses pembelajaran partisipatif dan non-formal bagi kelompok tani, dengan fokus utama pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani secara langsung di lahan. **Definisi Operasional :** Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang berhasil dibentuk secara administratif dan beroperasi secara aktif (melakukan pertemuan rutin, praktik lapangan, dan menunjukkan peningkatan kapasitas petani) di tingkat kabupaten/kota **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang dibentuk		
	Terlaksananya pelatihan	Tersedia dan meningkatnya	Orang	**Konsep :** Ketersediaan penyuluh pertanian yang memadai, tersebar secara merata, dan dapat diakses oleh petani di berbagai wilayah.	Data Penyuluh Pertanian	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	penyuluh pertanian	kapasitas penyuluh pertanian		Peningkatan kapasitas adalah upaya sistematis untuk mengembangkan kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) penyuluh agar dapat menjalankan peran dan tugasnya secara optimal dalam menghadapi tantangan pertanian modern. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pelatihan penyuluh pertanian untuk mengembangkan kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) penyuluh agar dapat menjalankan peran dan tugasnya secara optimal dalam menghadapi tantangan pertanian modern. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
Tugas : Menerima dan mengolah data bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian , yang dilengkapi hasil laporan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.
Fungsi :
1. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
2. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan sifat data di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
3. Menganalisis data Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian , sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk;
4. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data yang masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mengetahui volume dan jenis data bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang akan diolah;
5. Mencatat perkembangan dan permasalahan data bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian secara periodik, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya;
6. Mengolah dan menyajikan data bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut;
7. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan, sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah kegiatan kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa untuk memperkuat kelembagaan yang ada di tingkat kecamatan dan desa agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan **Definisi Operasional :** Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Data kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pelatihan kelembagaan petani di kecamatan dan desa untuk memperkuat kelembagaan yang ada di tingkat kecamatan dan desa agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan **Definisi Operasional :** Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Data kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
	Tersedia dan termanfaatkannya sarana dan prasarana penyuluh pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluh pertanian yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan pertanian berada dalam kondisi siap pakai, dapat diakses, dan digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan penyuluhan, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani.	Unit	**Konsep :** Tersedianya fasilitas pendukung yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan secara optimal dan digunakan secara efektif oleh para penyuluh dan petani untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian. **Definisi Operasional :** Jumlah fasilitas pendukung yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan secara optimal dan digunakan secara efektif oleh para penyuluh dan petani untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah sarana dan prasarana penyuluh pertanian yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan pertanian berada dalam kondisi siap pakai, dapat diakses, dan digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan penyuluhan, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani.	Data sarana dan prasarana penyuluh pertanian	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
	Terbentuknya dan terselenggarany	Jumlah Sekolah Lapang	Unit	**Konsep :** Terlaksananya proses pembelajaran partisipatif dan non-formal bagi kelompok tani, dengan fokus utama pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani secara langsung di		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	a sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Kelompok Tani yang dibentuk		lahan. **Definisi Operasional :** Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang berhasil dibentuk secara administratif dan beroperasi secara aktif (melakukan pertemuan rutin, praktik lapangan, dan menunjukkan peningkatan kapasitas petani) di tingkat kabupaten/kota **Formulasi Perhitungan :** Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang dibentuk		
	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	**Konsep :** Ketersediaan penyuluh pertanian yang memadai, tersebar secara merata, dan dapat diakses oleh petani di berbagai wilayah. Peningkatan kapasitas adalah upaya sistematis untuk mengembangkan kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) penyuluh agar dapat menjalankan peran dan tugasnya secara optimal dalam menghadapi tantangan pertanian modern. **Definisi Operasional :** Terlaksananya kegiatan pelatihan penyuluh pertanian untuk mengembangkan kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) penyuluh agar dapat menjalankan peran dan tugasnya secara optimal dalam menghadapi tantangan pertanian modern. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Data Penyuluh Pertanian	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Penyuluh Pertanian Ahli Muda
Tugas : Menganalisa data potensi wilayah, penumbuhkembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani, serta melakukan diseminasi materi dan informasi pertanian.
Fungsi :
1. Melakukan analisis hasil rekapitulasi data potensi wilayah (SDA, ADM. SDE);
2. Melakukan analisis hasil rekapitulasi data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing sub sektor sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan;
3. Melakukan diseminasi informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi) sesuai kebutuhan;
4. Melakukan evaluasi penumbuhan Poktan;
5. Melakukan evaluasi penumbuhan Gapoktan;
6. Melakukan evaluasi penumbuhan KEP;
7. Melakukan evaluasi materi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan dan KEP;
8. Melakukan fasilitasi peningkatan akses informasi pasar dan pembiayaan poktan / gapoktan;
9. Melakukan evaluasi fasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan / Gapoktan melalui kegiatan Farmers Filed Day (FFD) dan pemeran;
10. Melakukan analisis hasil rekapitulasi data fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan / Gapoktan;
11. Melakukan evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui demfarm;
12. Melakukan evaluasi penumbuhan Posluhdes;
13. Melakukan evaluasi penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya pelatihan di kelompok tani	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Unit	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa untuk memperkuat kelembagaan yang ada di tingkat kecamatan dan desa agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan **Definisi Operasional :** Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Data kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa	Penyuluh Pertanian Ahli Muda
		Terlaksananya pengembangan kapasitas	Unit	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pelatihan kelembagaan petani di kecamatan dan desa untuk memperkuat kelembagaan yang ada di tingkat kecamatan dan desa agar mampu	Data kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Penyuluh Pertanian Ahli Muda

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kelembagaan petani di kecamatan dan desa		menjalankan fungsinya secara efektif, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan **Definisi Operasional :** Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya		
		Tersedia dan termanfaatkannya sarana dan prasarana penyuluh pertanian	Unit	**Konsep :** Tersedianya fasilitas pendukung yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan secara optimal dan digunakan secara efektif oleh para penyuluh dan petani untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian. **Definisi Operasional :** Jumlah fasilitas pendukung yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan secara optimal dan digunakan secara efektif oleh para penyuluh dan petani untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah sarana dan prasarana penyuluh pertanian yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan pertanian berada dalam kondisi siap pakai, dapat diakses, dan digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan penyuluhan, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani.	Data sarana dan prasarana penyuluh pertanian	Penyuluh Pertanian Ahli Muda

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Penyuluh Pertanian Ahli Pertama
Tugas : Merekapitulasi dan mengoleh data potensi wilayah penumbuhan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani, serta melakukan diseminasi materi dan informasi pertanian.
Fungsi :
1. Melakukan rekapitulasi dan mengolah Data potensi wilayah (SDA, SDM, SDE);
2. Melakukan rekapitulasi dan mengolah data kegiatan penyuluhan pertaniansesuai kebutuhan masing-masing sub sektor sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan pertanian;
3. Melakukan diseminasi informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi) sesuai kebutuhan;
4. Mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan Poktan;
5. Mengumpulkan dan mengolah data peningkatan kelas kemampuan Poktan;
6. Mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan Gapoktan;
7. Mengumpulkan dan mengolah data pengembangan Gapoktan;
8. Mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan KEP;
9. Mengumpulkan dan mengolah data pengembangan KEP;
10. Melakukan evaluasi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan KEP;
11. Melakukan evaluasi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan KEP;
12. Mengumpulkan dan mengolah data fasilitasi penerapan teknologi melalui kegiatan Farmer Field Day, study banding, pamerandan gelar teknologi;
13. Mengumpulkan, mengolah dan merekapitulasi data fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan /Gapoktan;
14. Melakukan evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui demplot;
15. Mengumpulkan, mengolah dan merekapitulasi data penumbuhan Posluhdes;
16. Mengumpulkan, mengolah dan merekapitulasi data pengembangan Posluhdes;
17. Mengumpulkan, mengolah dan merekapitulasi data penumbuhan Penyuluh Swadaya;
18. Mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya pelatihan di kelompok tani	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Unit	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa untuk memperkuat kelembagaan yang ada di tingkat kecamatan dan desa agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan **Definisi Operasional :** Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan	Data kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				dan desa **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya		
		Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Unit	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pelatihan kelembagaan petani di kecamatan dan desa untuk memperkuat kelembagaan yang ada di tingkat kecamatan dan desa agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan **Definisi Operasional :** Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Data kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama
		Tersedia dan termanfaatkannya sarana dan prasarana penyuluh pertanian	Unit	**Konsep :** Tersedianya fasilitas pendukung yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan secara optimal dan digunakan secara efektif oleh para penyuluh dan petani untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian. **Definisi Operasional :** Jumlah fasilitas pendukung yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan secara optimal dan digunakan secara efektif oleh para penyuluh dan petani untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah sarana dan prasarana penyuluh pertanian yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan pertanian berada dalam kondisi siap pakai, dapat diakses, dan digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan penyuluhan, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani.	Data sarana dan prasarana penyuluh pertanian	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Penyuluh Pertanian Penyelia
Tugas : Melakukan diseminasi materi dan informasi pertanian, mengolah data potensi wilayah serta penumbuhkembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
Fungsi :
1. Melakukan rekapitulasi data potensi wilayah;
2. Merumuskan programa penyuluhan pertanian;
3. Melakukan penyebaran informasi pertanian melalui penggunaan media cetak;
4. Meningkatkan kelas kemampuan Poktan dari kelas Madya menjadi kelas Utama;
5. Meningkatkan kelas kemampuan Gapoktan dan kelas Madya menjadi kelas Utama;
6. Meningkatkan kelas kemampuan KEP dari kelas madya menjadi kelas Utama;
7. Melakukan fasilitas kemitraan Poktan, Gapoktan, dan KEP dengan pihak lain;
8. Melakukan fasilitasi Poktan/ Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi pembiayaan;
9. Melakukan fasilitasi Poktan / Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui gelar teknologi;
10. Melakukan fasilitasi Poktan / Gapoktan dalam menerapkan dan meningkatkan skala usaha tani;
11. Melakukan fasilitasi penerapan teknologi melalui demarea;
12. Melakukan penumbuhan Posluhdes;
13. Melakukan pengembangan Posluhdes;
14. Melakukan penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya;
15. Melakukan pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya pelatihan di kelompok tani	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Unit	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa untuk memperkuat kelembagaan yang ada di tingkat kecamatan dan desa agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan **Definisi Operasional :** Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan dan desa yang	Data kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa	Penyuluh Pertanian Penyelia

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				ditingkatkan kapasitasnya		
		Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Unit	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pelatihan kelembagaan petani di kecamatan dan desa untuk memperkuat kelembagaan yang ada di tingkat kecamatan dan desa agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan **Definisi Operasional :** Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Data kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Penyuluh Pertanian Penyelia
		Tersedia dan termanfaatkannya sarana dan prasarana penyuluh pertanian	Unit	**Konsep :** Tersedianya fasilitas pendukung yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan secara optimal dan digunakan secara efektif oleh para penyuluh dan petani untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian. **Definisi Operasional :** Jumlah fasilitas pendukung yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan secara optimal dan digunakan secara efektif oleh para penyuluh dan petani untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah sarana dan prasarana penyuluh pertanian yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan pertanian berada dalam kondisi siap pakai, dapat diakses, dan digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan penyuluhan, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani.	Data sarana dan prasarana penyuluh pertanian	Penyuluh Pertanian Penyelia

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Penyuluh Pertanian Mahir
Tugas : Melakukan diseminasi materi dan informasi pertanian, merekapitulasi data potensi wilayah dan penumbuhkembangan kelembagaan petani.
Fungsi : 1. Melakukan rekapitulasi data potensi wilayah;
2. Melakukan pengolahan data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor;
3. Melakukan penyebaran informasi pertanian secara massal;
4. Meningkatkan kelas kemampuan Poktan dari kelas Lanjut menjadi kelas madya;
5. Meningkatkan kelas kemampuan Gapoktan dari kelas Lanjut menjadi kelas madya;
6. Peningkatan kelas kemampuan KEP dari kelas Lanjut menjadi kelas madya;
7.Melakukan penyiapan materi peningkatan kapasitas Poktan,Gapoktan dan KEP;
8.Melakukan fasilitasi Poktan / Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi sarana dan prasarana;
9.Melakukan fasilitasi Poktan / Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui studi banding dan pameran;
10.Melakukan fasilitasi validsi data hasil pengumpulan data peningkatan skala usaha tani Poktan, Gapoktan;
11.Melakukan fasilitasi penerapan teknologi melalui demfarm;
12.Melakukan pengelolaan data hasil rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Posluhdes;
13.Melakukan pengolahan data hasil rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan Posluhdes;
14.Melakukan pengolahan data hasil rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya;
15.Melakukan pengolahan data hasil rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya;
16.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya pelatihan di kelompok tani	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Unit	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa untuk memperkuat kelembagaan yang ada di tingkat kecamatan dan desa agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan **Definisi Operasional :** Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Data kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa	Penyuluh Pertanian Mahir

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Unit	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pelatihan kelembagaan petani di kecamatan dan desa untuk memperkuat kelembagaan yang ada di tingkat kecamatan dan desa agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan **Definisi Operasional :** Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Data kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Penyuluh Pertanian Mahir
		Tersedia dan termanfaatkannya sarana dan prasarana penyuluh pertanian	Unit	**Konsep :** Tersedianya fasilitas pendukung yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan secara optimal dan digunakan secara efektif oleh para penyuluh dan petani untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian. **Definisi Operasional :** Jumlah fasilitas pendukung yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan secara optimal dan digunakan secara efektif oleh para penyuluh dan petani untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah sarana dan prasarana penyuluh pertanian yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan pertanian berada dalam kondisi siap pakai, dapat diakses, dan digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan penyuluhan, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani.	Data sarana dan prasarana penyuluh pertanian	Penyuluh Pertanian Mahir

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Jabatan : Penyuluh Pertanian Terampil
Tugas : Melakukan diseminasi materi dan informasi pertanian menginvetarisasi dan mengidentifikasi data potensi wilayah, serta penumbuhan kelembagaan petani.
Fungsi :
1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya energi;
2. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan pertanian;
3. Melakukan penyebaran informasi pertanian melalui tatap muka kelompok;
4. Melakukan penumbuhan Poktan;
5. Meningkatkan kelas kemampuan Poktan dari kelas Pemula menjadi kelas lanjut;
6. Melakukan penumbuhan Gapoktan;
7. Meningkatkan kelas kemampuan Gapoktan dari kelas Pemula menjadi kelas lanjut;
8. Melakukan penumbuhan KEP;
9. Meningkatkan kelas kemampuan KEP dari kelas Pemula menjadi lanjut;
10. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas poktan, Gapoktan dan KEP;
11. Melakukan fasilitasi Poktan / Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi teknologi dan pasar;
12. Melakukan fasilitasi Poktan / Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui kegiatan Farmers Field Day (FFD);
13. Melakukan fasilitasi Poktan / Gapoktan dalam pengumpulan dan rekalpitulasi data sebagai bahan penetapan dan peningkatan skala usaha tani;
14. Melakukan fasilitasi penerapan teknologi melalui demplot;
15. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Posluhdes;
16. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan Posluhdes;
17. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya;
18. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya pelatihan di kelompok tani	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Unit	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa untuk memperkuat kelembagaan yang ada di tingkat kecamatan dan desa agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan **Definisi Operasional :** Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan	Data kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa	Penyuluh Pertanian Terampil

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				dan desa **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya		
		Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Unit	**Konsep :** Terlaksananya kegiatan pelatihan kelembagaan petani di kecamatan dan desa untuk memperkuat kelembagaan yang ada di tingkat kecamatan dan desa agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan **Definisi Operasional :** Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa **Formulasi Perhitungan :** Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Data kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Penyuluh Pertanian Terampil
		Tersedia dan termanfaatkannya sarana dan prasarana penyuluh pertanian	Unit	**Konsep :** Tersedianya fasilitas pendukung yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan secara optimal dan digunakan secara efektif oleh para penyuluh dan petani untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian. **Definisi Operasional :** Jumlah fasilitas pendukung yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan secara optimal dan digunakan secara efektif oleh para penyuluh dan petani untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian. **Formulasi Perhitungan :** Jumlah sarana dan prasarana penyuluh pertanian yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan pertanian berada dalam kondisi siap pakai, dapat diakses, dan digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan penyuluhan, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani.	Data sarana dan prasarana penyuluh pertanian	Penyuluh Pertanian Terampil